



Pemerintah Kabupaten
Lampung Timur

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2024

Komplek Perkantoran Pemda Jln. Buay Subing Sukadana 34194
Telp. (0725) 625041

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan tahun ke-4 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 sd 2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur. Dalam rangka untuk menunjang tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 yaitu “Melanjutkan Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, dan Pelayanan Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah Berkelanjutan”, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan kegiatan dan program dari sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur khususnya urusan wajib bidang kesehatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sukadana, September 2024


HAIROUL AZMAN, S.Kep., M.Kes
Pembina
NIP. 19661114 198711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....	7
A. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang telah memenuhi target kinerja di Tahun 2023.....	10
B. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2023.....	14
C. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang di rencanakan tahun 2023.....	18
D. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023.....	19
E. Implikasi yang ditimbulkan terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.....	19
F. Kebijakan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.....	19
2.2 Analisis Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.....	70
A. Capaian SDGs Sektor Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.....	70
B. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....	72
C. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....	92
D. Analisa Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten LampungTimur berdasarkan Norma Standar Pedoman Kriteria(NSPK).....	131
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....	142
A. Hal kritis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.....	142
B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam	

penyelenggaraan dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Lampung Timur..... 142

C. Dampaknya terhadap capaian SPM dan SDGs..... 143

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah 143

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025..... 144

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 145

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 182

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 186

A. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi 186

B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda..... 187

C. Peningkatan pengendalian penyakit, peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut..... 187

D. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)..... 187

E. Penguatan Sistem Kesehatan..... 188

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur 196

A. Tujuan..... 196

B. Sasaran..... 196

3.3 Program dan Kegiatan..... 197

A. Program Prioritas..... 198

B. Program Penunjang..... 203

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025..... 260

BAB V PENUTUP..... 276

LAMPIRAN

1. Tabel 2.1.3T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur s/d Tahun 2023

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1 ¹ Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	7
Tabel 2.1.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023	9
Tabel 2.1.3T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD danPencapaian Renstra PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur s/d Tahun 2023.....	20
Tabel 2.2.1 Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....	71
Tabel 2.2.2 Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	73
Tabel 2.2.3 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Lampung Timur Tahun 2023	92
Tabel 2.2.4 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja AHH Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	94
Tabel 2.2.5 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	95
Tabel 2.2.6 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	101
Tabel 2.2.7 Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 sd 2024	103
Tabel 2.2.8 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026	106
Tabel 2.2.9 Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	117
Tabel 2.2.10 Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023 dengan Tahun 2022	119
Tabel 2.2.11 Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 sd 2023.....	123
Tabel 2.2.12. Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan jenis tenaga kesehatan menurut Puskesmas di Kabupaten Lampung 2023.....	124
Tabel 2.2.13 Perkembangan Jumlah Sarana Kesehatan dan UKBM Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 sd 2023	125
Tabel 2.2.14 Kondisi Bangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	126
Tabel 2.2.15 Jumlah dan kondisi Kendaraan Ambulans dan Puskesmas Keliling di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023	127

Tabel 2.2.16 Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.....129

Tabel 2.2.17 TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur 133

Tabel 2.2.18T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Timur 146

Tabel 2.2.19 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Timur Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 183

Tabel 3.3.1TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Lampung Timur Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan 206

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dengan mempertimbangkan urutan pilihan dan ketersediaan sumber daya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut di atas melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan tersebut, rencana pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Timur dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU itu juga disebutkan bahwa Renstra SKPD sebagai rencana 5 tahunan SKPD, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.

Secara substansi, Renja SKPD memuat evaluasi Renja SKPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan kesehatan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini berdasarkan pada struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, prioritas nasional, prioritas daerah dan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, namun dengan tetap memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan yang ada, dan isu strategis yang akan dihadapi.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *teknokratik*, *partisipatif*, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antara usulan tingkat kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat dinas, kajian di tingkat Kabupaten, serta usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kabupaten, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
4. Program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada Era Desentralisasi, perlu disusun langkah-langkah perencanaan program pembangunan yang strategis, lebih fokus dan mengungkit capaian IPM, serta berdasarkan skala prioritas mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya tenaga dan sarana maupun prasarana.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Kesehatan dan digunakan sebagai bahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Topografi Kabupaten Lampung Timur pada umumnya merupakan daerah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian wilayah 50 meter di atas permukaan laut (mdpl). Terdapat lima wilayah dengan ketinggian di bawah 25 mdpl yakni Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Braja Selehah, dan Labuhan Ratu. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3- 8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar, dan kelas lereng berbukit (15–40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, dengan pusat pemerintahan di kota Sukadana. Pada awal pembentukannya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan

definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Namun Kabupaten Lampung Timur mengalami pemekaran, dan hingga tahun 2022 terdiri atas 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Jarak ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten terdekat berjarak 7,7 km yaitu Kecamatan Sukadana sedangkan jarak terjauh yaitu Kecamatan Pasir Sakti berjarak 79 km.

Berdasarkan data penduduk dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebanyak 1.137.434 jiwa, terdiri dari 578.452 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 558.979 penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,84%, menurun signifikan bila dibanding laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya yakni 0,90%. Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 adalah 3 yang berarti bahwa dalam satu rumah tangga rata-rata terdiri dari 3 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur khususnya di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, untuk melaksanakan tugas tersebut maka diperlukan sebuah Rencana Strategis Kesehatan (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Dinas Kesehatan. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur masih terkait dengan masih rendahnya tingkat derajat kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, yang dapat dilihat dari masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi, masih tingginya prevalensi stunting dan wasting, masih rendahnya penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis, masih rendahnya penemuan dan pengobatan kasus HIV serta masih tingginya kasus DBD di Masyarakat.

Sasaran Renstra Dinas Kesehatan periode tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak dengan indikator Penurunan Angka kematian ibu menjadi 80,82 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Angka kematian Bayi menjadi 5,1 per 1000 Kelahiran Hidup.
2. Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator penurunan prevalensi stunting menjadi 12,7 % dan prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita menjadi 4,8 %.
3. Menurunnya Angka Kesakitan dengan indikator Treatment Coverage pada pasien TB sebesar 90 %, Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV sebesar 0,19 dan Insiden Rate kasus DBD < 10 per 100.000 penduduk.
4. Meningkatnya kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dengan indikator Indeks Keluarga Sehat sebesar 0,52 dan Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri sebesar 69,24 %.

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan sebuah dokumen acuan yang menjadi arah pelaksanaan sebuah kegiatan di tahun 2025. Renja ini memuat program-program yang merupakan wujud nyata dari strategi dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 - 2026. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan mengacu pada dokumen

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026 yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020 - 2024;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 -2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
23. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis ;
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 81);
25. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja yaitu sebagai upaya untuk penyampaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk pencapaian target pembangunan kesehatan yang terinci dalam indikator masing-masing kegiatan sesuai tahapan waktu pencapaiannya Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan dari penyusunan dokumen Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 dan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mendeskripsikan tentang tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dicapai di tahun 2025.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan seluruh rencana kerja untuk masing-masing Sub Kegiatan yang telah diidentifikasi dalam percepatan pencapaian indikator kinerja OPD pada tahun 2025 berikut proyeksi sumber pendanaan untuk masing-masing subkegiatan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan atas Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Minimal, serta Program Prioritas dan Penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2023 telah dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program sebanyak 5 (lima) Program, jumlah kegiatan sebanyak 21 (dua puluh satu) kegiatan, jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2023 untuk Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp. 305.602.772.440,- (Tiga Ratus Lima Milyar Enam Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 266.357.694.185,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 87,16 %. Penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian kinerja di Kabupaten Lampung Timur tergambar dalam tabel berikut:

Penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persen
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rp 305,602,772,440.	Rp 266,358,997,234.	87.16
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak				
2	Penurunan Kasus Kematian Ibu (kasus)	Rp 4,643,027,694.	Rp 3,606,839,054.	77.68
3	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (TPB)			
Meningkatnya status gizi masyarakat				
4	Prevalensi Stunting	Rp 5,721,907,345.	Rp 3,750,837,502.	65.55
5	Prevalensi Wasting pada balita			
Menurunnya Angka Kesakitan				
6	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Rp 1,245,754,200.	Rp 1,087,668,400.	87.31
7	Treatment Coverage pada Pasien TB			
8	Insideni HIV per 1.000 penduduk yang terinfeksi HIV	Rp 1,095,061,500.	Rp 783,503,200.	71.55
9	Insiden Rate Kasus DBD per 100.000 penduduk	Rp 976,057,000.	Rp 657,125,800.	67.32
Meningkatnya kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan				
10	Indeks Keluarga Sehat	Rp 511,250,545.	Rp 499,950,000.	97.79

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persen
11	Persentase Desa Siaga Aktif dengan Strata Purnama Mandiri	Rp 5,553,060,169.	Rp 4,433,161,191.	79.83
Meningkatnya pengendalian penyakit Menular yang berpotensi pandemi				
12	Positifity Rate	0	0	
13	CFR (Case Fatality Rate)			
Meningkatnya pelayanan terhadap kasus korban NAPZA				
14	Persentase Pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani	Rp 88,267,400.	Rp 71,637,000.	81.16
15	Cakupan Pelayanan Korban NAPZA			

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran yang mendukung upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, sebagian besar (67%) terealisasi cukup tinggi/ tinggi. Hal-hal yang terkait dengan realisasi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja dengan realisasi anggaran tinggi dan 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi anggaran sangat tinggi.
2. Indikator kinerja Insideni HIV per 1.000 penduduk yang terinfeksi HIV dengan realisasi anggaran 71.55% dan Insiden Rate Kasus DBD per 100.000 penduduk dengan realisasi anggaran (67.32%). Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan volume kegiatan pada perjalanan dinas dan pada kegiatan penanggulangan DBD dimana kegiatan disesuaikan dengan jumlah kasus kejadian. Namun secara kinerja, kegiatan yang mendukung pelaksanaan 2 (dua) indikator di atas telah dilaksanakan 100%.
3. Indikator prevalensi stunting dan prevalensi wasting balita dengan realisasi anggaran 65.55%; hal tersebut disebabkan karena pemberian PMT lokal untuk ibu hamil KEK dan balita gizi buruk tidak terlaksana karena anggaran turun di bulan November.
4. Indikator kinerja positifity rate dan case fatality rate pada Covid 19 tidak teranggarkan karena kasus Covid 19 telah berhasil dikendalikan dan adanya perubahan status pandemi menjadi endemi.

Berikut adalah realisasi anggaran yang mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 :

Tabel 2.1.2
 Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal
 Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persen
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp 2,868,929,794	Rp 2,492,118,454	86.87
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp 1,117,059,200	Rp 744,156,400	66.62
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp 657,038,700	Rp 370,564,200	56.40
4	Pelayanan kesehatan balita	Rp 1,379,839,214	Rp 1,090,632,800	79.04
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp 1,808,723,423	Rp 1,660,929,000	91.83
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp 6,024,400,151	Rp 5,650,838,619	93.80
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp 1,815,727,740	Rp 1,718,988,080	94.67
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rp 269,930,000	Rp 264,154,900	97.86
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Rp 1,134,670,400	Rp 1,037,612,800	91.45
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rp 793,033,109	Rp 412,537,600	52.02
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Rp 918,404,200	Rp 815,168,400	88.76
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Rp 1,086,211,500	Rp 774,653,200	71.32

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

Sebagian besar realisasi anggaran yang mendukung upaya pencapaian indiktor SPM dalam katagori sangat tinggi dan tinggi, yakni mencapai 66.67% dari jumlah indikator layanan. Rincian realisasi anggaran yang mendukung indikator SPM, sebagai berikut :

1. Terdapat 5 (lima) indikator SPM yang didukung dengan capaian realisasi anggaran sangat tinggi dan 3 (tiga) indikator SPM dengan capaian realisasi anggaran tinggi.
2. Indikator SPM dengan realisasi anggaran sedang yakni pelayanan kesehatan ibu bersalin (66.62%) dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Realisasi anggaran yang mendukung SPM pelayanan kesehatan ibu bersalin tidak tercapai 100% dikarenakan pada anggaran makan/ minum pasien di tempat tunggu kelahiran (TTK) tidak terealisasi dikarenakan pasien hanya transit, transport rujukan ibu bersalin tidak terealisasi dikarenakan sebagian besar rujukan menggunakan PSC dan ambulance desa, honor nara sumber pada kegiatan pendampingan gawat darurat maternal oleh tenaga ahli dilaksanakan secara regional karena keterbatasan SDM ahli. Sedangkan penyebab anggaran yang mendukung pelayanan kesehatan terhadap penderita beresiko terinfeksi HIV tidak terealisasi 100% dikarenakan perbedaan volume kegiatan. Walaupun kedua anggaran yang mendukung 2 (dua) SPM tersebut tidak terealisasi 100%, namun secara fisik kegiatan terlaksana 100%.

3. Indikator SPM dengan realisasi anggaran rendah yakni pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir (56.40%) dan pelayanan pada ODGJ berat (52.02%). Penyebab rendahnya realisasi anggaran pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir disebabkan karena belanja pemeriksaan SHK sebagian masih ada pembiayaan dari APBN yakni pada periode peralihan tahun anggaran, selain itu jasa pengiriman sampel di klaim sesuai dengan klaim resi. Sedangkan realisasi anggaran pelayanan ODGJ berat tidak terealisasi 100% disebabkan karena anggaran untuk pengadaan obat jiwa tidak terlaksana akibat dari distributor dan stock obat jiwa terbatas pada pemesanan di akhir tahun.

Adapun realisasi kinerja per sub kegiatan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Realisasi subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja ditahun 2023.

Terdapat 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang realisasinya telah mencapai 100%, antara lain adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (renja murni, renja perubahan, PPAS murni dan PPAS perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 4 dokumen.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator keluaran Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 laporan.
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 dokumen.
8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 1.454 orang per bulan.

9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 1 dokumen.
10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD sebanyak 1 dokumen.
11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 3 dokumen.
13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD danLaporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan.
14. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan.
15. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan.
16. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 1 dokumen.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 950 dokumen.
18. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.
19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.
20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket.
21. Penyediaan bahan logistik kantor dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.
22. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 paket.

23. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 paket.
24. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan.
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan.
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 3 unit.
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 4 unit.
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit (100 %)
29. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sebanyak 35 Unit Kerja (100 %).
30. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun sebanyak 2 unit (100 %).
31. Pengembangan Rumah Sakit dengan indikator kinerja keluaran Jumlah gedung/bangunan Pediatric ICU (PICU) Rumah Sakit yang dibangun (retensi) sebanyak 1 unit unit.
32. Pengembangan Puskesmas dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (retensi bangunan PONED sebanyak 4 unit di 4 puskesmas, dan perluasan puskesmas rawat inap Purbolinggo dan Batanghari) sebanyak 2 unit.
33. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (retensi gedung labkesda yang direlokasi/diperluas sesuai standar BSL2 sebanyak 1 unit gedung labkesda).
34. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan

- SDM Sesuai Standar (retensi gedung pustu yang direhabilitasi mendapatkan sebanyak 3 unit pustu dan jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sebanyak 15 unit).
35. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan sebanyak 4 unit.
 36. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan sebanyak 1 unit.
 37. Pengadaan Obat, Vaksin dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan sebanyak 1 paket.
 38. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatanyang Terpelihara Sesuai Standar sebanyak 10 unit.
 39. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai(BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya sebanyak 4 paket.
 40. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok dengan indikator kinerja keluaran Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Dinas Kesehatan) sebanyak 2 tatanan.
 41. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan sebanyak 1 dokumen.
 42. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sebanyak 2 dokumen.
 43. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan sebanyak 39 unit terdiri dari 34 Puskesmas dan 5 Rumah Sakit.
 44. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasanserta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebanyak 30 dokumen.
 45. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan indikator kinerja keluaran sebanyak 53 dokumen.

B. Realisasi subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja tahun 2023

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak 47 sub kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai mencapai 100% yaitu :

1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 laporan (target 1 laporan), hanya ada penghapusan BMD di RSUD sebanyak 1 paket.
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 18 laporan (target 34 laporan) (capaian 53 %).
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 2 laporan (target 12 laporan) (capaian 17 %), karena realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 45 laporan (target 77 laporan) (capaian 58 %), capaian realisasi keuangan rendah karena SPD tidak keluar (efisiensi) serta tranport PP diberikan berdasarkan klaim BBM).
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 25 unit (target 78 unit), capaian rendah dikarenakan SPD tidak keluar (efisiensi).
6. Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan sebanyak 2 paket (target 3 paket), tidak tercapai target 100 % karena penyediaan bahan habis pakai dari sumber DAU Block Grand tidak keluar SPD nya.
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 14.702 bumil (target 17.602 bumil).
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 14.827 ibu bersalin (target 15.906 ibu bersalin).
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 14.638 bayi baru lahir (target 15.892 bayi baru lahir).
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 49.632 balita (target 61.476 balita).

11. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan indikator kinerja keluaran jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 155.630 anak usia Pendidikan dasar (target 161.580 anak usia Pendidikan dasar).
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dengan indikator kinerja keluaran jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 281.347 orang (target 681.706 orang)
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan indikator kinerja keluaran jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 125.124 usila (target 151.668 usila)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan indikator kinerja keluaran jumlah kasus Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 82.949 orang (target 273.143 orang).
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dengan indikator kinerja keluaran jumlah kasus Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 10.092 orang (target 13.403 orang)
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat dengan indikator kinerja keluaran jumlah kasus ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.787 orang (target 1.879 orang)
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan indikator kinerja keluaran jumlah terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 13.660 orang (target 17.679 orang)
18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV dengan indikator kinerja keluaran Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan screening HIV/AIDS sebanyak 14.677 orang (target 20.954 orang).
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencanadan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar sebanyak 0 dokumen, tidak terealisasi karena pada tahun 2023 di Puskesmas Mataram Baru tidak terjadi kasus bencana.
20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebanyak 467 dokumen (target 612 dokumen).
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebanyak 726 dokumen (target 799 dokumen).

22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebanyak 3.355 dokumen (3.636 dokumen).
23. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 121 dokumen (target 146 dokumen).
24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan) sebanyak 24 dokumen (target 26 dokumen).
25. Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan) sebanyak 1.922 dokumen (2.915 dokumen).
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) sebanyak 20 orang (target 22 orang).
27. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dinas Kesehatan) sebanyak 26 dokumen (target 27 dokumen).
28. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan) sebanyak 5.798 dokumen (target 8.932 dokumen).
29. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) sebanyak 20 dokumen (target 21 dokumen).
30. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Dinas Kesehatan) sebanyak 130 orang (target 3.400 orang).
31. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Dinas Kesehatan) sebanyak 521 paket (target 1.272 paket).
32. Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RS Sukadana) sebanyak 0 dokumen (target 1 dokumen).

33. Operasional Pelayanan Puskesmas dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dinas Kesehatan) sebanyak 865 dokumen (target 965 dokumen).
34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan indikator kinerja keluaran jumlah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan) sebanyak 23 dokumen (target 34 dokumen).
35. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) sebanyak 187 laporan (target 286 laporan).
36. Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon wabah dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinas Kesehatan) sebanyak 222 dokumen (target 226 dokumen).
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi MasalahKesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Dinas Kesehatan) sebanyak 195.004 keluarga (target 318.478 keluarga).
38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis dengan indikator kinerja keluaran Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 1.048 orang (target 3.638 orang).
39. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV) dengan indikator kinerja keluaran Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 10 orang (target 514 orang).
40. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria dengan indikator kinerja keluaran Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria sebanyak 175 orang (target 1.589 orang).
41. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sebanyak 9 dokumen (target 36 dokumen).
42. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebanyak 34 orang (target 37 orang).
43. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja keluaran

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya sebanyak 287 orang (target 395 orang).

44. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sebanyak 134 dokumen (target 150 dokumen).
45. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan sebanyak 63 unit (target 88 unit).
46. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1.703 dokumen (target 1.850 dokumen).
47. Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) dengan indikator kinerja keluaran Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebanyak 114 dokumen (target 116 dokumen).

C. Realisasi subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang di rencanakan tahun 2023

- Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja keluaran jumlah masyarakat miskin di luar quota PBI pusat yang mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah Daerah sebanyak 180.924 jiwa (target 90.897 jiwa), sehingga pada akhir Desember tahun 2023 jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan berjumlah 1.089.288 peserta atau 98,7 %, capaian tersebut menempatkan Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten yang meraih predikat *Universal Health Coverage* (UHC) di tahun 2023.

D. Faktor-faktor pendukung dan penghambat tercapainya target kinerja tahun 2023

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja antara lain adanya komitmen bersama yang kuat dari pimpinan sampai penanggung jawab program / kegiatan/ sub kegiatan untuk melaksanakan program/ kegiatan sub kegiatan yang telah disusun sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah disyahkan.

2. Faktor penghambat

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain beberapa kegiatan tidak tersedia Surat Penyediaan Dananya (SPD) karena tidak tersedia anggaran pada kas daerah dan ada beberapa kegiatan yang Surat Penyediaan Dananya keluar sudah mendekati akhir tahun, sehingga tidak dapat dilaksanakan kegiatannya serta terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan dan dan Puskesmas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

E. Implikasi yang ditimbulkan terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah
Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidaktersediaan dana (SPD)/SPD keluar di akhir tahun berimplikasi pada rendahnya/tidak tercapainya target indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan dan rendahnya capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan serta SDGs.

F. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab

- Rencana Anggaran Kas (RAK) sub kegiatan prioritas agar dijadwalkan lebih awal/tidak mendekati di akhir tahun sehingga sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan memberikan hasil yang lebih maksimal.
- Indikator kinerja utama yang capaiannya masih rendah/belum mencapai target agar mendapatkan alokasi anggaran yang memadai/menjadi skala prioritas dalam penyusunan program dan kegiatannya.
- Untuk mengantisipasi ketidaksediaan anggaran, agar disusun skala prioritas untuk sub kegiatan-sub kegiatan yang mendukung pada pencapaian kinerja program/indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3T-C.29.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
 Pencapaian Renstra PD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
 s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		738.437.971.843	-	201.715.079.058	76		196.418.273.659	-	186.226.823.122	-	387.941.902.180	-	53	Dinas Kesehatan
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100			100		100			100		100		100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100			45		100			100		100		100		
	Tersusun dan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100	%	1.001.795.200	100	62.428.000	100	%	150.003.000	100	148.261.100	100	210.689.100	100	21	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dokumen	150.280.000		10.987.100	4	dokumen	16.400.000	4	16.306.300	9	27.293.400	36	18	
			Dokumen perencanaan (perubahan renstra, renja murni, renja perubahan, PPAS murni dan PPAS perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur				5											
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	382.050.000		24.716.900	2	Dokumen	65.900.000	2	65.269.000	3	89.985.900	60	24	
			Dokumen perencanaan (RKA murni) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023				1											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	163.586.000		9.211.500	1	Dokumen	27.265.000	1	27.040.000	2	36.251.500	40	22	
			Dokumen perencanaan (RKA Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022				1											
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	56.487.200		2.000.000	2	Dokumen	9.412.000	2	9.190.000	3	11.190.000	60	20	
			Dokumen perencanaan (DPA murni) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023				1											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp .		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	79.592.000		6.000.000	1	Dokumen	13.266.000	1	12.790.000	2	18.790.000	40	24	
			Dokumen perencanaan (DPA Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun Anggaran 2022				1											
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	55.494.000		5.513.800	2	Laporan	7.247.000	2	7.205.900	4	12.719.700	40	23	
			Laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur (LKPJ dan LPPD) Tahun 2021				2											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	114.306.000		3.998.700	2	Laporan	10.513.000	2	10.459.900	3	14.458.600	60	13	
			Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan				1											
	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100	%	652.632.978.923	100	95.344.934.241	100	%	105.988.355.560	100	99.022.295.586	100	194.367.229.827	100	30	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	60	blan	646.029.319.117		94.587.904.841	1.679	orang/bulan	105.025.326.154	3.133	98.142.036.086	3.133	192.729.940.927	5.222	30	
			Gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas				12											
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	4.143.480.000		441.166.500	12	Dokumen	614.160.000	12	571.214.800	22	1.012.381.300	37	24	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jasa pengelola administrasi perkantoran (honor PA, KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima, Tim tehnis PPK, Operator SIRUP) pada Dinas Kesehatan				10											
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	bulan	1.879.251.806		272.154.700	12	Dokumen	288.869.406	12	283.137.600	22	555.292.300	37	30	
			Jasa pengelolaan administrasi keuangan (PPK, bendahara, staf pengelola keuangan dan Operator SIMDA) pada Dinas Kesehatan				10											
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dokumen	108.316.000	-	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	114.400.000		12.997.300	1	laporan	15.000.000	1	14.688.100	2	27.685.400	40	24	
			Laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan				1											
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20	Laporan	292.000.000		25.495.100	3	laporan	35.000.000	3	2.003.000	7	27.498.100	35	9	
			Laporan hasil review APIP Pelaksanaan DAK Fisik dan Penataan BOK Puskesmas pada Dinas Kesehatan				4											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp .		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	10	Laporan	66.212.000		5.215.800	2	laporan	10.000.000	2	9.216.000	4	14.431.800	40	22	
			Laporan keuangan semesteran Dinas kesehatan				2											
	Tersedianya dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	100	%	1.095.964.000	100	110.325.600	100	%	116.150.000	100	96.147.900	100	206.473.500	100	19	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10	Laporan	414.800.000		17.926.300	4	laporan	15.600.000	1	12.699.800	3	30.626.100	30	7	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan				2											
	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	170	Laporan	205.444.000		12.274.800	34	Laporan	13.050.000	18	11.598.300	32	23.873.100	19	12	
			Jumlah monitoring persediaan Obat, BMHP dan vaksin di Puskesmas				14											
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	74.400.000		4.124.800	2	laporan	15.000.000	2	7.000.000	4	11.124.800	33	15	
			Rekonsiliasi pelaporan Aset dengan Puskesmas				2											
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	401.320.000		75.999.700	1	laporan	72.500.000	1	64.849.800	11	140.849.500	183	35	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jasa penatausahaan barang (pengurus/penyimpan barang) pada Dinas Kesehatan				10											
	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100	%	672.980.000	100	24.863.800	100	%	84.980.000	100	75.260.000	100	100.123.800	100	15	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	Dokumen	80.480.000		12.000.000	12	Dokumen	25.000.000	12	17.880.000	24	29.880.000	400	37	
			Jasa Operator SIGAP pada Dinas Kesehatan				12											
	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.020	Dokumen	592.500.000		12.863.800	170	Dokumen	59.980.000	950	57.380.000	1.140	70.243.800	112	12	
			Penilaian PAK petugas fungsional kesehatan				190											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya administrasi umum pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100	%	2.407.468.000	100	219.823.053	100	%	1.029.356.054	100	686.868.230	100	906.691.283	100	38	Dinas Kesehatan
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	190.000.000		14.009.400	12	Paket	20.000.000	12	19.358.000	24	33.367.400	400	18	
			Suku cadang komponen listrik /penerangan bangunan kantor				12											
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	380.000.000		41.573.500	5	Paket	247.489.354	5	190.593.500	10	232.167.000	167	61	
			Peralatan kerja kantor				5											
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	66.808.000		5.601.600	12	Paket	10.000.000	12	9.994.000	24	15.595.600	400	23	
			Peralatan kebersihan pada kantor Dinas Kesehatan				12											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	169.074.400		12.093.400	12	Paket	29.549.500	12	21.152.400	24	33.245.800	400	20	
			Logistik kantor (BBM Genset, Isi Tabung LPG, bahan pembersih dan bahan minuman) pada Kantor Dinas Kesehatan				12											
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	324.516.000		34.019.000	12	Paket	50.000.000	12	46.795.000	24	80.814.000	200	25	
			Barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan				12											
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	207.360.000		19.900.000	12	Dokumen	25.000.000	12	24.790.000	24	44.690.000	400	22	
			Bahan bacaan koran harian dan mingguan				12											
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	Laporan	160.000.000		4.950.000	12	Laporan	9.000.000	2	2.260.000	5	7.210.000	7	5	
			Makan minum untuk tamu kedinasan				3											

N o	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggu ng Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	552	Lapor an	909.709.600		87.676.153	46	Lapora n	638.317.200	45	371.925.330	80	459.601.483	14	51	
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi program pada Dinas Kesehatan				35											
	Tersedianya sarana prasarana penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	2.575.000.000	-	-	100	%	-							
	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						5	unit	-							
	Tersedianya jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100	%	2.796.785.720	100	480.251.763	100	%	608.810.746	100	552.151.562	100	1.032.403.325	100	37	Dinas Kesehata n
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	Lapor an	1.162.500.000		167.025.363	12	Lapora n	220.000.000	12	189.315.762	24	356.341.125	400	31	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jasa telpon, internet dan listrik pada Kantor Dinas Kesehatan				12											
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan	1.634.285.720		313.226.400	12	Laporan	388.810.746	12	362.835.800	24	676.062.200	400	41	
			Jasa layanan umum kantor (petugas kebersihan kantor, penjaga malam, sopir, honor daerah dan petugas IT) pada kantor Dinas Kesehatan				12											
	Terpeliharanya Aset pada Dinas kesehatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100	%	1.430.000.000	45	108.007.600	100	%	325.000.000	100	209.647.610	100	281.255.210	100	20	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	unit	400.000.000		95.807.600	3	Unit	100.000.000	3	73.559.910	3	169.367.510	43	42	
			Jasa pemeliharaan dan BBM kendaraan dinas operasional kantor Dinas Kesehatan				12											
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	200.000.000	-	-	4	Unit	100.000.000		36.400.000					
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46	unit	280.000.000		12.200.000	78	unit	50.000.000	25	25.233.800	25	37.433.800	54	13	
			Jumlah peralatan kerja pada Dinas Kesehatan yang mendapatkan perbaikan				17											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	550.000.000	-	-	1	unit	75.000.000	1	74.453.900	1	74.453.900	17	14	
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	35	Unit Kerja	76.400.000.000	34	105.364.445.001	34	puskesmas	88.115.618.299	34	85.436.191.134	34	190.800.636.135	97	250	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit				1		1	RS		1						
	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35	Unit Kerja	76.400.000.000		105.364.445.001	35	Unit Kerja	88.115.618.299	35	85.436.191.134	35	190.800.636.135	100	250	
			Operasional pelayanan dan penunjang pelayanan puskesmas BLUD di Puskesmas				12											

N o	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggu ng Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100		517.422.979.133	83	84.220.739.313	100	%	99.445.390.612	85	72.275.151.701	85	155.757.325.314	85	30	Dinas Kesehata n
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100			87		95	%		84		84		84		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100			86		93	%		93		93		93		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100			90		98	%		92		92		92		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88			80		77	%		81		81		92		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69			96		65	%		96		96		140		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50			83		20	%		41		41		83		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80			78		73	%		83		83		103		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25			67		15	%		30		30		121		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75			80		55	%		75		75		100		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90			75		82	%		95		95		106		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100			71		98	%		82		82		82		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66			70		62	%		70		70		106		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96			86		92	%		93		93		97		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89			84		85	%		74		74		84		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94			71		90	%		31		31		33		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100			25		100	%		91		91		91		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100	%	153.468.930.004	100	28.344.039.641	100	%	12.672.018.597	100	11.313.740.164	100	39.657.779.805	100	26	Dinas Kesehatan
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5	Unit	22.151.170.642		190.570.642			-	-	-	1	190.570.642	20	1	
			Jumlah bangunan puskesmas yang dibayarkan retensinya				1											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7	Unit	1.662.400.000		313.215.438	2	Unit	599.888.130	2	565.456.443	3	878.671.881	43	53	
			Jumlah gedung pustu yang dibangun				1											
	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	Unit	1.997.819.574		18.039.574				-	-	1	18.039.574	20	1	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibayarkan retensinya				1											
	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5	Unit	17.558.500.000		3.277.297.951	1	Unit	166.088.000	1	162.632.524	2	3.439.930.475	40	20	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah gedung/bangunan Pediatric ICU (PICU) Rumah Sakit yang dibangun				1											
	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	13.683.246.501		5.569.755.117	6	Unit	4.011.929.561	6	3.770.016.924	10	9.339.772.041	100	68	
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan perluasan bangunan PONED				4											
			Jumlah bangunan perluasan puskesmas yang mendapatkan retensi				1					-						
	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1	Unit	3.150.000.000		2.702.024.388	1	unit	141.030.000	1	141.029.894	2	2.843.054.282	200	90	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah gedung labkesda yang direlokasi/diperluas sesuai standar BSL2				1											
	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	Unit	4.436.425.000		35.600.000			-	-	-	1	35.600.000	20	1	
			Jumlah bangunan puskesmas yang direhabilitasi mendapatkan retensi				1											
	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	18	Unit	3.369.555.113		29.262.500	18	Unit	3.606.287.853	18	3.444.887.330	21	3.474.149.830	117	103	
			Jumlah gedung pustu yang direhabilitasi mendapatkan retensi				3											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Tersedianya Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	500	Unit	14.363.617.440		1.617.661.018	4	Unit	188.014.000	4	176.172.000	108	1.793.833.018	22	12	
			Jumlah sarana puskesmas (ambulance, pusling roda 2, Sistem Informasi PSC dan Sistem Informasi (Telekonsultasi) di puskesmas				104											
	Tersedianya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	Unit	1.526.576.232		204.360.917	1	Unit	13.111.800	1	13.111.800	2	217.472.717	20	14	
			Sarana air bersih (sumur bor) di Puskesmas yang dibangun				1					-						
			Jumlah Sarana air bersih (sumur bor) di Puskesmas yang mendapatkan retensi				3											
	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	129	Unit	33.970.324.036		10.480.144.671			-	-	-	314	10.480.144.671	243	31	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Alat kesehatan untuk puskesmas, Rumah Sakit dan Labkesda				314											
	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	156	Unit	600.000.000	-	-				-	-	-	-	-	-	
	Tersedianya Obat dan Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	13	Paket	19.445.993.526		2.650.491.560	1	paket	2.731.263.638	1	2.514.975.050	2	5.165.466.610	15	27	
			Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya				1					-						
			Operasional pengambilan obat dan vaksin ke propinsi				29											
	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	9	Paket	13.943.537.940		966.816.614	3	paket	925.836.415	2	255.689.000	4	1.222.505.614	44	9	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya				2											
	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	58	Unit	550.256.000		94.045.250	10	Unit	118.000.000	10	99.200.000	36	193.245.250	62	35	
			Jumlah monitoring pengelolaan sarana prasarana dan ASPAK di puskesmas				26					-						
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan				7											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	24	Paket	1.059.508.000		194.754.000	4	Paket	170.569.200	4	170.569.200	9	365.323.200	38	34	
			Operasional distribusi obat ke 34 puskesmas				5											
	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Lampung Timur	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100	%	358.079.442.359	90	55.758.811.372	100	%	86.625.882.530	75	60.839.763.037	75	115.860.008.709	75	32	Dinas Kesehatan
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.422	orang	4.539.860.400	16.027	887.722.350	17.602	orang	2.868.929.794	14.702	2.492.276.854	14.702	3.379.999.204	80	74	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17.584	orang	6.906.238.800	15.076	122.242.200	15.906	orang	1.117.059.200	14.827	744.097.000	14.827	866.339.200	84	13	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16.747	orang	1.164.312.800	15.013	150.974.300	15.892	orang	657.038.700	14.638	370.564.200	14.638	521.538.500	87	45	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	65.834	orang	5.903.358.800	52.138	962.773.200	61.476	orang	1.379.839.214	49.632	1.090.970.801	49.632	2.053.744.001	75	35	
			Jumlah timbangan bayi untuk Posyandu (Pokir)				5					-						
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	155.494	orang	7.474.586.600	#### ##	1.244.670.900	161.580	orang	1.808.723.423	155.630	1.658.304.000	155.630	2.902.974.900	100	39	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	675.836	orang	11.024.357.600	#### ##	2.088.147.200	681.706	orang	6.024.400.151	281.347	5.652.152.619	281.347	7.740.299.819	42	70	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	131.552	orang	4.703.198.200	#### ##	704.251.300	151.668	orang	1.815.727.740	125.124	1.718.988.080	125.124	2.423.239.380	95	52	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah kasus Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	267.245	orang	1.427.180.000	#### ##	274.436.000	273.143	orang	269.930.000	82.949	264.154.900	82.949	538.590.900	31	38	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15	
			Hibah bansos pada Yayasan Jantung Indonesia				1					-						
			Jumlah Posbindu Kit untuk Posbindu di desa (Pokir) (tersebar 12 desa di Kec. Purbolinggo)				12					-						
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah kasus Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	68.628	orang	243.840.000	10.418	24.275.000	13.403	orang	1.134.670.400	10.092	1.037.612.800	10.092	1.061.887.800	15	435	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1.804	orang	891.591.000	1.043	123.210.500	1.879	orang	793.033.109	1.787	412.537.600	1.787	535.748.100	99	60	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	21.226	orang	7.231.119.600	9.170	1.279.822.600	17.679	orang	918.404.200	13.660	814.643.400	13.660	2.094.466.000	64	29	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan screening HIV/AIDS	24.466	orang	4.138.520.400	15.793	687.247.685	20.954	orang	1.086.211.500	14.677	774.653.200	14.677	1.461.900.885	60	35	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6	doku men	11.730.000 .000	-	-				-	-	-	-	-	-	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6	doku men	5.036.000. 000	-	-	1	Dokum en	9.600.000	-	-	-	-	-	-	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142	doku men	7.874.262. 200		1.203.667. 900	612	Dokum en	2.037.650.100	467	747.813.602	468	1.951.481.50 2	330	25	
			Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan dalam program penurunan stunting				1					-						
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan program pelayanan gizi masyarakat				34											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142	dokumen	2.347.493.600		355.888.600	799	Dokumen	705.314.770	726	558.848.300	760	914.736.900	535	39	
			Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan olah raga				34											
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142	dokumen	8.149.962.200		1.155.350.600	3.636	Dokumen	2.276.868.031	3.355	1.890.919.600	3.389	3.046.270.200	2.387	37	
			Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan lingkungan				34											
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142	dokumen	6.868.847.550	-	-	146	Dokumen	27.550.000	121	22.900.000	121	22.900.000	85	0	
	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6	dokumen	405.040.000		18.819.900	26	Dokumen	67.520.000	24	39.798.800	32	58.618.700	533	14	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional				8											
	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	142	dokumen	24.555.466.250		2.714.923.550	2.915	Dokumen	740.677.100	1.922	476.488.000	1.934	3.191.411.550	1.362	13	
			Operasional pengelolaan surveillance kesehatan di tingkat kabupaten dan puskesmas				12											
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						3.400	orang	190.444.448	1.351	175.971.200	1.351	175.971.200	-	-	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	141	orang	3.496.978.200		457.489.800	22	orang	51.007.400	20	43.507.000	54	500.996.800	38	14	
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA				34											

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	6	dokumen	2.071.000.000		128.650.000	27	Dokumen	203.765.119	26	159.696.900	38	288.346.900	633	14	
			Operasional Pelayanan Kesehatan pada situasi khusus (pelayanan kesehatan pada hari-hari besar, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pelayanan Kesehatan pada saat pemberangkatan/pemulangan haji) dan operasional PSC 119 di wilayah Kabupaten Lampung Timur				12											
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142	dokumen	28.937.708.750		4.811.798.000	8.932	Dokumen	3.407.922.248	5.798	2.092.976.100	5.998	6.904.774.100	4.224	24	
			Jumlah fokus/titik kasus positif DBD yang mendapatkan pelayanan penyemprotan/fogging DBD				200					-						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah monitoring/bimtek terpadu POPM Kecacingan ke puskesmas				34					-						
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (intervensi lanjutan PIS_PK)				34											
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	dokumen	109.588.146.320		26.463.245.909	21	Dokumen	46.893.577.808	20	29.879.037.148	20	56.342.283.057	333	51	
			Jumlah masyarakat miskin di luar quota PBI pusat yang mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah Daerah				32.441					-						
			Jumlah peserta BPJS mandiri kelas 3 yang mendapatkan bantuan iur dari Pemda				46.438					-						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15	
			Hutang Pelayanan Kesehatan Gratis untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan di RSUD Sukadana Tahun 2020				1					-						
			Premi PBI Daerah (hutang tahun 2021)				1											
	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						3.400	orang	37.260.000	130	28.130.000	130	28.130.000	-	-	
	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600	Paket	301.985.600		43.810.000	1.272	paket	211.570.000	521	87.395.000	555	131.205.000	93	43	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Operasional pengambilan dan pengiriman sampel kasus yang berpotensi KLB/Covid-19				34											
	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16	unit	548.037.400	-	-				-	-	-	-	-	-	
	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Honor Tenaga BLUD Rumah Sakit Umum Sukadana	6	dokumen	16.474.772.380	12	5.055.850.000	1	Dokumen	15.228.000	-	-	12	5.055.850.000	200	31	
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN di RSUD Sukadana				4					-						
	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	142	dokumen	52.844.621.614		2.953.449.270	965	Dokumen	7.226.127.130	865	5.536.657.873	871	8.490.107.143	613	16	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Dukungan manajemen pengelolaan BOK Puskesmas				6					-						
			Insentif UKM untuk petugas UKM Puskesmas				6					-						
			Operasional manajemen puskesmas (BOK Puskesmas)				34					-						
			Operasional puskesmas baru (2 puskesmas baru)				10											
	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	doku men	7.672.381.195		961.927.308	34	Dokum en	1.117.600.400	23	692.910.960	82	1.654.838.268	1.367	22	
			Jumlah parameter yang diperiksa dalam 1 tahun				59					-						
			Hibah operasional PMI Cabang Lampung Timur				1											
	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34	unit	4.367.588.300	-	-	-	Unit	-	14	-	14	-	41	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	142	laporan	1.792.589.000		264.421.000	382	laporan	47.800.000	187	26.825.000	221	291.246.000	156	16	
			Operasional pelacakan/penyelidikan epidemiologi kasus KIPi				34											
	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	142	laporan	2.868.397.600		480.672.800	442	Dokumen	145.863.000	222	110.416.400	246	591.089.200	173	21	
			Penyelidikan epidemiologi pada kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah				24											
	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265.355	keluarga	4.500.000.000	####	139.073.500	2.895	Keluarga	511.250.545	195.004	499.950.000	195.004	639.023.500	73	14	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						1.754	orang	327.350.000	1.048	273.025.000	1.048	273.025.000	-	-	
	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						51	orang	8.850.000	10	8.850.000	10	8.850.000	-	-	
	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria						1.589	Orang	171.880.000	175	148.384.900	175	148.384.900	-	-	
	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok						2	tatanan	319.239.000	2	308.305.800	2	308.305.800	-	-	
	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100	%	1.028.681.070	100	59.436.700	100	%	81.938.285	100	74.820.000	100	134.256.700	100	13	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6	Dokumen	213.724.500		20.906.200	1	Dokumen	30.000.000	1	29.065.000	2	49.971.200	33	23	

N o	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggu ng Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah Buku Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten				1											
	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6	Dokumen	814.956.570		38.530.500	2	Dokumen	51.938.285	2	45.755.000	36	84.285.500	600	10	
			Jumlah puskesmas yang melakukan implementasi Sistem Informasi Puskesmas sesuai PMK No 31 Tahun 2019				34											
	Meningkatnya perizinan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung timur	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100	%	4.845.925.700	100	58.451.600	100	%	65.551.200	100	46.828.500	100	105.280.100	100	2	Dinas Kesehata n
	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	Unit	4.845.925.700		58.451.600	39	Unit	65.551.200	39	46.828.500	39	105.280.100	100	2	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan pasca akreditasi dan penguatan mutu manajemen Puskesmas				34					-						
			Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan persiapan akreditasi				5											
	Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100	%	33.542.046.200	62	2.018.086.100	100	%	3.722.902.000	90	2.989.655.800	90	5.007.741.900	90	15	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59	%		15		46	%		32		32		55		
	Meningkatnya perizinan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100	%	192.000.000	62	5.449.800	100	%	32.000.000	72	6.999.800	72	12.449.600	72	6	Dinas Kesehatan

N o	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	Dokumen	192.000.000		5.449.800	36	Dokumen	32.000.000	9	6.999.800	16	12.449.600	267	6	
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan visitasi perizinan				7											
	Tersedianya profil kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100	%	31.972.052.000	33	1.821.934.800	100	%	1.673.500.000	92	1.420.510.000	92	3.242.444.800	92	10	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen	390.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	968	orang	31.582.052.000		1.821.934.800	37	Orang	1.673.500.000	34	1.420.510.000	46	3.242.444.800	5	10	
			Jumlah tenaga dokter kontrak di puskesmas (36 dokter)				12					-						
			Jumlah tenaga kontrak di puskesmas (25 tenaga kesehatan kontrak)				12											
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75	%	1.377.994.200	75	190.701.500	75	%	2.017.402.000	73	1.562.146.000	73	1.752.847.500	97	127	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	520	orang	1.377.994.200		190.701.500	395	Orang	2.017.402.000	287	1.562.146.000	357	1.752.847.500	69	127	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah petugas pengelola PSC 119 yang mendapatkan peningkatan kompetensi tentang Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan				70					-						
			Jumlah petugas puskesmas yang mendapatkan bimbingan tehnis tentang program PIN MR				34											
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan makanan minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	98	%	1.599.540.000	51	168.105.400	90	%	463.146.000	38	431.857.800	38	599.963.200	39	38	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100	%		100		60	%		100		100		100		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp .	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	60	%		-		40	%		-		-		-		
	Meningkatnya perizinan sarana kefarmasian di wilayah Kabupaten Lampung Timur	Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100	%	126.000.000	100	-	100	%	63.730.000	100	63.730.000	100	63.730.000	100	51	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	dokumen	126.000.000	-	-	30	dokumen	63.730.000	30	63.730.000	30	63.730.000	500	51	

N o	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Meningkatnya perizinan produk makanan minuman pada Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat diProduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	70	%	834.236.000	40	81.769.900	55	%	240.450.000	45	226.347.500	45	308.117.400	65	37	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6	Dokumen	834.236.000		81.769.900	150	Dokumen	240.450.000	134	226.347.500	239	308.117.400	3.983	37	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pemilik IRTP, Pemeriksaan Sarana Produksi pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				105											
	Meningkatnya monitoring dan pemeriksaan pos market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100	%	639.304.000	81	86.335.500	100	%	158.966.000	92	141.780.300	92	228.115.800	92	36	Dinas Kesehatan
	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.140	Unit	639.304.000		86.335.500	88	Unit	158.966.000	63	141.780.300	103	228.115.800	9	36	

N o	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K		K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan post market dalam pengelolaan industri pangan rumah tangga				40					-						
			Jumlah sampel produk pangan IRTP yang memenuhi ketentuan				26											
	Meningkatnya kemandirian dan budaya hidup sehat masyarakat.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55	%	24.600.783.850	60	4.720.767.692	40	%	5.553.060.169	62	4.434.205.762	62	9.154.973.454	112	37	Dinas Kesehata n
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	55	%	18.582.007.550	100	3.995.155.792	40	%	5.054.971.399	100	3.993.746.571	100	7.988.902.363	182	43	Dinas Kesehata n

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	Dokumen	18.582.007.550		3.995.155.792	35	dokumen	5.054.971.399	1.703	3.993.746.571	1.727	7.988.902.363	28.783	43	
			Advokasi/sosialisasi PIN MR di tingkat kecamatan				24					-		24				
			n Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) di tatanan mendukung kluster fisik dan deteksi dini penyakit di tingkat Kabupaten dan kecamatan				24					-		150				
			Jumlah kader yang mendapatkan bimtek tentang kemandirian pangan dalam rangka menuju Desa Pangan Aman				150					-		200				
			Jumlah masyarakat yang menerima KIE tentang keamanan obat dan makanan				200					-		24				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Orientasi kader dan kampanye pencegahan stunting				24					-		1				
			Peran SAKA Tingkat Nasional				1											
	Meningkatnya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100	%	665.000.000	31	500.000	100	%	124.696.400	100	119.948.500	131	120.448.500	131	18	Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	Dokumen	665.000.000		500.000	2	dokumen	124.696.400	53	119.948.500	57	120.448.500	950	18	
			Cetak Spanduk PHBS				4											
	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85	%	5.353.776.300	100	725.111.900	70	%	373.392.370	100	320.510.691	100	1.045.622.591	118	20	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	142	Dokumen	5.353.776.300		725.111.900	14	dokumen	373.392.370	114	320.510.691	378	1.045.622.591	266	20	
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan UKBM				264											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											305.602.772.440		266.357.694.185		558.461.906.048			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mencapai target pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Renstra dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Untuk mengukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan metode penghitungan berdasarkan capaian kinerja terhadap target per masing-masing sasaran dengan cara kuantitatif.

A. Capaian SDGs Sektor Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tujuan pembangunan global yang baru menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Agenda pembangunan global tersebut berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Semua masalah kesehatan dalam SDGs diintegrasikan ke dalam satu tujuan, yaitu tujuan nomor 3 yaitu kesehatan yang baik. Hal ini untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan mereka untuk semua orang dari segala usia. Inti dari semua tujuan ini adalah gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih.

Tantangan utama dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, proses, output, outcome dan impact pembangunan serta memahami bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan SDGs di bidang kesehatan adalah memastikan kehidupan yang sehat, mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, memperkuat perlindungan sosial, dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ketiga adalah untuk mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya; mengurangi 1/3 kematian prematur akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan perawatan, serta mendorong kesehatan dan kesejahteraan mental; memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang membahayakan; mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas; menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi; Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan

risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang; mengurangi secara substansial kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah. Dalam mendukung capaian SDGs Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 memiliki capaian sebagai berikut;

Tabel 2.2.1
Capaian SDGs Sektor Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023



Matrik Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua , termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan					
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	98,7	98,65



Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun					
2.1.1(a)	Prevalensi Balita Kurang Gizi (<i>Underweight</i>)	Dinas Kesehatan	Persen	13	3,6



Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	100.000 Kelahiran Hidup	108	101
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	Persen	100	93,22
3.1.2 (b)	Proporsi perempuan pernah	Dinas Kesehatan	Persen	100	93,22

Kode Indikator	Target/ Indikator	Sumber Data	Satuan	Target (2023)	Realisasi (2023)
	kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan				
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000					
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Dinas Kesehatan	1000 Kelahiran Hidup	n/a	5,6
3.2.2. (a)	Angka Kematian Balita (AKBa)	Dinas Kesehatan	1000 Kelahiran Hidup	n/a	6,47
3.2.1. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan	1000 Kelahiran Hidup	5,4	6.20
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya					
3.3.1. (a)	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi	Dinas Kesehatan	Persen	0,19	0,02
3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	100.000 penduduk	231	98,29
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan					
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan	Persen	9,6	10,4
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq$ 18 tahun	Dinas Kesehatan	Persen	n/a	n/a
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang					
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Persen	98,7	98,65

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan 12 jenis pelayanan kesehatan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Capaian indikator kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	17,602	14,702	83.52	12068	10424	90,69	84,96	Tuntas Madya
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	15,906	14,827	93.22	8169	7729	97,24	94,02	Tuntas Utama
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	15,892	14,638	92.11	9326	8601	94,74	92,64	Tuntas Utama
4	Pelayanan kesehatan balita	61,476	49632	80.73	17471	13387	64,11	77,41	Tuntas Pratama
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	161,580	155,630	96.32	42740	15775	83,03	93,66	Tuntas Utama
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	681,706	281,347	41.27	121283	50446	55,19	44,05	Belum tuntas
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	151,668	125,124	82.50	52104	29353	85	83	Tuntas Madya
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	273,143	82,949	30.37	56879	17635	70,23	38,34	Belum tuntas
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	13,403	10,092	75.30	4608	3498	79,27	76,09	Tuntas Pratama
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1,879	1,787	95.10	298	284	99,30	95,94	Tuntas Utama
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	17,679	13,660	77.27	4380	2985	67,21	75,26	Tuntas Pratama
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	20,954	14,677	70.04	6322	4437	81,72	72,24	Tuntas Pratama

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Dalam pelaksanaan SPM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur telah melalui beberapa tahapan SPM yakni dimulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dan masalah baik dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana sampai dengan pemenuhan layanan, sehingga kategori indeks pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 masih **Tuntas Pratama** dengan total pencapaian sebesar 77,30 persen. Pencapaian dengan kategori ini adalah pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar yang nilainya 70-79 persen.

Dari 12 indikator yang ada, belum ada satupun indikator yang capaiannya 100 %,

sebanyak 4 indikator capaiannya diatas 90 % yaitu pelayanan kesehatan Ibu Bersalin, pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir, pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat. Kemudian 3 indikator capainnya 80 – 90 % yaitu pelayanan kesehatan Ibu Hamil, pelayanan kesehatan balita dan pelayanan kesehatan Usia Lanjut, 3 indikator capainnya antara 70 % - 80 % yaitu Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) dan 2 indikator capaiannya masih sangat rendah yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 41,27 % dan penderita hipertensi sebesar 30,37 %. Adapun perkembangan capaian Standar Pelayanan Minimal per indikator adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

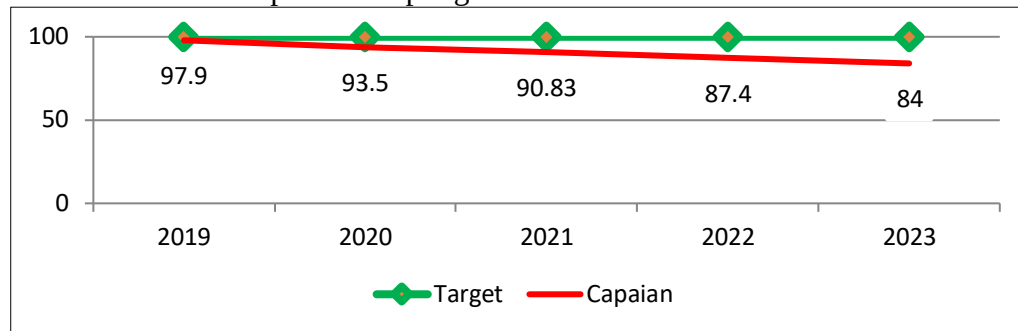
Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu : a) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan; b) Ukur tekanan darah; c) Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA) d) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan; g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan; h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan. i) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan; j) Temu wicara (konseling).

Berdasarkan laporan capaian persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan dasar pada tahun 2023 berjumlah 14.702 ibu hamil dari target sasaran 17.602 ibu hamil sehingga capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar mencapai 84%, belum mencapai target 100% dan turun bila dibanding capaian tahun 2022 (87.4%).

Perkembangan persentase ibu hamil mendapat pelayanan sesuai standar sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2.1
Trend Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 - 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Belum tercapainya pelayanan ibu hamil sesuai standar disebabkan diantaranya oleh:

- a) Sasaran ibu hamil menggunakan data proyeksi penduduk karena data riil ibu hamil belum tersedia. Hal ini disebabkan karena data sasaran riil ibu hamil merupakan data yang dinamis yang setiap bulan berubah sarannya. Pemakaian data sasaran hasil proyeksi penduduk memungkinkan terjadinya kesenjangan di populasi.
- b) Masih tingginya kunjungan K1 akses, dimana ibu hamil melakukan kunjungan pertama pada usia lebih dari triwulan pertama, sedangkan standar pelayanan ibu hamil mensyaratkan kunjungan pertama di triwulan pertama kehamilannya. Pada tahun 2023 terdapat 1.858 K1 akses, yang mengakibatkan pelayanan ibu hamil tidak memenuhi standar pelayanan dasar untuk ibu hamil. K1 akses sebagian besar diakibatkan karena kasus kehamilan remaja dan kasus kehamilan yang tidak diinginkan.
- c) Masih tingginya kasus keguguran, sehingga kehamilan tercatat di awal kehamilan sebagai sasaran namun kehamilan tidak berlanjut, dimana pada tahun 2023 dilaporkan terdapat 428 kasus keguguran.
- d) Masih terdapat pelayanan kesehatan ibu hamil yang tidak memenuhi standar 10 T
- e) Belum tercukupinya sarana prasarana dan BHP seperti alat deteksi resiko ibu hamil seperti pemeriksaan protein urine, Hb dan golongan darah.
- f) Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia kesehatan sesuai standar
- g) System pencatatan dan pelaporan pelayanan ibu hamil belum optimal terutama dari fasilitas kesehatan swasta dan praktek mandiri.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

- a) Melakukan identifikasi sasaran dengan mengoptimalkan peran Puskesmas.
- b) *Sweeping* ibu hamil yang dilakukan oleh Puskesmas dan Bidan Desa bekerjasama dengan kader.
- c) Promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil sesuai standar.
- d) Costing kebutuhan pemenuhan SPM ibu hamil dan mengusulkan kebutuhan pada anggaran BLUD, APBD dan DAK.

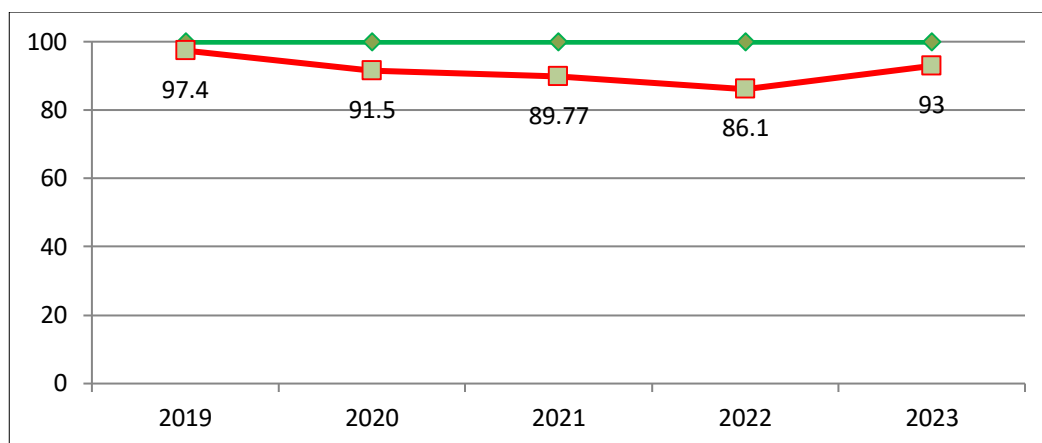
- e) Mengaktifkan jejaring laporan pemeriksaan ibu hamil dengan swasta dan praktek mandiri.
- f) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui sosialisasi, OJT, karya dan pelatihan diantaranya melalui pertemuan ANC terintegrasi dengan lintas sektor dan lintas profesi.
- g) Melakukan Survey fasilitatif di FKTP di Kabupaten Lampung Timur
- h) Monitoring dan bimbingan kepada Puskesmas dan jaringannya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara berkala.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar adalah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi, di fasilitas kesehatan serta sesuai dengan asuhan persalinan normal dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

Berdasarkan laporan, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Lampung Timur yang telah mendapatkan pelayanan dasar berjumlah 14.827 ibu bersalin dari jumlah sasaran 15.906 ibu sehingga capaian SPM pelayanan ibu bersalin sesuai standar sebesar 93%. Capaian tersebut belum mencapai target 100% namun meningkat bila di banding capaian tahun 2022 yakni 86,1 %. Perkembangan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar sebagai berikut:

Grafik 2.2.2
Trend Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja di atas antara lain:

- a) Sasaran ibu bersalin menggunakan data proyeksi penduduk karena data riil ibu bersalin belum tersedia. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadi kesenjangan antara jumlah sasaran dengan jumlah riil bersalin di populasi.

- b) Keterbatasan anggaran dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar baik dalam penyediaan sarana prasarana, BMHP maupun anggaran untuk operasional kegiatan upaya pemenuhan layanan.
- c) Belum terpenuhinya mutu pelayanan sesuai standar.
- d) System pencatatan dan pelaporan ibu bersalin belum berjalan baik menyebabkan *under reporting* persalinan yang mendapat pelayanan, terutama pelaporan dari praktek mandiri, klinik dan Rumah Sakit. Selain itu beberapa kasus persalinan di lintas batas wilayah tidak dilaporkan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:

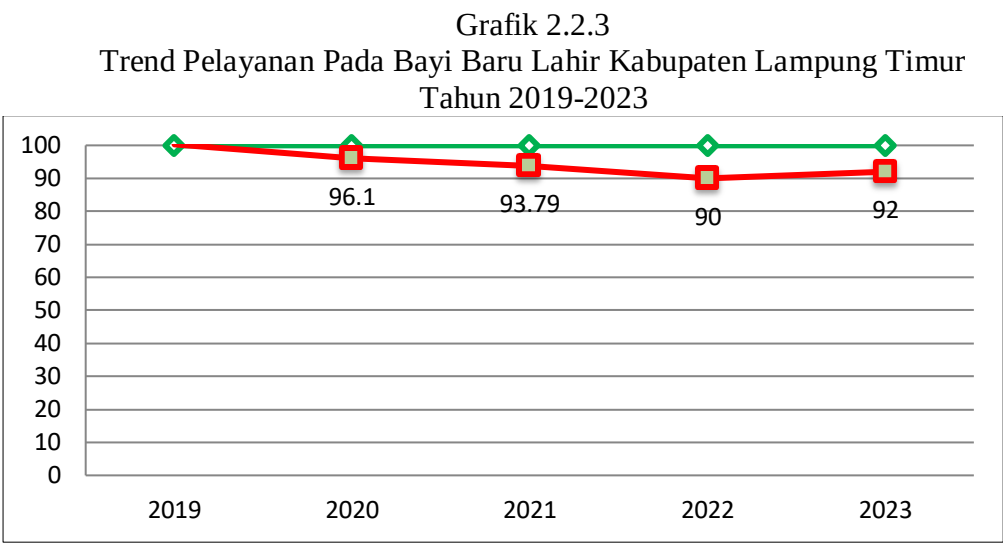
- a) Identifikasi sasaran ibu hamil/ bersalin dengan meningkatkan peran Bidan Desa
- b) Costing kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan memasukkan dalam perencanaan penganggaran
- c) Peningkatan kapasitas penolong persalinan dengan OJT kegawatdarutan maternal/ neonatal bagi Dokter, Bidan dan Perawat Puskesmas
- d) Supervise fasilitatif pada di FKTP baik Puskesmas, Poskesdes, maupun praktek mandiri.
- e) Bekerjasama dengan Bidan Praktek Mandiri dan Rumah Sakit untuk meningkatkan akses pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan melalui program jampersal.
- f) Peningkatan pemberdayaan ibu dan keluarga melalui penguatan Kelas Ibu, Posyandu dan P4K.
- g) Penguatan system pelaporan ditingkat Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri.
- h) Pembiayaan rujukan ibu bersalin bagi ibu bersalin yang tidak mampu.
- i) Pengadaan BMHP untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan dasar ibu bersalin.
- j) Monitoring dan evaluasi ke petugas penolong persalinan secara berkala.

3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pelayanan tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.

Berdasarkan data, bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 berjumlah 14.638 dari target 15.892 bayi baru lahir atau sebesar

92%. Capaian tersebut belum mencapai target 100% namun meningkat bila di banding capaian tahun 2022 (90%). Adapun perkembangan layanan bayi baru lahir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja di atas, dikarenakan:

- a) Penentuan sasaran menggunakan data proyeksi penduduk, bukan data riil.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana, dan BMHP pendukung untuk mencapai target layanan sesuai standar
- c) Belum semua pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan rujukan dilaporkan.
- d) Belum semua tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah dilatih sesuai standar pelayanan.

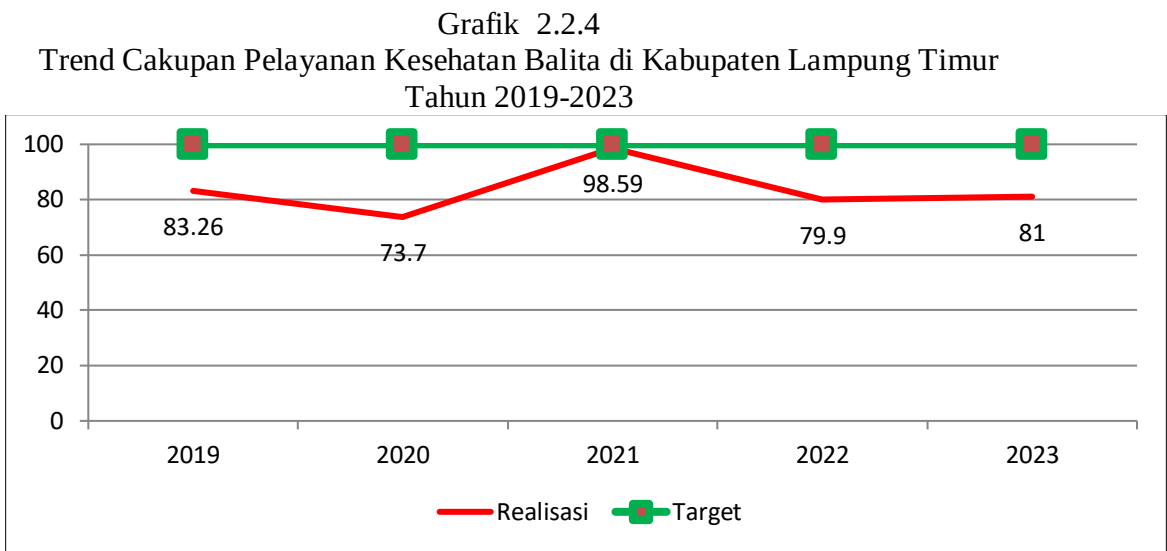
Beberapa hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- a) Identifikasi sasaran dengan meningkatkan peran Bidan Desa dan kader kesehatan.
- b) Peningkatan *sweeping* kunjungan ibu pasca salin dan neonatal yang pulang dari rujukan rumah sakit.
- c) Costing kebutuhan pemenuhan standar pelayanan dan memasukkan ke dalam perencanaan anggaran.
- d) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan antara lain peningkatan pelayanan kegawat daruratan maternal neonatal bagi Dokter Puskesmas, pelatihan update pelayanan KIA dan fasilitator MTBS/ MTBM.
- e) Supervise fasilitatif pada Puskesmas, Poskesdes dan Bidan Praktek Mandiri
- f) Penguatan system monitoring dan evaluasi ke Puskesmas, Bidan Desa dan Bidan Praktek Mandiri dalam kegiatan bimbingan teknis
- g) Penguatan system pencatatan dan pelaporan dengan Bidan Praktik Mandiri dan Klinik Swasta.

4) Pelayanan kesehatan balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan tersebut, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Berdasarkan laporan, jumlah balita penerima layanan standar berjumlah 49.632 dari target 61.476 balita, sehingga capaian SPM pelayanan kesehatan balita sesuai standar mencapai 81%, meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 (79.9) namun belum mencapai target 100 %. Adapun perkembangan layanan kesehatan balita dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain di sebabkan karena:

- a) Target sasaran menggunakan data proyeksi bukan data riil
- b) Keterbatasan sarana prasarana yang sesuai standar pemenuhan layanan seperti DDTK kit dan form MTBS belum sesuai sasaran.
- c) Belum semua pemberi layanan telah memenuhi standar pelatihan sesuai standar layanan.
- d) Cakupan pelayanan DDTK dan pelayanan Kesehatan lainnya seperti MTBS dan pengukuran BB dan TB pada anak balita sebagai standar pelayanan kesehatan anak balita masih sangat rendah yang disebabkan karena sebagian besar balita yang sudah memasuki usia PAUD sudah tidak lagi berkunjung ke Posyandu, sehingga tidak mendapatkan layanan tersebut di Posyandu.
- e) Praktek mandiri dan klinik swasta yang melayani pemeriksaan bayi balita belum melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan MTBS.

- f) Tidak semua balita berkunjung secara rutin ke Posyandu dan ada beberapa balita yang berkunjung ke Posyandu di luar wilayah.
- g) Pencatatan dan pelaporan belum sesuai dengan definisi operasional SPM pelayanan kesehatan balita, sehingga masih ada pelayanan yang belum dilaporkan.
- h) Sebagian besar pelayanan kesehatan balita di praktek mandiri dan swasta tidak dilaporkan.
- i) Adanya edaran dari Kementerian Kesehatan tentang penundaan pemberian vitamin A di bulan Agustus 2023 terkait pelaksanaan Survey Kesehatan Indonesia.
- j) Capaian Imunisasi Dasar Lengkap belum mencapai 100%.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

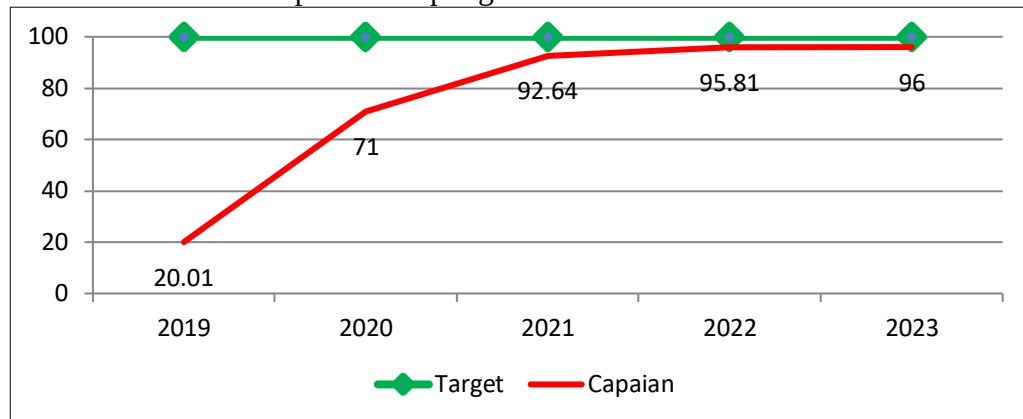
- a) Penguatan pelayanan di Posyandu
- b) Penguatan pelaksanaan surveillens gizi dan pelaksanaan E-PPBGM
- c) *Sweeping* penimbangan balita yang tidak hadir di Posyandu.
- d) Penguatan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas
- e) Costing pemenuhan kebutuhan dan penguatan perencanaan anggaran
- f) Peningkatan kemampuan petugas dengan melakukan kalakarya fasilitator MTBM/MTBS untuk Puskesmas dan jejaringnya.
- g) Workshop untuk guru TK dan PAUD di 24 Kecamatan untuk meningkatkan penjangkaran kesehatan balita/ anak pra sekolah.
- h) Pengadaan alat DDTK sebanyak 815 kit untuk Posyandu.
- i) Koordinasi dan integrasi dengan lintas program terutama program imunisasi untuk pencapaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah satu indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimall satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah. Skrining yang dilakukan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera.

Capaian penerima layanan dasar anak usia pendidikan dasar pada tahun 2022 mencapai 155.630 dari target 161.580 anak. Capaian SPM pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar mencapai 96% atau dalam katagori nilai kinerja **sangat tinggi**. Capaian indikator di atas belum mencapai target 100%, namun meningkat bila di banding capaian tahun 2022 yakni 95.8%. Adapun perkembangan capaian layanan kesehatan usia pendidikan dasar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut

Grafik 2.2.5
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target SPM di atas, antara lain:

- Sasaran menggunakan data proyeksi dan bukan data riil.
- Keterbatasan tenaga kesehatan dalam pemenuhan standar pelayanan kesehatan
- Keterbatasan sarana prasarana penunjang seperti UKS Kit, buku raport kesehatan dan juknis penjangkaran.
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar baru dilakukan di sekolah.
- Belum terlibatnya sektor terkait maupun swasta dalam upaya pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar.

Upaya yang dilakukan agar anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan sesuai standar antara lain:

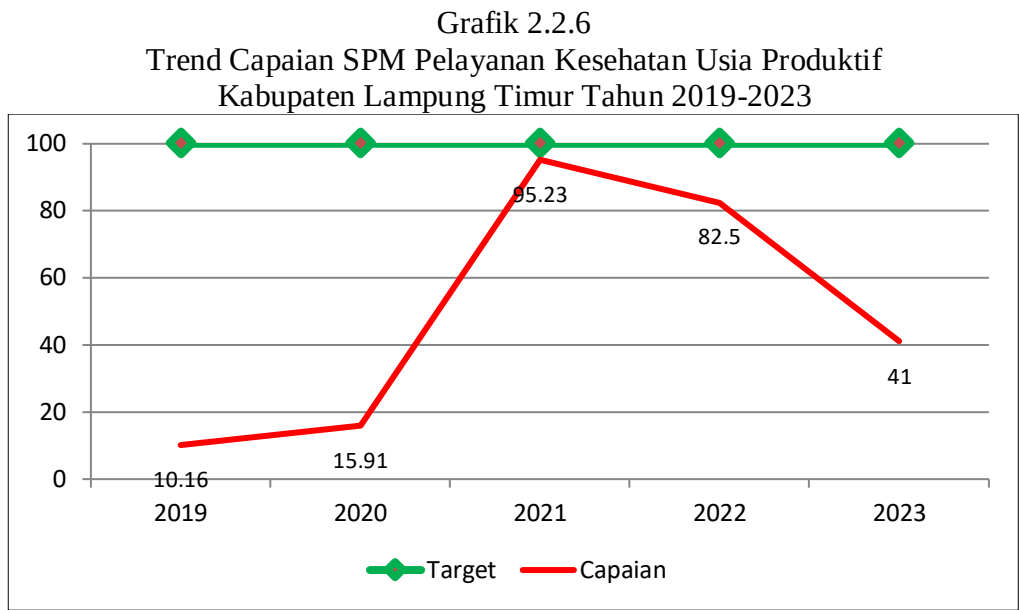
- Melakukan identifikasi sasaran dengan melakukan penjangkaran kesehatan ke sekolah untuk mendapatkan data riil usia pendidikan dasar.
- Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan dengan bekerjasama dengan fihak sekolah
- Costing pemenuhan kebutuhan pemenuhan layanan dan merencanakan anggaran.
- Penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala ke Puskesmas
- Penguatan koordinasi ke lintas sektoral terutama Dinas Pendidikan dan sekolah

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun merupakan pelayanan wajib yang harus dilakukan karena bagian dari indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan pada usia produktif tersebut mensyaratkan pelayanan sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular minimal 1 kali dalam setahun terdiri dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran

tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku beresiko.

Berdasarkan laporan capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2023 sebesar 41%, belum mencapai target 100% dan turun bila dibanding capaian tahun 2022 (82.5%), dengan rincian capaian penerima layanan dasar yaitu 281.347 dari target 681.706 penduduk usia produktif. Perkembangan capaian pelayanan kesehatan usia produktif di Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 -2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Masih rendahnya capaian layanan usia produktif tersebut disebabkan antara lain:

- a) Belum adanya target sasaran riil, sehingga pelaksanaan program masih menggunakan data sasaran proyeksi.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung sesuai jumlah sasaran dan standar pelayanan dasar.
- c) Tugas ganda penanggungjawab program dan adanya mutasi petugas pengelola PTM.
- d) Tidak semua kegiatan skrining kesehatan pada usia 15 sampai dengan 59 tahun di Kabupaten Lampung Timur dilaporkan terutama pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan swasta;
- e) Dukungan lintas sektoral dan swasta masih rendah
- f) Kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan masih rendah, sebagian besar masyarakat berkunjung ke fasilitas kesehatan pada saat sakit.
- g) Terbatasnya anggaran untuk operasional kegiatan luar gedung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan target kinerja tersebut adalah:

- a) Meningkatkan kerjasama lintas program yakni dengan Promosi Kesehatan dalam kegiatan Germas.
- b) Costing kebutuhan pemenuhan layanan dasar dan penguatan perencanaan penganggaran.

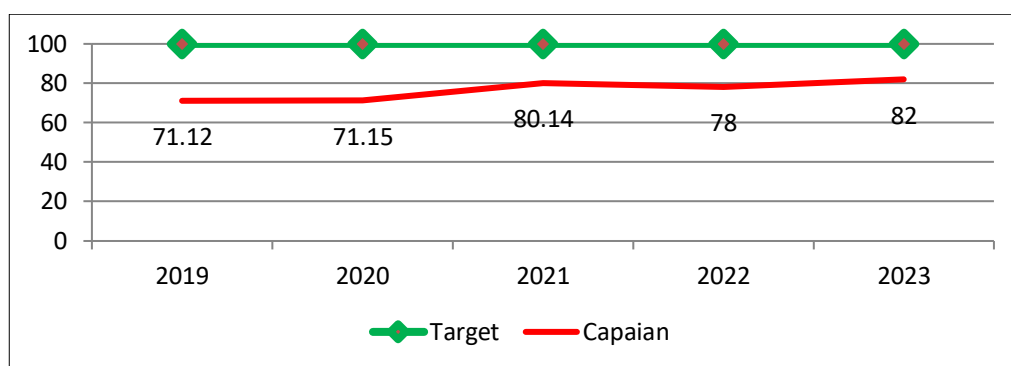
- c) Promosi dan edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam melakukan skrining kesehatan.
- d) Penguatan program Posbindu untuk meningkatkan peran Posbindu melalui bimbingan teknis dan monitoring evaluasi Posbindu.
- e) Bimbingan teknis Dinas Kesehatan ke Puskesmas secara berkala.
- f) Peningkatan sosialisasi program ke kader Posbindu.
- g) Mendorong Puskesmas untuk mengusulkan atau menganggarkan pemenuhan mutu layanan dasar.
- h) Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat Puskesmas, jaringan dan jejaringnya melalui pelaporan online melalui aplikasi ASIK

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan dimaksud meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun yang terdiri dari pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian, anamnesa perilaku beresiko serta tindak lanjut hasil skrining.

Berdasarkan laporan capaian penerima layanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 125.124 dari target 151.668 usia lanjut, Capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2023 yakni 82% dengan katagori nilai kinerja **tinggi**. Walaupun belum mencapai target SPM 100%, namun capaian tersebut meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 yakni 78%. Berikut perkembangan capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir :

Grafik 2.2.7
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Usila
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja layanan usia lanjut antara lain:

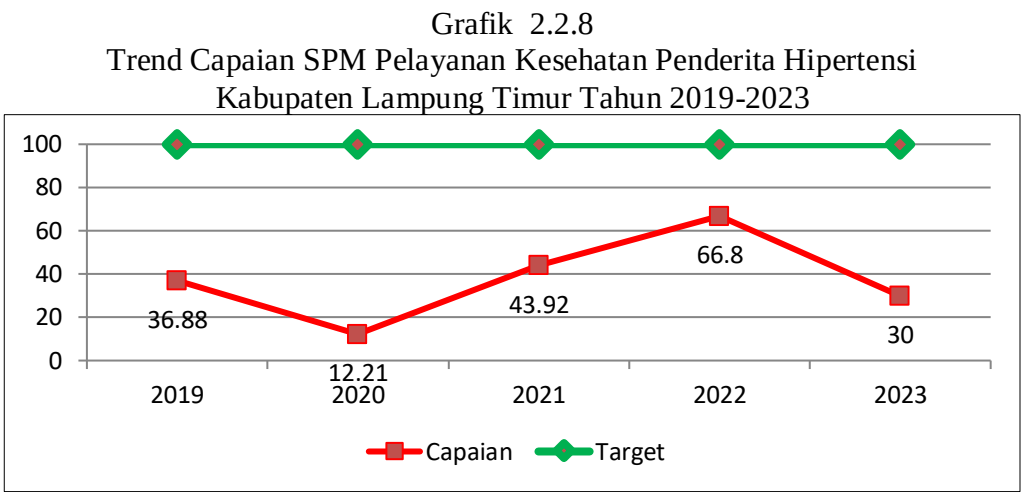
- a) Kesadaran masyarakat usia lanjut untuk mengikuti kegiatan skrining kesehatan masih rendah.
- b) Terbatasnya penganggaran dan sarana prasarana untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan usia lanjut seperti alat pengukur gula darah, pengukur kolesterol, stik dan reagensia untuk pelaksanaan skrining, buku kesehatan lansia dan instrumen pemeriksaan lansia sesuai jumlah sasaran.
- c) Belum terpenuhinya buku kesehatan usia lanjut sesuai jumlah sasaran.
- d) Pelayanan kesehatan usia lanjut pada fasilitas kesehatan swasta belum sesuai standar dan belum terlaporkan.

Dinas Kesehatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan capaian indicator kinerja, antara lain:

- a) Peningkatan peran Posyandu Lansia dan Posbindu dalam pelayanan kesehatan usia lanjut.
- b) Integrasi program dengan program pengendalian penyakit tidak menular.
- c) Promosi dan edukasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat.
- d) Gerakan skrining lansia sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan lansia.
- e) Monitoring dan bimbingan secara berkala kepada Puskesmas.

8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah salah satu indikator SPM bidang kesehatan, yang meliputi pengukuran darah minimal dilakukan satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan atau kepatuhan minum obat dan melakukan rujukan jika diperlukan. Capaian penerima layanan dasar penderita hipertensi adalah 82.949 orang dari target 273.143 orang. Capaian SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah 30%, capaian kinerja di tersebut belum mencapai target 100%, dan turun bila di banding capaian tahun 2022 (68.8%). Perkembangan capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Belum tercapainya SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi diakibatkan antara lain karena:

- a) Belum ada data sasaran riil, sasaran yang digunakan di Kabupaten Lampung Timur menggunakan data proyeksi
- b) Pelayanan kesehatan hipertensi sebagian besar terbatas pada pelayanan rutin Puskesmas.
- c) Pelayanan di luar gedung seperti pelayanan di Posbindu dilakukan untuk melakukan skrining penderita hipertensi, namun sebagian masyarakat tidak bersedia melakukan follow up ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan standar hipertensi.
- d) Kurangnya tenaga Medis (dokter) untuk melakukan Posbindu Mobile.
- e) Kurangnya ketersediaan alat Posbindu di masing-masing Puskesmas.
- f) Keterbatasan anggaran untuk operasional pelaksanaan skrining luar gedung.
- g) Penganggaran untuk kader Posbindu belum maksimal.
- h) Lemahnya system pencatatan dan pelaporan sehingga pelayanan penderita hipertensi tidak terlaporkan seluruhnya.
- i) Kendala koneksi internet dan sistem pelaporan online.
- j) Pengelola program rangkap tugas dan adanya pergantian/ mutasi pengelola program.
- k) Belum terlaporkannya pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan swasta.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target SPM di atas antara lain:

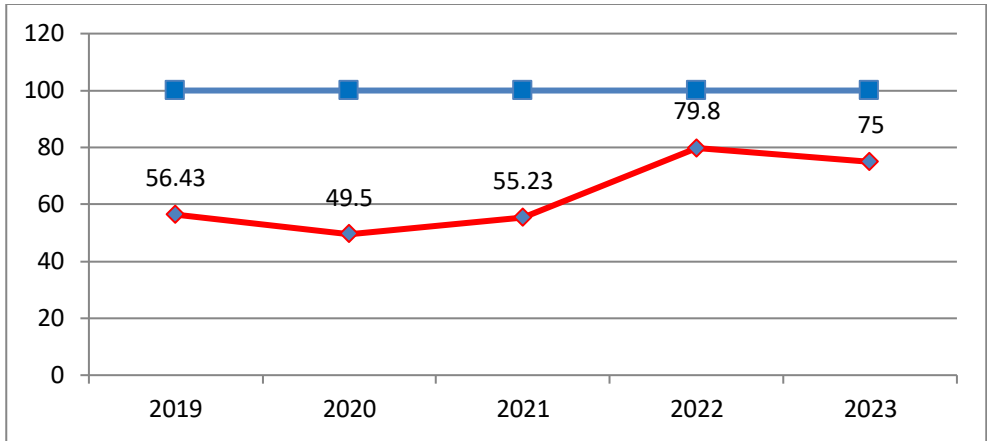
- a) Identifikasi sasaran bekerjasama dengan program PIS-PK
- b) Meningkatkan pembinaan Posbindu untuk meningkatkan deteksi faktor resiko hipertensi.
- c) Mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan deteksi dini hipertensi dalam kegiatan Germas.
- d) Merencanakan dan mengkoordinasikan penganggaran pemenuhan mutu layanan dasar sampai dengan ke Puskesmas.
- e) Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan baik di Puskesmas maupun laporan dari Rumah Sakit/ pelayanan kesehatan swasta.

9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan skunder yang meliputi pengukuran gula darah minimal satu kali dalam sebulan di fasilitas kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup/ nutrisi, terapi farmakologi dan rujukan jika diperlukan.

Capaian penerima layanan dasar SPM pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus tahun 2023 berjumlah 10.092 dari target 13.403 orang. Capaian SPM pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus sebesar 75% dari target 100% dan lebih rendah dari capaian tahun 2022 (79.8%). Adapun perkembangan capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Mellitus dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Grafik 2.2.9
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Daibetus Mellitus
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2023



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Penyebab belum tercapainya SPM pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meliitus adalah sebagai berikut :

- a) Belum tersedianya sasaran riil penderita DM, sasaran masih menggunakan data proyeksi.
- b) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan Posbindu.
- c) Masih rendahnya penganggaran untuk pelayanan DM.
- d) Belum semua Puskesmas memiliki tenaga gizi dan tenaga kesehatan masyarakat sesuai dengan standar SPM.
- e) Tugas rangkap pengelola program PTM sehingga pelaksanaan program tidak maksimal.
- f) Penganggaran untuk kader Posbindu belum maksimal.
- g) Belum tercukupinya sarana dan prasarana seperti glukometer.
- h) Belum tercukupinya bahan habis pakai seperti stik gula darah sesuai dengan jumlah sasaran.
- i) Belum semua pelayanan DM terutama dari rumah sakit, klinik dan praktek Dokter swasta dilaporkan.
- j) Kendala koneksi internet dan sistem pelaporan online

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi belum tercapainya SPM pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meliitus hal tersebut antara lain:

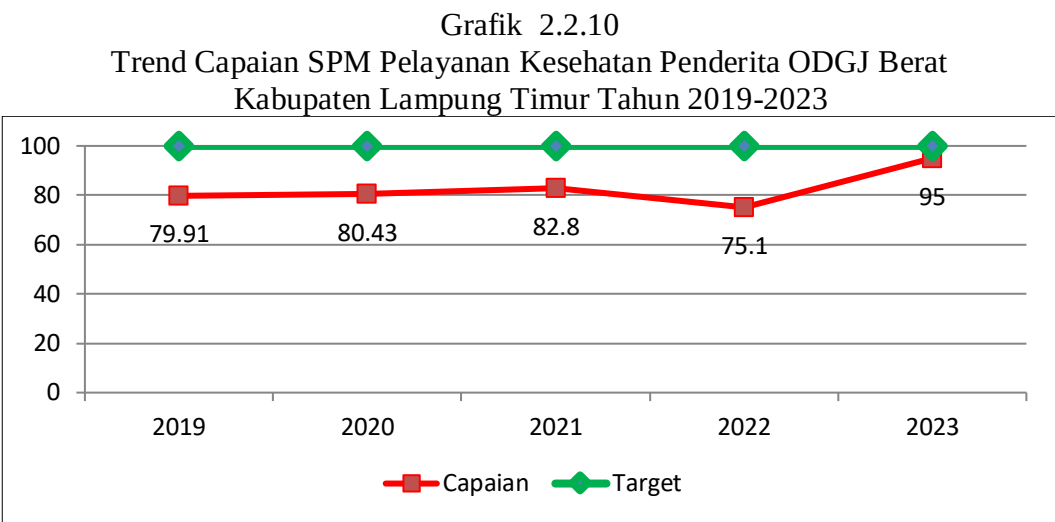
- a) Identifikasi sasaran bekerjasama dengan program PISPK
- b) Costing kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar penderita DM dan penguatan perencanaan penganggaran
- c) Penguatan pelayanan penderita DM yang berkunjung ke Puskesmas
- d) Promosi dan edukasi masyarakat melalui program Germas
- e) Penguatan pembinaan program melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berkala ke Puskesmas.
- f) Penguatan peran Posbindu melalui bimbingan teknik Posbindu dan Monitoring Evaluasi.

10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Pelayanan kesehatan ODGJ Berat sesuai standar mensyaratkan harus dilakukan oleh minimal 1 (satu) orang dokter dan/ atau perawat terlatih jiwa atau tenaga lainnya yang meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Bentuk kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur dilakukan baik di Puskesmas maupun melalui kegiatan kunjungan rumah meliputi pemeriksaan status mental, edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan tindakan kebersihan diri ODGJ berat.

Pada tahun 2023, sebanyak 1.787 dari 1.879 ODGJ berat telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023, capaian kinerja indikator tersebut telah mencapai 95%, walaupun belum mencapai target 100%, namun hasil tersebut meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 (75.1%).

Perkembangan capaian kinerja pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan upaya pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan orang dengan ODGJ berat, beberapa kendala yang ditemui adalah:

- a) Data sasaran ODGJ merupakan data hasil proyeksi dan bukan data riil sehingga memungkinkan terjadi kesenjangan di populasi.
- b) Rendahnya penganggaran yang mendukung kesehatan jiwa.
- c) Belum tercukupinya penyediaan sarana prasarana untuk memenuhi standar mutu layanan dasar seperti alat fiksasi.
- d) Pembiayaan pengobatan dan rujukan sering mengalami kendala karena beberapa ODGJ tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga kesulitan untuk didaftarkan BPJS.
- e) Masih tingginya stigma masyarakat terhadap ODGJ.

- f) Masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam penanganan ODGJ.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal di atas antara lain:

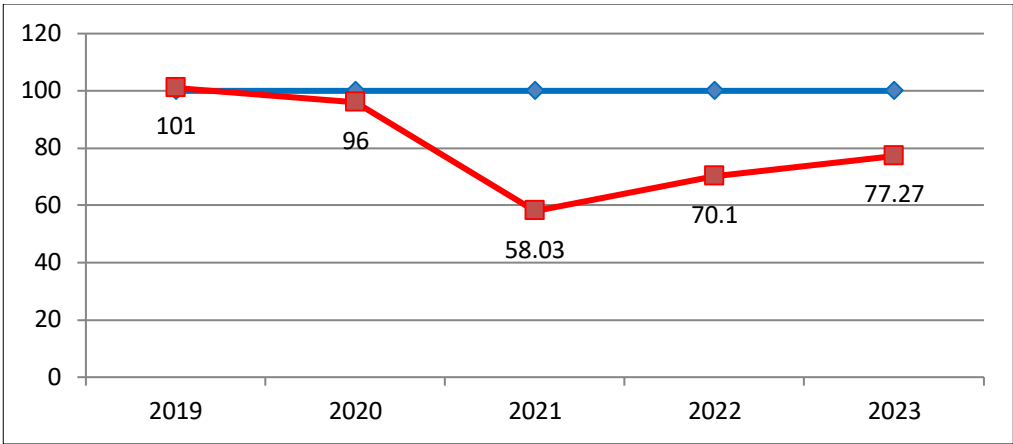
- a) Identifikasi sasaran bekerjasama dengan program PIS-PK
- b) Penjaringan ODGJ dan pembebasan pasung,
- c) Rujukan ODGJ yang dipasung.
- d) Penguatan Puskesmas rujukan jiwa yakni Puskesmas Purbolinggo, Batanghari dan Puskesmas Sribhawono.
- e) Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ.
- f) Advokasi kepada masyarakat dan *stakeholder* untuk mengurangi stigma buruk tentang ODGJ.
- g) Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat tingkat Kabupaten Lampung Timur.
- h) Edukasi penanganan ODGJ terutama pada keluarga ODGJ.
- i) Penguatan bimbingan teknis ke Puskesmas.

11) Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis sesuai standar merupakan salah satu indikator SPM bidang kesehatan. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar dimaksud adalah pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang dan edukasi. Pemeriksaan klinis terduga TBC yaitu dengan melakukan pemeriksaan gejala dan tanda, sedangkan pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan dahak dan atau bakteriologis dan atau radiologis, sedangkan edukasi pada terduga TBC adalah edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan. Selain hal tersebut di atas, pelayanan pada terduga TBC juga dapat dilakukan dengan melakukan rujukan pada kasus-kasus yang memerlukan rujukan. Sehingga untuk memenuhi standar tersebut harus didukung oleh petugas yang berkompeten maupun ketersediaan sarana prasarana seperti mikroskop dan lain lainnya.

Capaian SPM pelayanan kesehatan orang dengan TB tahun 2023 sebesar 77.27%, dengan capaian penerima layanan dasar sebanyak 13.660 dari 17.679 orang. Capaian tersebut belum mencapai target 100%, namun meningkat bila dibanding capaian tahun 2022 yakni 71%. Perkembangan capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar sebagai berikut:

Grafik 2.2.11
 Capaian Terduga TB Mendapat Pelayanan Sesuai Standar
 Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2023



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian SPM pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar di atas antara lain:

- Target sasaran ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- Belum semua puskesmas yang memiliki tenaga analis memiliki mikroskop dan belum semua Puskesmas mempunyai tenaga ATLM.
- Distribusi TCM dari Pusat terlambat dan baru diterima di akhir tahun.
- Reagen untuk pemeriksaan mikroskopis baru diterima pada triwulan ke tiga.
- Sebagian besar pengadaan sarana prasarana/ BMHP terlaksana pada akhir tahun.
- Masalah SDM pengelola TB yang merangkap jabatan dan belum terlatihnya pengelola TB baru yang pergantian pekerjaan.
- Sosialisasi program TBC di masyarakat dan penjangkaran kasus di Unit Pelayanan Kesehatan tingkat Puskesmas belum maksimal dan belum tepat sasaran;
- Masih tingginya pasien TB yang berobat keluar wilayah Kabupaten.
- Terbatasnya anggaran operasional petugas untuk melakukan skrinning aktif ke masyarakat.
- Pengiriman pelaporan tidak tepat waktu yang telah disepakati bersama
- Kendala pelaporan online terkait koneksi internet dan aplikasi.
- Belum semua puskesmas PPM dan PRM melakukan uji silang ke Laboratorium Propinsi Lampung;
- Dalam Pencatatan dan Pelaporan form TBC masih terbatas pada pengelola program saja (belum berjalannya tim TBC di Puskesmas);
- Praktek swasta yang ada diwilayah kerja puskesmas belum melaporkan secara rutin untuk temuan terduga TBC nya dan masih ada yang mengobati tanpa mnggunakan standar DOTS ;
- Penyisiran data ke Rumah Sakit dan praktek swasta belum maksimal;

- p) Komunitas kader Lembaga Masyarakat dan kader kesehatan belum maksimal dalam pengiriman terduga TBC;

Hal yang dilakukan untuk mengatasi masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar antara lain:

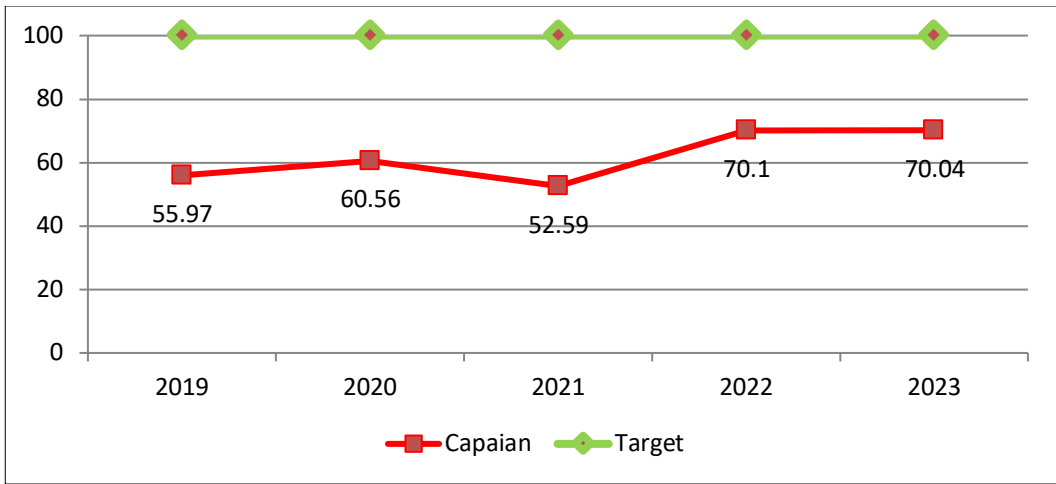
- a) Penjaringan terduga di dalam gedung dengan memaksimalkan di Balai Pengobatan Puskesmas;
- b) Investigasi kontak yang melibatkan kader, baik kader puskesmas maupun kader ILS (Inisiatif Lampung Sehat);
- c) Pengadaan logistik yang kurang/tidak mencukupi.
- d) Pelatihan pengelola program TB
- e) Membuat analisa kebutuhan tenaga analis dan atau rekrutmen tenaga analis sesuai peraturan yang ada;
- f) Komunikasi Informasi dan Edukasi yang tepat sasaran;
- g) Komitmen petugas puskesmas dalam mengirimkan laporan dan sampel uji silang;
- h) Penguatan tim TBC Puskesmas
- i) Sosialisasi terkait program TBC kepada semua tim puskesmas melalui kegiatan lokmin maupun kegiatan lain, sehingga dari isu program terkini tersampaikan;
- j) Membuat regional pembagian per fasyankes dalam pengiriman sampel TCM;
- k) Melaporkan hasil capaian program secara berkala ke pimpinan baik tingkat Puskesmas sampai dengan tingkat Kabupaten;
- l) Meningkatkan kordinasi dengan Rumah Sakit maupun praktek swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas;
- m) Monitoring dan Evaluasi dan bimbingan teknis ke Puskesmas secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Permenkes No 4 tahun 2019 mengamanatkan bahwa setiap orang yang beresiko terinfeksi HIV harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang termasuk orang dengan resiko HIV adalah ibu hamil, pasien TB, penaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan sedangkan standar pelayanan yang dimaksud meliputi edukasi perilaku beresiko dan skrining.

Capaian SPM pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV tahun 2023 sebesar 70.04 % atau 14.677 orang beresiko terinfeksi HIV dibandingkan jumlah target layanan 20.954 orang, belum mencapai target 100% dan relatif tetap bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Perkembangan pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV di Kabupaten Lampung Timur seperti terlihat pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.2.12
Trend Capaian SPM Pelayanan Kesehatan pada Orang Beresiko HIV
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2023



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Kendala yang ditemui dalam upaya pencapaian target SPM pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV antara lain:

- a) Penentuan sasaran masih menggunakan data estimasi dikarenakan data riil belum sepenuhnya tersedia. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena kesulitan mendapatkan data terutama dari populasi kunci seperti Waria, Pekerja Seks, Penasun, LSL.
- b) Keterbatasan SDM Puskesmas karena beberapa pengelola HIV juga sebagai petugas surveilans dan vaksinator puskesmas
- c) Masih kurangnya sumber daya manusia kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan HIV terutama tenaga ATML; serta adanya *double job* petugas.
- d) Belum maksimalnya puskesmas dalam menginput capaian yang sudah terskrining HIV maupun IMS melalui aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS terkait koneksi internet, aplikasi online dan rangkap tugas petugas Puskesmas.
- e) Pemeriksaan HIV masih berkutat pada pemeriksaan ibu hamil dan masih banyak yang belum menyentuh populasi kunci;
- f) Belum tercukupinya sarana prasarana dan BMHP untuk pemenuhan standar mutu layanan.
- g) Stigma masyarakat terhadap ODHA masih buruk.
- h) Belum maksimalnya kerjasama lintas sektor dalam penjangkaran kasus maupun sosialisasi terkait penanggulangan HIV AIDS & PIMS (PMI, Sosnakertrans, Depag, dan lain-lain).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pada orang beresiko HIV tersebut antara lain:

- a) Pemetaan populasi kunci ditingkat puskesmas;
- b) Kaderisasi layanan *Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP)* di puskesmas dan Rumah Sakit;

- c) Peningkatan kerja sama lintas program terutama KIA dalam rangka skrinning HIV pada ibu hamil.
- d) Pelaksanaan VCT mobile di Puskesmas
- a) Mobile Lapas dalam rangka pemeriksaan HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP);
- e) Penguatan jejaring dengan listas sektor terkait program HIV AIDS;
- f) Melaporkan hasil capaian program secara berkala ke pimpinan baik tingkat Puskesmas sampai dengan tingkat Kabupaten;
- g) Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- h) Monitoring Evaluasi baik ditingkat Kabupaten dan Fasyankes/Puskesmas.
- i) Pemeriksaan Viralload;
- j) KIE (Komunikasi Informasi & Edukasi) pencegahan, penanggulangan & pengendalian HIV/AIDS ke masyarakat;
- k) Penyuluhan pengetahuan komprehensif pencegahan, penanggulangan & pengendalian HIV/AIDS ke sekolah;
- l) Mobile Konseling Tes Sukarela (KTS);
- m) Melakukan MOU dengan LSM OPSI JAMBI yang bergerak untuk melakukan motivasi dan dorongan kepada Pekerja Seks melakukan skrining yang dapat membantu meningkatkan capaian Program
- n) Pendampingan bagi ODHA yang Loss To Follow Up yang melibatkan lembaga masyarakat *Saburai Support Group (SSG)*;
- o) Mengikutsertakan kader HIV yang dalam pelatihan kader HIV di Bandar Lampung untuk membantu petugas yang ada di layanan dalam menjaring dan skrining sasaran program

C. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Evaluasi dan analisa pencapaian kinerja dilakukan guna memperoleh informasi mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023. Gambaran evaluasi dan analisa tingkat pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Realisasi dan tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Lampung Timur Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan		Target	Realisasi	Satuan	Capaian
	1	Angka Harapan Hidup	70,75	71,25	Tahun	100,71
Meningkatnya kualitas kesehatan ibu	1	Penurunan kasus kematian ibu (kasus)	16	15	Kasus	106.25

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan		Target	Realisasi	Satuan	Capaian
dan anak	2	Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (TPB)	5.4	6.19	1.000 KH	85.37
Meningkatnya status gizi masyarakat	3	Prevalensi stunting (%) (TPB)	23	2.27	Persen	190.13
	4	Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (TPB)	9	2.43	Persen	175.22
Menurunnya Angka Kesakitan	5	Insidensi TB per 100.000 penduduk	231	98.29	100.000 penduduk	42.55
	6	Treatment Coverage pada pasien TB (SPM) (TPB)	92	30.73	Persen	33.40
	7	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0.19	0.02	1.000 penduduk	11.57
	8	Insiden Rate kasus DBD per 100.000 penduduk	<49	31.82	100.000 penduduk	135.06
Meningkatnya kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	9	Indeks Keluarga Sehat	0.38	0.23	Persen	60.53
	10	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	40	61,74	Persen	154.35
Meningkatnya pengendalian penyakit Menular yang berpotensi pandemi	11	Positivity Rate	< 5	9.99	Persen	50.05
	12	CFR (Case Fatality Rate)	< 2	6.18	Persen	35.28
Meningkatnya pelayanan terhadap kasus korban NAPZA	13	Persentase pelayanan kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100	90.90	Persen	90.90
	14	Cakupan pelayanan korban NAPZA (%) (TPB)	90	90.90	Persen	101

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, maka dilakukan evaluasi dan analisa pencapaian kinerja guna memperoleh informasi mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023. Gambaran evaluasi dan analisa tingkat pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup

Indikator angka harapan hidup merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur”. Tingkat capaian kinerja indicator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.4
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja AHH Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2022	2023			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Target (%)	Target	Capaian terhadap Target (%)
Angka Harapan Hidup	71.01	70,75	71,25	100,71	70,78	100,32

Pada indikator kinerja di atas yakni angka harapan hidup di nilai dengan semakin tinggi nilai realisasi maka indikator dianggap semakin berhasil. Pembahasan indikator kinerja di atas, sebagai berikut:

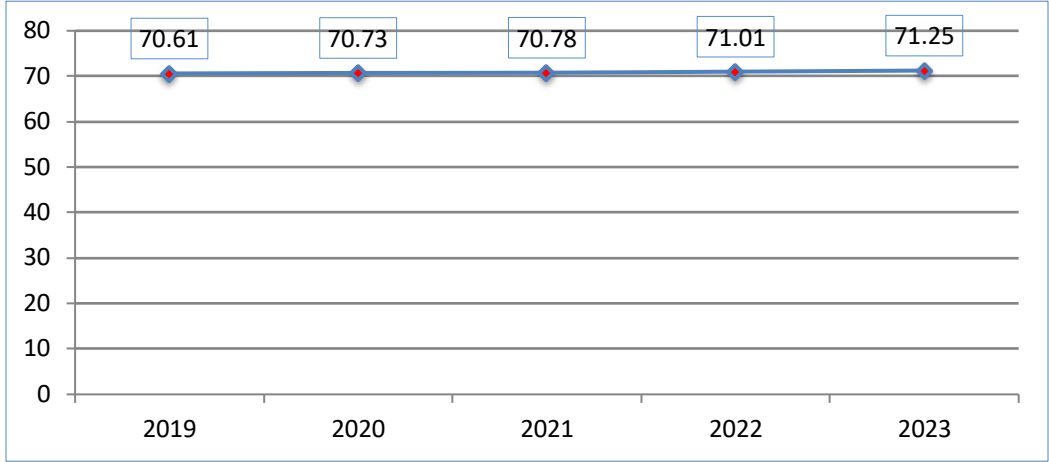
1) Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

AHH di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 berdasarkan data dari publikasi BPS sebesar 71,25 tahun, meningkat 0,24 point bila dibanding AHH tahun 2022, dan telah mencapai angka yang sama dengan AHH Provinsi Lampung (71,25 tahun). Dengan demikian AHH Kabupaten Lampung Timur telah mencapai target tahun 2023 yakni 70,75 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 100,71% di banding target atau 100,66% bila di banding target akhir RPJMD.

Perkembangan AHH di Kabupaten Lampung Timur meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan peningkatan AHH tersebut menggambarkan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Grafik 2.2.13
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

2. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran strategis 1 yaitu ‘ **Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak**’ merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur**”. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Dinas Kesehatan menetapkan 2 indikator kinerja di Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.5
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2022	2023			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Target (%)	Target	Capaian terhadap Target (%)
Penurunan kasus kematian ibu (kasus)	16	16	15	106.25	13	84.62
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (TPB)	6.6	5.4	6.19	85.37	5,1	80.39

Pada 2 (dua) indikator kinerja di atas, yakni penurunan kasus kematian ibu dan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dapat dijelaskan bahwa semakin menurun nilai realisasi maka semakin berhasil indikator tersebut. Pembahasan indikator kinerja di atas, sebagai berikut:

1) Penurunan Kasus Kematian Ibu

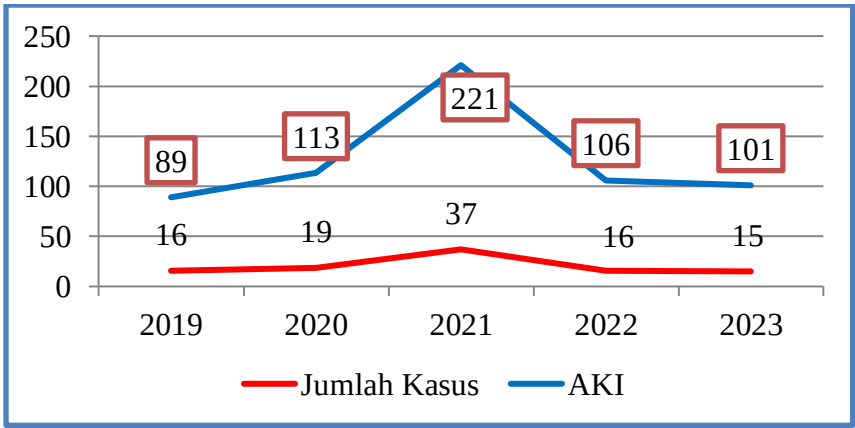
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kematian ibu dalam setiap kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. AKI merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat karena dapat mencerminkan tingkat kesehatan dan aksesibilitas sistem perawatan

kesehatan bagi perempuan. AKI dinyatakan dalam bentuk angka per 100.000 kelahiran hidup. Semakin rendah AKI, semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan semakin tinggi harapan hidup ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi AKI meliputi aksesibilitas perawatan kesehatan, pendidikan, status sosial-ekonomi, budaya, dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, setiap negara harus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas perawatan kesehatan ibu guna mengurangi angka kematian ibu secara signifikan.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 berjumlah 15 kasus atau 101 per 100.000 Kelahiran Hidup, berada di bawah angka Nasional, di mana berdasarkan hasil SUPAS tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia diperkirakan sebesar 305 per 100.000 KH. Jumlah kasus tersebut menurun bila dibanding tahun 2022 (16 kasus), dan telah mencapai target Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 yaitu kurang dari 16 kasus.

Sistem pencatatan dan pelaporan kasus kematian ibu telah dilakukan berbasis elektronik yakni menggunakan aplikasi *Maternal Death Notivication* (MDN), sehingga jumlah kasus kematian yang dilaporkan merupakan kasus kematian ibu yang terjadi dimanapun sesuai alamat KTP Lampung Timur, walaupun tidak berdomisili di Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan perkembangan jumlah kasus dan angka kematian ibu dapat di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

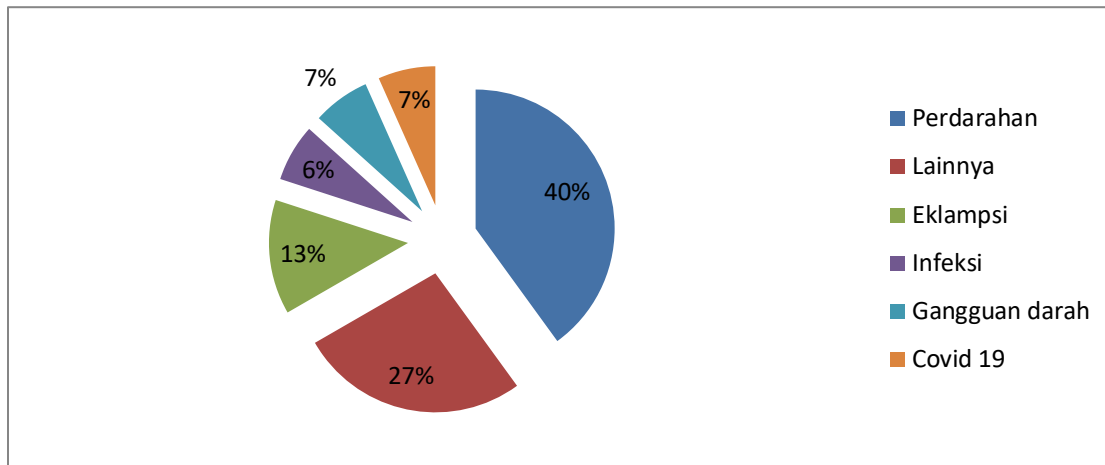
Grafik 2.2.14
Jumlah kasus dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2019 sd 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Penyebab kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebagian besar disebabkan oleh perdarahan (40%), lainnya 27 %, Eklamsi 13 %, Gangguan darah 7 %, Covid 19 sebesar 7 % dan Infeksi 6 %, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2.15
Penyebab Kematian Ibu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja jumlah kasus dan angka kematian ibu antara lain:

1. Pelayanan antenatal care belum sesuai standar 10 T sehingga bumil resiko tinggi terlambat terjaring dan terlambat mendapatkan tatalaksana kasus yang tepat.
2. Status kesehatan ibu hamil yang masih rendah salah satunya masih tingginya kasus anemia pada ibu hamil dan ibu hamil KEK.
3. Kepatuhan terhadap SOP masih rendah.
4. Keterbatasan sarana prasarana dan tenaga terlatih dalam penanganan gawat darurat maternal (5 Puskesmas PONED belum mempunyai tenaga terlatih, 34 Puskesmas belum mempunyai tenaga gawat darurat maternal, Bidan yang terlatih ANC, persalinan dan nifas hanya 4 Puskesmas).
5. Belum maksimalnya system monitoring dan evaluasi
6. Kurangnya dukungan lintas sektoral terhadap upaya penurunan AKI.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus atau angka kematian ibu tidak terlepas dan merupakan bagian dari upaya penurunan Angka Kematian Bayi, yakni:

1. Mengoptimalkan program P4K dan Bank darah desa.
2. Tatalaksana ibu hamil anemia secara komprehensif dengan melibatkan lintas program.
3. Melaksanakan OJT kegawatdaruratan maternal neonatal bagi Dokter, Perawat dan Bidan Puskesmas.
4. Pertemuan tentang ANC terpadu dengan lintas sektor dan lintas profesi
5. Pengadaan BMHP untuk penanganan gawat darurat maternal
6. Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK.
7. Monitoring dan evaluasi ke Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri

8. Survey penyeliaan fasilitatif ke Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri dan tindak lanjutnya.
9. Audit Maternal Perinatal
10. Pelaksanaan kasus rujukan ibu bersalin.
11. Koordinasi dan advokasi secara rutin untuk meningkatkan peran sector terkait dalam upaya penurunan kasus kematian ibu.

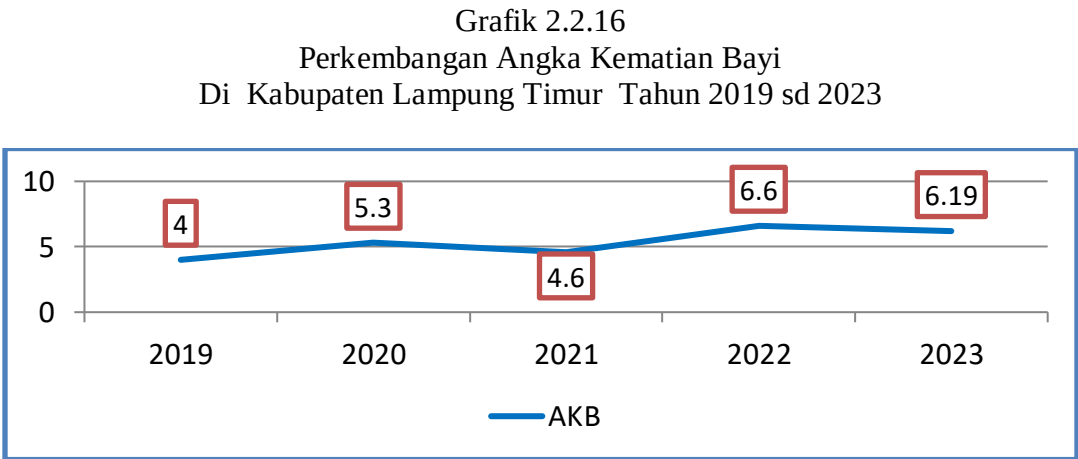
Strategi yang dilakukan dalam upaya penurunan kasus kematian ibu di Kabupaten Lampung Timur antara lain:

1. Peningkatan kualitas ANC terpadu
2. Penemuan kasus resiko tinggi ibu hamil dan tatalaksana kasus
3. Pelacakan kematian maternal perinatal
4. Melakukan Pengkajian kasus kematian dengan ahli
5. Analisa hasil pelaksanaan Sufas di Puskesmas maupun BPM
6. Penguatan managemen dan jejaring persalinan dan rujukan
7. Pembelajaran hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal
8. Penyediaan anggaran kasus rujukan ibu bersalin.
9. Penguatan koordinasi perencanaan, monitoring evaluasi dan validasi data
10. Penguatan program PKPR
11. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

2) Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (AKB)

Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan ibu anak. Pada tahun 2023 kasus kematian bayi berjumlah 92 kasus atau 6,19 per 1.000 KH; menurun bila dibanding kematian bayi tahun 2022 yang berjumlah 110 kasus atau 6,6 per 1.000 KH. Capaian angka kematian bayi mencapai 85,37% bila dibandingkan target atau 80,39% bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (5.1 per 1.000 KH).

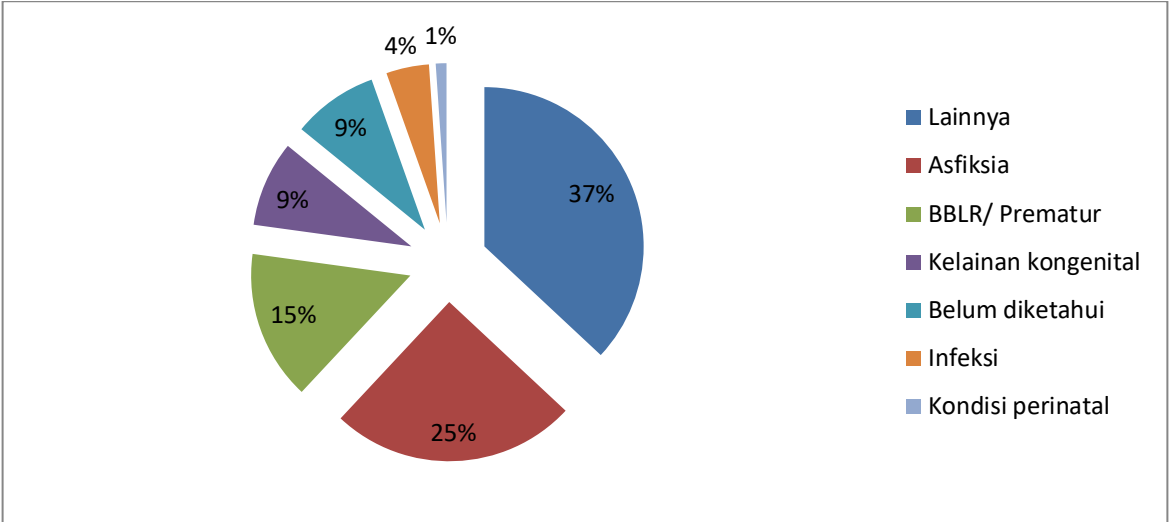
Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Bila dilihat berdasarkan penyebab, sebagian besar kasus kematian bayi pada tahun 2023 disebabkan oleh lain-lain yakni berjumlah 34 kasus. Distribusi kematian neonatal berdasarkan penyebab, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2.17
Penyebab Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Tingginya penyebab kematian bayi akibat lainnya didalamnya termasuk kasus syndrome gawat nafas pada bayi pasca bayi mengalami asfiksia dan bayi prematur. Sedangkan tingginya BBLR dan asfiksia dapat dikaitkan dengan kualitas ANC, status kesehatan ibu hamil dan kemampuan petugas dalam tatalaksana kegawatdaruratan pada bayi baru lahir masih rendah.

Beberapa kendala yang dihadapi pada upaya pencapaian indikator kinerja penurunan Angka Kematian Bayi antara lain:

1. Belum semua pelayanan ANC sesuai standar sehingga berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi dan tidak maksimalnya deteksi dini factor resiko sehingga tatalaksana kurang optimal.
2. Belum semua sarana fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar (SIPAP portable dan inkubator transportasi sangat terbatas, keterbatasan obat program gawat darurat neonatal).
3. Pelaksanaan kunjungan neonatal yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai standar
4. Kompetensi tenaga dalam penanganan kegawat darurat perinatal dan neonatal masih kurang; 5 Puskesmas PONED belum mempunyai tenaga terlatih, 34 Puskesmas belum mempunyai tenaga gawat darurat neonatal.
5. Kepatuhan petugas terhadap SOP masih kurang
6. System rujukan dan kesiapan pelayanan kesehatan rujukan belum maksimal.
7. Belum beroperasinya PICU/ NICU di RSUD Sukadana.
8. Kurangnya maksimalnya system monitoring dan evaluasi

9. Peran lintas sector dalam upaya penurunan AKB masih kurang optimal

Sedangkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan OJT kegawatdaruratan maternal perinatal bagi petugas Puskesmas yakni Dokter, Bidan dan Perawat.
2. Kala karya MTBS tingkat Puskesmas dan jejaring
3. Rujukan bayi baru lahir
4. Monitoring dan evaluasi ke Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri
5. Survey penyeliaan fasilitatif ke Puskesmas dan Bidan Praktek Mandiri
6. Audit Maternal Perinatal
7. Koordinasi dan advokasi secara rutin untuk meningkatkan peran sector terkait dalam upaya penurunan kasus kematian bayi/ AKB.

Strategi yang dilakukan dalam upaya penurunan AKB adalah dengan meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak, antara lain:

1. Deteksi dini kasus resiko tinggi ibu dan bayi dan tatalaksana kasus
2. Penguatan pelayanan antenatal care melalui ANC terpadu.
3. Penguatan pelayanan neonatal dan bayi
4. Pelacakan kematian bayi dan pembelajaran bersama kasus kematian bayi
5. Penguatan program perencanaan pertolongan persalinan dan komplikasi (P4K)
6. Penguatan manajemen dan jejaring pelayanan kesehatan bayi dan rujukan
7. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya kesehatan ibu dan anak
8. Skrinning hipertiroid kongenital
9. Pemantauan wilayah setempat KIA
10. Pemenuhan sarana prasarana kegawatdaruratan neonatal dan bayi.

3. SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran strategis 2 yaitu ‘**meningkatnya status gizi masyarakat**’ merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan “**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur**”. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Dinas Kesehatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja di Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.6
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2022	2023			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Target (%)	Target	Capaian terhadap Target (%)
Prevalensi stunting (%) (TPB)	18.1	23	2.27	190.13	20	188.65
Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (TPB)	8.9	9	2.43	175.22	7,5	167.60

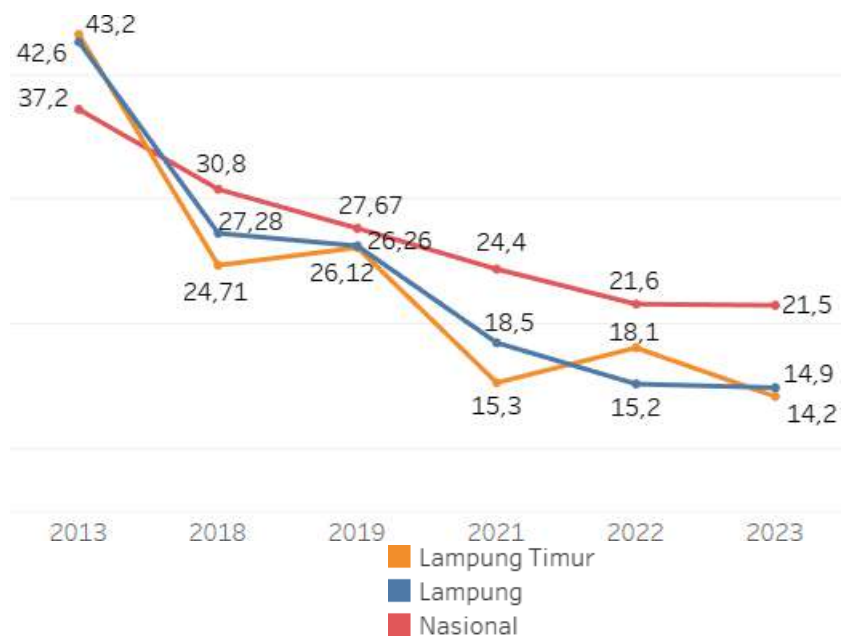
Pada 2 (dua) indikator kinerja di atas, yakni prevalensi stunting dan prevalensi wasting dapat dijelaskan bahwa semakin menurun nilai realisasi maka semakin berhasil indikator tersebut. Pembahasan indikator kinerja di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Prevalensi Stunting

Stunting pada balita adalah kondisi anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018, balita stunting di Kabupaten Lampung Timur sebesar 24,71 %. Sedangkan berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, stunting di Kabupaten Lampung Timur 18,1%, dan menurun pada tahun 2023, dimana berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia, stunting balita di Kabupaten Lampung Timur sebesar 14,2%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-8 prevalensi stunting terendah di Provinsi Lampung. Hal ini merupakan pencapaian hasil yang baik dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Timur serta kerjasama antar sektor/lembaga/pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Timur.

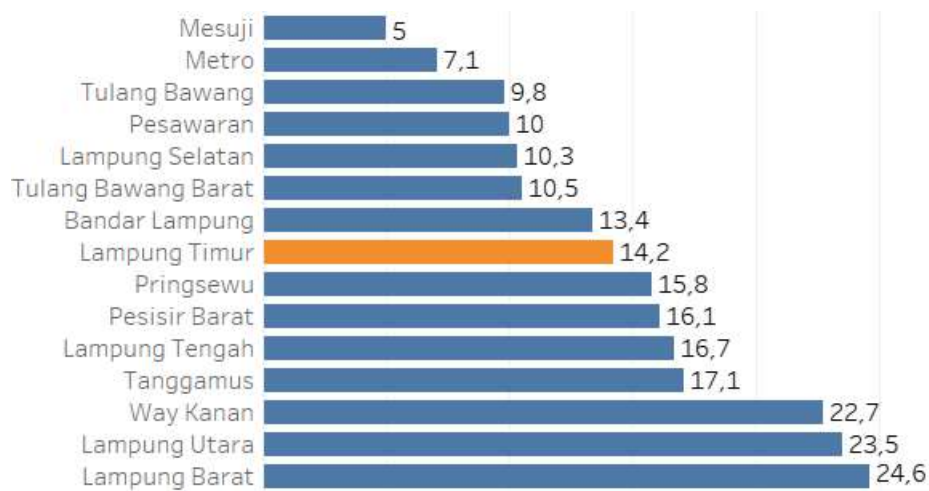
Gambaran perkembangan stunting di Kabupaten Lampung Timur dibandingkan dengan angka stunting di Provinsi Lampung dan Nasional, sebagai berikut:

Grafik 2.2.18
Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Timur



Sumber: Riskesdas dan SSGI Tahun 2013, 2018, 2022 dan 2023

Grafik 2.2.19
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tahun 2023

Sedangkan berdasarkan sistem elektronik pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM), prevalensi balita stunting di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,4 %, tahun 2022 sebesar 2,03%, dan tahun 2023 sebesar 2,2% dengan prevalensi tertinggi adalah Puskesmas Way Mili sebesar 14,80 %, Puskesmas Margototo dan Wana 13,57 %, dan puskesmas Rejo Katon 6.13 %. Ada perbedaan yang cukup signifikans antara angka EPPGBM dengan hasil survai, yang dikarenakan pendataan yang belum lengkap, namun data EPPGBM berbasis by name by adrres yang dapat menjadi rujukan dalam melakukan intervensi kegiatan. Di Kabupaten Lampung Timur telah ditetapkan lokus penanganan stunting yang dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2024 sebanyak 90 desa yang tersebar di 20 kecamatan.

Tabel 2.2.7
Desa Lokus Stunting Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 sd 2024

No	Kecamatan	Desa		Lokasi Fokus Stunting Per Tahun						Jumlah
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sukadana	1	Surabaya Udik	1						
		2	Negara Nabung	1						
		3	Putra Aji Dua				1			
		4	Pakuan Aji				1			
		5	Bumi Nabung Udik	1						
		6	Sukadana Timur	1						
		7	Putra Aji I						1	
		8	Sukadana Selatan				1			
		9	Sukadana Jaya				1			
2	Jabung	10	Belimbing Sari					1		
		11	Negara Batin				1			
		12	Gunung Mekar					1		
		13	Gunung Sugih Kecil					1		
3	Labuhan Maringgai	14	Sri Gading		1					
		15	Sukorahayu				1			
4	Way Jepara	16	Sumberjo				1			
		17	Sri Rejosari				1			
		18	Labuhan Ratu Dua			1				
		19	Braja Asri						1	
		20	Braja Sakti				1			
		21	Labuhan Ratu Danau			1				
		22	Braja Caka				1			
		23	Braja Dewa				1			
5	Sekampung	24	Giri Kelopo Mulyo						1	
		25	Sumber Gede					1		
		26	Sambikarto						1	
		27	Trimulyo					1		
		28	Wonokarto				1			
6	Pekalongan	29	Adirejo		1					
		30	Gondang Rejo		1					
		31	Siraman		1					
		32	Pekalongan		1					
7	Metro Kibang	33	Sumber Agung		1	1				
		34	Purbo Sembodo		1					
		35	Kibang			1				
		36	Margo Jaya		1					
		37	Margo Toto			1				
		38	Margo Sari		1					
		39	Jaya Asri			1				
8	Purbolinggo	40	Taman Bogo					1		
		41	Tambah Dadi			1				
		42	Taman Fajar					1		
		43	Tegal Gondo					1		
		44	Tambah Luhur					1		
		45	Tanjung Inten					1		
9	Raman Utara	46	Kota Raman				1			

No	Kecamatan	Desa		Lokasi Fokus Stunting Per Tahun						Jumlah
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		47	Rejo Binangun		1					
		48	Rantau Fajar			1				
		49	Raman Fajar			1				
		50	Rejo Katon			1				
		51	Rama Puja				1			
10	Batanghari	52	Buana Sakti			1				
		53	Balai Kencono			1				
		54	Rejo Agung			1				
		55	Adi Warno			1				
		56	Nampi Rejo		1					
		57	Banar Joyo		1					
		58	Telogo Rejo			1				
		59	Sumber Rejo		1					
		60	Purwodadi Mekar						1	
11	Marga Tiga	61	Sukaraja Tiga				1			
		62	Negeri Jemanten	1						
		63	Negeri Katon					1		
		64	Tanjung Harapan					1		
		65	Negeri Tua	1						
		66	Surya Mataram					1		
12	Sekampung Udik	67	Sidorejo						1	
13	Waway Karya	68	Ngesti Karya	1						
		69	Mekar Karya		1					
		70	Tanjung Wangi	1						
		71	Tri Tunggal	1						
15	Batanghari Nuban	72	Sukacari				1			
		73	Negara Ratu				1			
		74	Trisno Mulyo				1			
		75	Cempaka Nuban						1	
		76	Kedaton Ii (Dua)				1			
		77	Kedaton I (Satu)						1	
		78	Tulung Balak				1			
17	Bumi Agung	79	Marga Mulya				1			
		80	Nyampir				1			
18	Gunung Pelindung	81	Negeri Agung						1	
		82	Pempen					1		
		83	Pelindung Jaya		1					
		84	Way Mili						1	
		85	Nibung					1		
19	Labuhan Ratu	86	Labuhan Ratu Lima				1			
24	Marga Sekampung	87	Bungkuk				1			
		88	Peniangan				1			
		89	Gunung Raya	1						
KABUPATEN				10	15	15	25	15	10	89

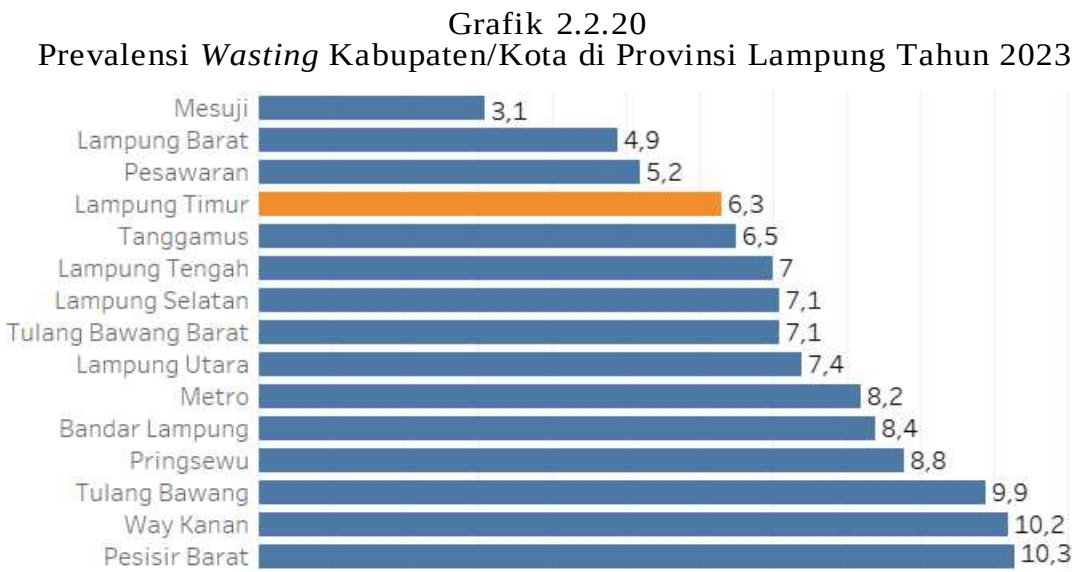
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penurunan stunting baik intervensi spesifik maupun sensitif antara lain melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 264 desa, penerapan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting, 214 Desa telah terbebas dari buang air besar sembarangan (ODF), 76 % sasaran telah memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas, standarisasi pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu, dan publikasi data stunting tingkat kabupaten.

2) Prevalensi Wasting

Gizi kurang merupakan salah satu indikator masalah gizi. Indikator gizi kurang diukur menurut tinggi badan (BB/TB)/*wasting*. *Wasting* memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama, misalnya terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang menyebabkan anak menjadi kurus.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menyebutkan bahwa persentase gizi kurang di Indonesia sebesar 17,7%. Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, *Prevalensi Wasting* Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 sebesar 6,3 persen, menurun dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang sebesar 8,9 persen. Capaian prevalensi *wasting* Kabupaten Lampung Timur telah berada di bawah prevalensi *wasting* Provinsi Lampung yang sebesar 7,3 persen. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-4 dengan prevalensi *wasting* terendah di Provinsi Lampung.



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja prevalensi stunting dan prevalensi wasting antara lain:

1. Penyebab balita kurang gizi sangat kompleks di antaranya adanya penyakit penyerta,

- kemiskinan, sosial, pola asuh, pengetahuan orang tua dan lainnya.
2. Kemampuan petugas yang perlu ditingkatkan dan keterbatasan sarana prasarana dalam upaya tatalaksana gizi balita
 3. Faktor kesehatan lingkungan dan PHBS yang kurang baik masih ditemui di masyarakat
 4. Peran lintas sektoral belum optimal sehingga penanganan stunting dan wasting belum terintegrasi secara maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan wasting antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, pemantauan gizi balita melalui e- PPGBM, penguatan kapasitas petugas gizi, pelacakan dan konfirmasi masalah gizi, penguatan monitoring dan evaluasi program gizi, pengadaan sarana prasarana yakni timbangan balita dan peningkatan kapasitas kader Posyandu.

4. SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran strategis 3 yaitu **menurunnya angka kesakitan** merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur”**. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Dinas Kesehatan menetapkan 4 indikator kinerja di Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ketiga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.8
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2022	2023			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Target (%)	Target	Capaian terhadap Target (%)
Insidensi TB per 100.000 penduduk	129	231	98.29	42.55	231	42.55
Treatment Coverage pada pasien TB (TPB)	42	92	30.73	33.40	95	32.35
Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0.02	0,19	0,02	11.57	0,19	11.57
Insiden Rate kasus DBD per 100.000 penduduk	30.8	49	31.82	135.06	<49	135.06

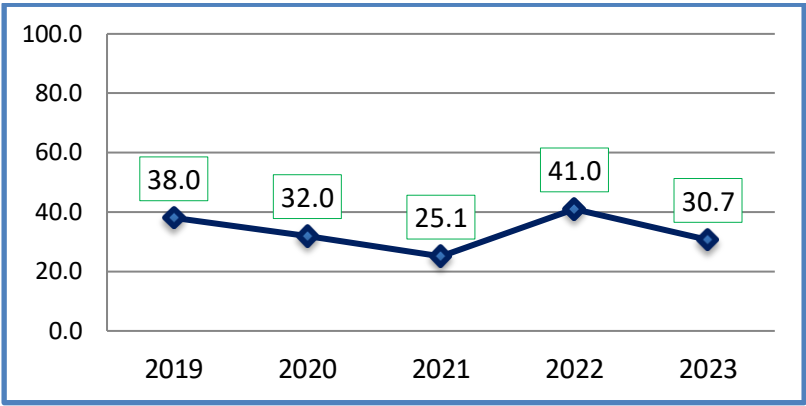
Indikator kinerja di atas, yakni insiden TB per 100.000 penduduk, *treatment coverage* pada pasien TB, dan insiden HIV per 1.000 penduduk di nilai dengan semakin tinggi nilai realisasi maka indikator dianggap semakin berhasil, sedangkan indikator insiden rate kasus DBD per 100.000 penduduk dapat dijelaskan bahwa semakin menurun nilai realisasi maka semakin berhasil indikator tersebut. Pembahasan indikator kinerja di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Insiden TB per 100. 000 penduduk

Saat ini Tuberkulosis masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di dunia. Berdasarkan Global TB Report, Indonesia merupakan negara dengan estimasi kasus TB tertinggi ke dua setelah India, dengan estimasi kasus 1.060.000 kasus dan angka kematian mencapai 134.000 per tahun. Kabupaten Lampung menargetkan insiden TB per 100.000 penduduk pada tahun 2023 sebesar 231 per 100.000 penduduk. Capaian kinerja indicator tersebut sebesar 98.29 per 100.000 penduduk, atau sebesar 42.55% bila dibanding target tahun 2023 dan turun bila dibandingkan capaian tahun 2022 (129 per 100.000 penduduk).

Sedangkan persentase penemuan dan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 hanya sebesar 30,7% (1.042 kasus) dari target 90%, turun bila dibandingkan capaian tahun 2022 yakni 41 %, dengan proporsi terbanyak penderita berjenis kelamin laki-laki (61,7%). Perkembangan penemuan dan pengobatan TB di Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

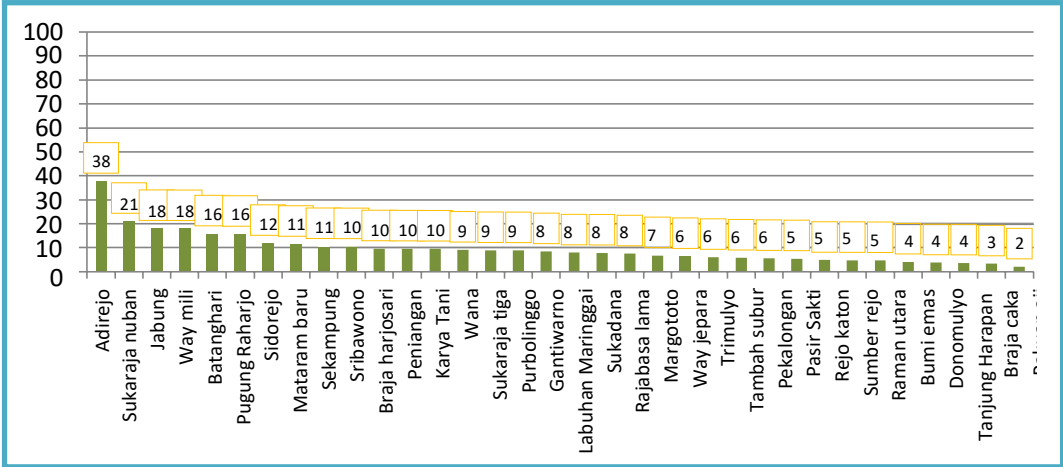
Grafik 2.2.21
Persentase Penemuan dan Pengobatan TB Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2019 sd 2023



Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

Adapun sebaran penemuan dan pengobatan TB Per Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.2.22
Sebaran Persentase Kasus TBC terhadap Jumlah Terduga TBC Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2023



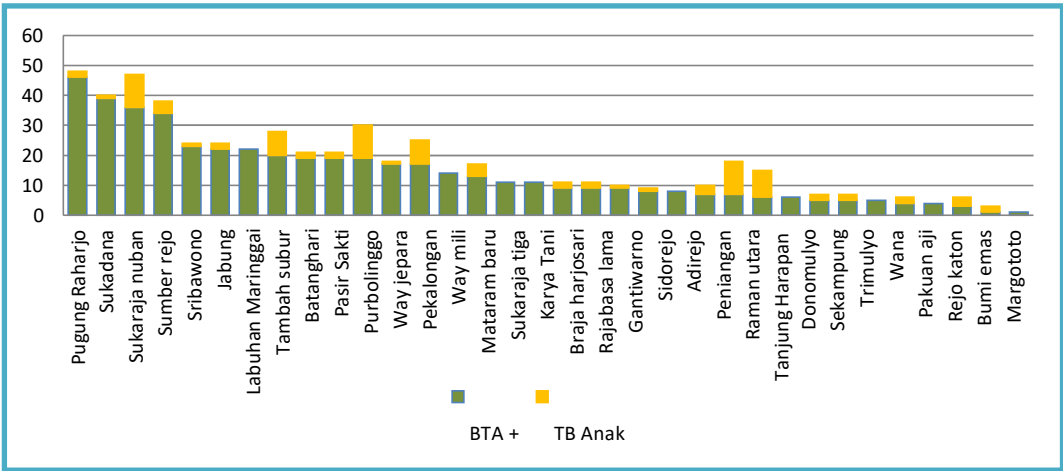
Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Temuan kasus tersebut tersebar di 34 Puskesmas dengan persentase temuan kasus tertinggi berasal dari wilayah Puskesmas Adirejo (38% dari jumlah terduga), sedangkan capaian terendah dari Puskesmas Pakuan Aji (2%).

Selain temuan kasus TBC di atas, pada tahun 2023 masih ditemukan 97 kasus TB anak 0-14 tahun atau dengan cakupan penemuan sebesar 22,5%, lebih rendah bila dibanding jumlah kasus TB anak tahun 2023 (110 kasus; 43,14%). Masih tingginya kasus Tuberculosis anak menggambarkan adanya sumber pajanan kepada anak terutama dari orang dewasa yang infeksius. Resiko timbulnya transmisi kuman dari orang dewasa ke anak akan lebih tinggi jika pasien dewasa tersebut terkonfirmasi bakteriologis positif, infiltrat luas atau kavitas pada lobus atas, produksi sputum banyak dan encer, batuk produktif dan kuat serta terdapat faktor lingkungan yang kurang sehat terutama sirkulasi udara yang tidak baik.

Sebaran kasus TBC anak menyebar di 25 Puskesmas (73,5%) dengan kasus tertinggi berasal dari wilayah Puskesmas Raman Utara, Purbolinggo dan Puskesmas Sukaraja Nuban (11 kasus). Bila dihubungkan dengan temuan jumlah kasus tuberculosis paru terkonfirmasi bakteriologis, maka sebaran kasus TBC anak dengan jumlah kasus terkonfirmasi bakteriologis, sebagai berikut :

Grafik 2.2.23
 Persentase Kasus Tuberculosis Anak (0-14 Tahun) Terhadap Jumlah Kasus TBC Terkonfirmasi Bakteriologis Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

2) Treatment Coverage pada pasien TB

Salah satu upaya untuk mengendalikan tuberkulosis yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis adalah angka kesembuhan (*cure rate*), angka pengobatan lengkap (*complete rate*) dan angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*).

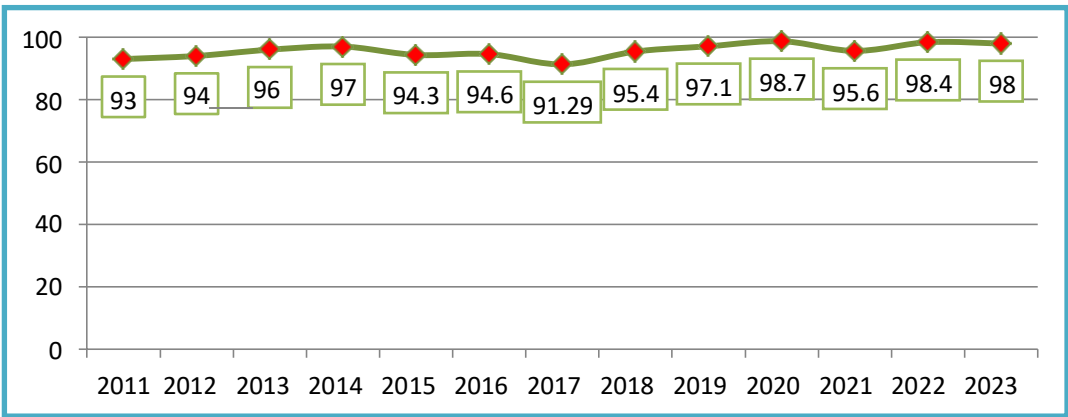
Angka kesembuhan di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sebesar 48,9% dari jumlah kasus terkonfirmasi bakteriologi, angka pengobatan lengkap sebesar 77,6% dan angka keberhasilan pengobatan (*succes rate*) semua kasus tuberculosis di Kabupaten

Lampung Timur tahun 2023 sebesar 98%. Capaian *sukses rate* tersebut tidak jauh berbeda dengan capaian tahun 2022 (98,4%) dan telah mencapai target 90%.

Angka keberhasilan pengobatan merupakan jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angkaini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis.

Hal tersebut memberi gambaran bahwa standar pengobatan pasienTBC di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur cukup baik. Perkembangan Angka keberhasilan pengobatan penderita TB Paru di Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

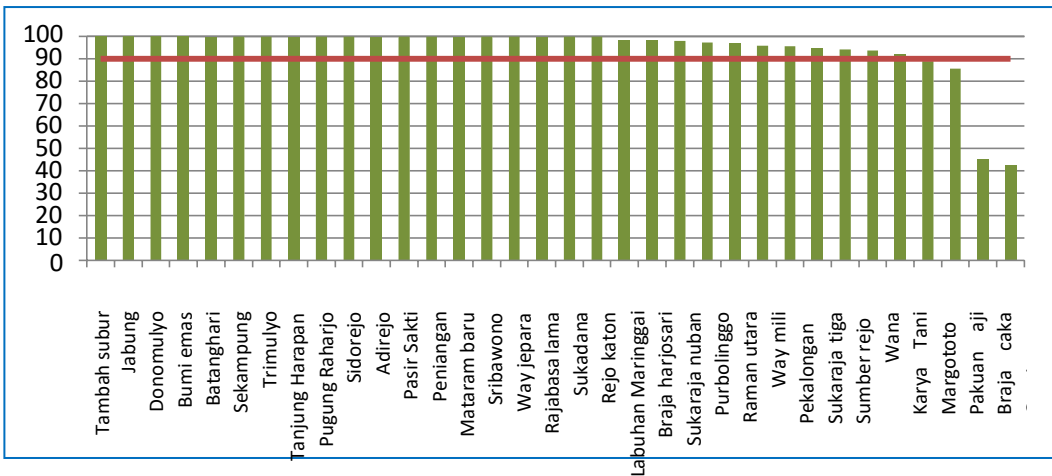
Grafik 2.2.24
Angka Keberhasilan Pengobatan (*Succes Rate/CS*) Semua Kasus Tuberculosis Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2023



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Sebaran *sukses rate* semua kasus Tuberculosis berdasarkan Puskesmas tergambar pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2.2.25
Sebaran *Succes Rate/CS* Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Dari grafik di atas terlihat bahwa sebagian besar Puskesmas telah mencapai target *Success Rate* (98%), dan terdapat 4 Puskesmas yang belum mencapai target yakni Puskesmas Labuhan Maringgai dan Puskesmas Margototo, Pakuan Aji, Braja Caka, Ganti Warno.

Pada tahun 2023 dilaporkan 15 (1,4%) kasus kematian selama pengobatan TBC, jumlah tersebut turun bila di banding jumlah kasus kematian tahun 2022 yakni 17 (1,6%), Persentase kematian tertinggi berasal dari wilayah Puskesmas Adirejo (9,1%).

Penyebab dari rendahnya capaian kedua indikator di atas, yakni Insiden TB per 100.000 penduduk dan *Treatment Coverage* pada pasien TB antara lain:

1. Terlambatnya dropping TCM ke Kabupaten Lampung Timur
2. Keterlambatan dropping dan pengadaan reagen yang digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis.
3. Kurang maksimalnya penjangkauan aktif kasus TB terutama ke populasi beresiko seperti sekolah dan pondok pesantren karena keterbatasan anggaran operasional.
4. Sosialisasi program TBC di masyarakat dan penjangkauan kasus di Unit Pelayanan Kesehatan tingkat Puskesmas belum maksimal dan belum tepat sasaran;
5. Lemahnya system pencatatan dan pelaporan TBC;
6. Praktek swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas belum melaporkan secara rutin untuk temuan terduga TBC nya dan masih ada yang mengobati tanpa menggunakan standar DOTS ;
7. Adanya pasien TB yang berobat keluar wilayah Kabupaten Lampung Timur dan tidak tercatat
8. Penyisiran data ke Rumah Sakit dan praktek swasta belum maksimal;
9. Keterlibatan dan peran serta Lembaga Masyarakat dan kader kesehatan belum maksimal dalam program TBC.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala rendahnya capaian Insiden TB per 100.000 penduduk dan *Treatment Coverage* tersebut antara lain:

1. Peningkatan kapasitas pengelola program TB
2. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang tepat sasaran;
3. Sosialisasi terkait program TBC kepada semua tim puskesmas melalui kegiatan lokmin maupun kegiatan lain, sehingga dari isu program terkini tersampaikan;
4. Membuat regional pembagian per fasyankes dalam pengiriman sampel TCM;
5. Menjamin ketersediaan OAT yang cukup.
6. Melaporkan hasil capaian program secara berkala ke pimpinan baik tingkat Puskesmas sampai dengan tingkat Kabupaten;
7. Meningkatkan kordinasi dengan Rumah Sakit maupun praktek swasta yang ada di wilayah kerja puskesmas;
8. Peningkatan pelayanan akses TBC yang bermutu

9. Program pengendalian TBC diarahkan menuju akses universal terhadap pelayanan TBC yang berkualitas dengan upaya kegiatan Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) untuk semua pasien TBC
10. Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

3) Insiden HIV per 1.000 penduduk yang terinfeksi HIV

HIV/ AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang secara epidemi mempunyai fenomena seperti gunung es dimana keadaan yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tercatat dan dilaporkan. Hal ini sebagai akibat dari sistem pelaporan yang belum sempurna, masih tingginya stigma di masyarakat terhadap penyakit ini sehingga masih banyak masyarakat yang menyembunyikan penyakitnya serta penjarangan kasus di layanan kesehatan yang masih sangat terbatas. Kondisi epidemi di Lampung Timur bergerak rendah ke epidemi terkonsentrasi, sehingga sasaran bukan hanya pada orang berisiko tetapi pada populasi berisiko yaitu ibu hamil, pasien TBC, WBP dan populasi kunci.

SPM bidang kesehatan mengamanatkan bahwa setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV wajib mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 100%. Pelayanan kesehatan sesuai standar yang dimaksud meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining. Edukasi yang diberikan adalah tentang perilaku berisiko dan pencegahan penularan, sedangkan skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan HIV adalah orang dengan risiko terinfeksi virus HIV antara lain ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, penaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/ waria, pengguna narkoba suntik, dan warga binaan.

Kabupaten Lampung Timur telah melakukan berbagai upaya terkait program HIV AIDS & PIMS diantaranya dengan mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) baik di lingkungan masyarakat dan petugas kesehatan, mempercepat pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS & PIMS pada kelompok risiko tertular, ibu dan anak, memudahkan ODHA untuk memperoleh obat *Anti Retroviral* (ARV), layanan IMS serta dukungan baik melalui petugas kesehatan maupun lembaga yang aktif terhadap HIV AIDS. Terbentuknya Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) / Perawatan Dukungan dan Pengobatan di Puskesmas Tambak Subur, Braja Harjosari dan Mataram Baru sejak akhir tahun 2016 dan pada akhir tahun 2020 menambah 3 layanan baru yaitu Puskesmas Pasir Sakti, Puskesmas Trimulyo dan Puskesmas Pugung Raharjo, merupakan prestasi dan upaya mendekatkan akses ODHA yang akan memulai terapi ARV, yang sebelumnya ke RSUD Abdoel Moeleok Bandar Lampung.

Selain itu, seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur juga merupakan klinik VCT/ IMS yang dapat melayani pemeriksaan HIV/ AIDS pos konseling pada

populasi kunci dan ibu hamil. Puskesmas juga telah melakukan kerjasama dengan Bidan dan Bidan Desa untuk melakukan skrining tes HIV/ AIDS pada ibu hamil baik pada saat melakukan ANC maupun pada saat kegiatan kelas ibu. Prosedur yang dilakukan adalah bahwa ketika hasil tes reaktif, hasil tes dari Bidan/ Bidan Desa tersebut tetap harus dikonfirmasi ulang ke Puskesmas atau Puskesmas LKB guna dilakukan pemeriksaan dan ditata laksana lebih lanjut.

Upaya penemuan kasus HIV/ AIDS di Kabupaten Lampung Timur juga dilakukan secara aktif, baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh tenaga non kesehatan. Upaya penemuan kasus oleh tenaga non kesehatan dilakukan oleh kader maupun masyarakat peduli HIV diantaranya dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam Community TB HIV Care, juga melalui pemberdayaan peran serta masyarakat melalui kelompok kunci. Bentuk nyata dari kegiatan penemuan kasus melalui pemberdayaan peran serta masyarakat tersebut adalah dengan terlibatnya ODHA, pemilik warung, pemilik karaoke serta beberapa mucikari dalam penjangkaran kasus.

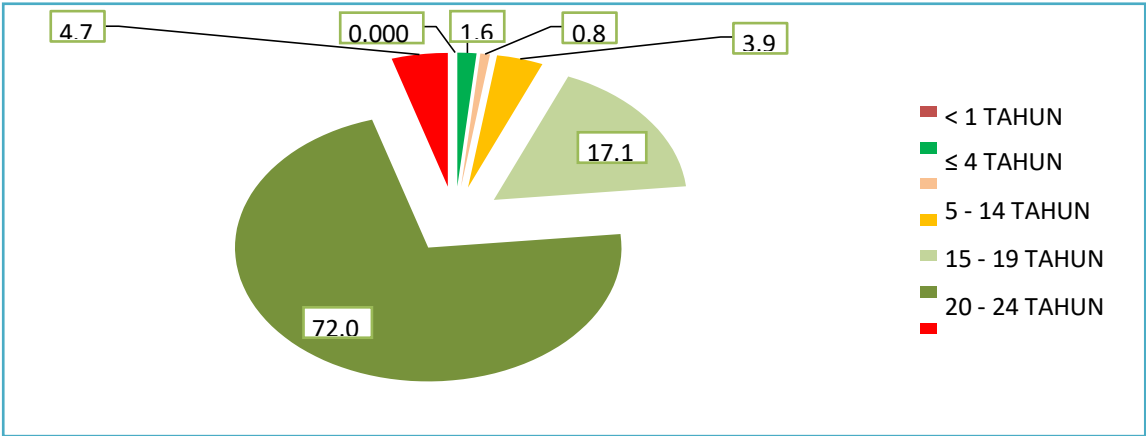
Estimasi orang beresiko terinfeksi HIV/ AIDS di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 berjumlah 20.954 orang, sedangkan jumlah orang beresiko yang mendapat pelayanan sesuai standar berjumlah 14.677 orang (70%). Capaian tersebut menetap bila dibanding tahun 2022 (70,1), namun belum mencapai target SPM 100%.

Pencapaian pelayanan kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV/ AIDS terbantu pada sasaran seperti ibu hamil, pasien TBC dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) karena merupakan kelompok yang paling mudah untuk dilakukan skrining dengan pendekatan program Tes Inisiatif Petugas Kesehatan (TIPK). Namun kondisi tersebut masih memerlukan upaya dan strategi agar dapat tercapai, karena berdasarkan laporan, sasaran yang mudah untuk dicapai sebagaimana disebut di atas juga belum mencapai target. Hal ini terjadi karena tidak semua data dilaporkan melalui aplikasi pelaporan yang tersedia.

Jumlah kasus HIV tahun 2023 berjumlah 257 orang, dengan proporsi penderita laki-laki lebih banyak (65,8%) bila dibanding penderita perempuan. Pola demikian menetap sejak tahun 2019. Sedangkan karakteristik berdasarkan kelompok umur, proporsi penderita AIDS yang ditemukan sebagian besar pada kelompok umur 25-49 tahun (72,0%), dimana rentang usia tersebut merupakan kelompok usia produktif. Tingginya kasus pada usia produktif lebih rentan terhadap perilaku seks yang tidak aman dan penggunaan napza suntik, sedangkan kasus pada kelompok usia 1-4 tahun menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak.

Gambaran penderita baru AIDS berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.2.26
Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Kelompok UmurKabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

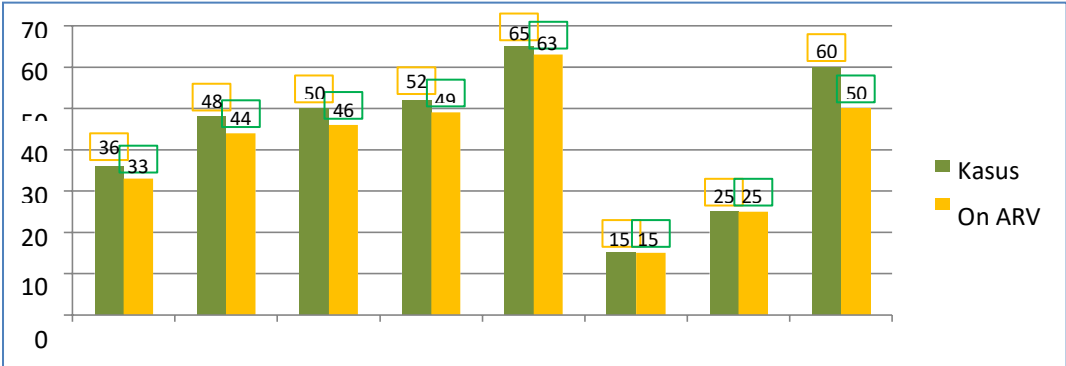


Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Pada tahun 2023, dilaporkan 60 kasus ODHIV baru, dan 83% dari jumlah kasus baru tersebut telah mendapatkan pengobatan ARV (*Anti Retro Viral*), belum mencapai target pemberian ARV 95%. Pemberian obat *Anti Retro Viral* (ARV) bertujuan untuk menghambat perburukan infeksi oportunistik yang dimungkinkan muncul pada pasien, meningkatkan kualitas hidup ODHA dan menurunkan sampai dengan tidak terdeteksinya jumlah virus (viral load) HIV dalam darah setiap Orang Dengan HIV AIDS (ODHA).

Gambaran Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang sudah on ARV di Kabupaten Lampung Timur dapat tergambar dari grafik dibawah ini:

Tabel 2.2.27
Capaian Orang Dengan HIV AIDS Yang Sudah Therapi ARV
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 – 2023



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.

Orang yang terinfeksi HIV memerlukan tatalaksana yang tepat dan memerlukan ARV untuk enekan jumlah virus HIV dalam tubuh, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup ODHA dan mencegah perubahan status dari HIV menjadi AIDS.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Lampung Timur antara lain, sebagai berikut:

1. Belum terpetakannya sasaran populas kunci (Waria, Pekerja Seks, Penasun, LSL) secara pasti di masing-masing puskesmas. Pemetaan Tahun 2023 hanya melibatkan 6 Wilayah di Kabupaten Lampung Timur.
2. Belum semua PDP yang baru dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai tempat pengobatan HIV ;
3. Keterbatasan SDM Puskesmas karena beberapa pengelola HIV juga sebagai petugas surveilans dan vaksinator Puskesmas.
4. Belum maksimalnya Puskesmas dalam menginput capaian yang sudah terskrining HIV maupun IMS melalui aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) versi 1.7;
5. Masih banyak *Under Reporting* dalam pelaporan Program HIV;
6. Pemeriksaan HIV masih berkulat pada pemeriksaan ibu hamil dan masih banyak yang belum menyentuh populasi kunci;
7. Belum maksimalnya kerjasama lintas sektor dalam penjangkaran kasus maupun sosialisasi terkait penanggulangan HIV AIDS & PIMS (PMI, Sosnakertrans, Kementerian Agama dan lain-lain).

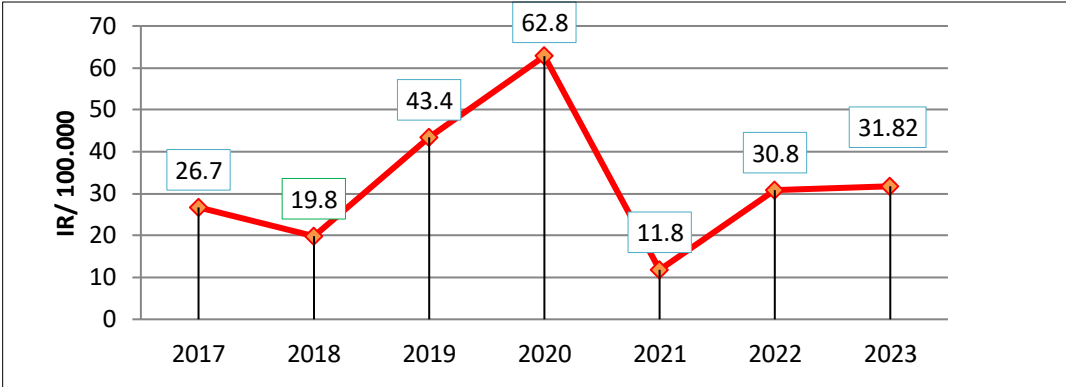
Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan melaksanakan proses kegiatan yang dapat mendukung peningkatan capaian program dan SPM baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sendiri maupun fasyankes/ puskesmas, diantaranya yaitu :

1. Pemetaan populasi kunci ditingkat puskesmas;
2. Penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektoral
3. Kaderisasi layanan *Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP)* di puskesmas dan Rumah Sakit;
4. Penambahan layanan *Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP)* yang dimulai dengan mengikuti pelatihan;
5. Penguatan jejaring dengan lintas sektor terkait program HIV AIDS;
6. Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
7. KIE (Komunikasi Informasi & Edukasi) pencegahan, penanggulangan & pengendalian HIV/AIDS ke masyarakat;
8. Penyuluhan pengetahuan komprehensif pencegahan, penanggulangan & pengendalian HIV/AIDS ke sekolah;
9. Mobile Konseling Tes Sukarela (KTS);
10. Mobile Lapas dalam rangka pemeriksaan HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP);
11. Pendampingan bagi ODHA yang *Loss To Follow Up*.

4) Insiden Rate kasus DBD per 100.000 penduduk

Penyakit DBD termasuk diantara *emerging diseases* yang sampai saat ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama dan berpotensi menimbulkan KLB. Penyakit ini dapat muncul di sepanjang tahun dan dapat menyerang semua umur dan sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang spesifik. Jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 berjumlah 361 kasus atau dengan atau dengan *Incidence Rate/ IR* 31.82 per 100.000 penduduk, meningkat bila dibanding jumlah kasus tahun 2022 (324 kasus dengan *Incidence Rate/ IR* 30,8 per 100.000 penduduk), namun bila dibandingkan target Kabupaten dan target RPJMD <49%, indikator tersebut telah mencapai target sebesar 135.06%. Adapun perkembangan Insiden Rate kasus DBD per 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut :

Grafik 2.2.28
*Insiden Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2016-2023*



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Walaupun telah mencapai target kinerja, namun beberapa kendala masih dihadapi dalam upaya pencapaian indikator *Insiden Rate (IR)* Demam Berdarah Dengue (DBD) di atas, antara lain adalah:

1. Terdapat daerah endemis DBD di Kabupaten Lampung Timur yakni di wilayah Kecamatan Pasir Sakti, Batanghari, Sekampung Udik, Labuhan Maringgai, Gunung Pelindung, Pekalongan dan Purbolinggo.
2. Kasus DBD terkait faktor manusia dan budaya, hal ini terkait dengan infra struktur yang kurang diperhatikan dan tidak terpeliharanya kebersihan seperti sarana air bersih, sarana pembuangan sampah, banyak terkumpulnya barang-barang bekas dan berbagai macam jenis tanaman yang dapat menampung air dan menjadi tempat perkembang biakan nyamuk penular DBD.
3. Mobilitas manusia, kepadatan penduduk dan pemukiman, urbanisasi yang tidak terkendali
4. Opini yang ada di masyarakat yang masih menganggap Fogging/pengasapan adalah cara pencegahan
5. Factor agen dan virulensi virus DBD

6. Faktor musim terutama musim penghujan dan geografis yang mendukung perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti* sebagai vector DBD
7. SOP dan pelaksanaan surveilans kasus masih belum maksimal
8. Alokasi anggaran dan sarana prasarana terbatas
9. Peran serta lintas sector terhadap pengendalian DBD masih kurang.

Dinas kesehatan telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masih tingginya *Insiden Rate (IR)* Demam Berdarah Dengue (DBD) yaitu :

1. Penyebarluasan informasi DBD di forum-forum pertemuan lintas sektoral
2. Antisipasi musim penularan melalui kolaborasi lintas program dan lintas sektoral.
3. Pengendalian sebelum musim penularan melalui optimalisasi gerakan PSN 3M plus dan larvasida dengan lintas sektoral terkait dan penyuluhan.
4. Mengoptimalkan penyelidikan epidemiologi kasus DBD dan atau suspect DBD oleh petugas Puskesmas.
5. Pengendalian Sebelum Musim Penularan meliputi kegiatan penyuluhan, Gerakan PSN 3M Plus dan larvasidasi bersama lintas program dan sektor.
6. Penanggulangan fokus pada titik kasus temuan DBD.
7. Kegiatan Monitoring dengan pengumpulan data dan informasi sehingga dapat dilakukan penilaian dan identifikasi masalah dalam pengambilan arah kebijakan.
8. Koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan DBD melalui surat edaran tentang kewaspadaan peningkatan DBD kepada kepala Puskesmas/RS dan pejabat kecamatan/desa sebelum musim-musim penularan.
9. Pelaksanaan Fogging Fokus pada daerah lokus DBD
10. Tatalaksana kasus dan rujukan pada kasus DBD

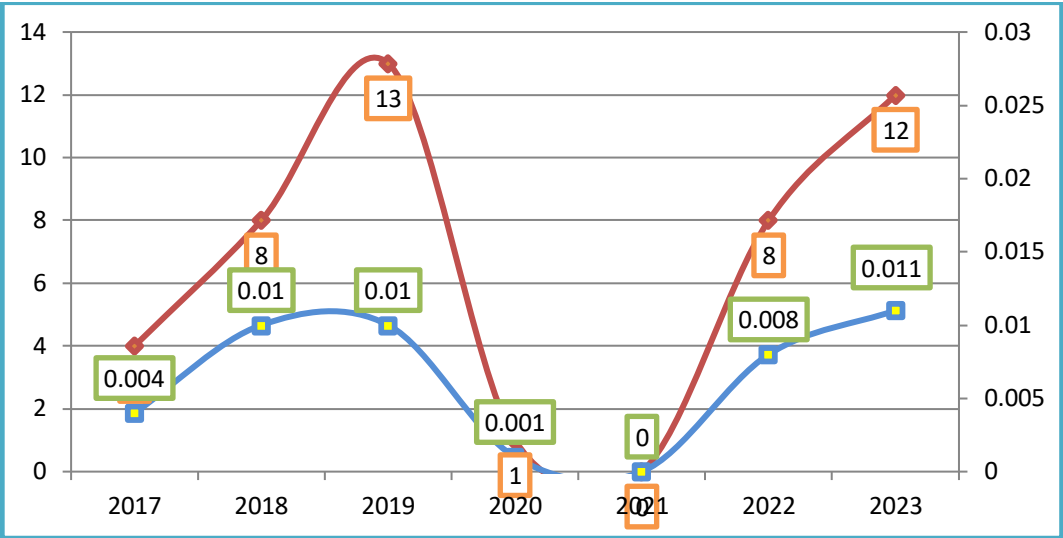
5) Kasus Malaria

Sasaran program Malaria adalah penemuan dan pengobatan kasus dengan kegiatan utama terdiri dari (1) peningkatan kualitas dan akses terhadap penemuan dini dan pengobatan Malaria (2) penjaminan kualitas diagnosis Malaria melalui pemeriksaan laboratorium melalui *Rapid Diagnostic Test (RDT)*, (3) perlindungan terhadap kelompok rentan terhadap ibu hamil dan balita di daerah endemis tinggi, (4) penguatan penanganan KLB dan surveillens (5) intervensi vektor termasuk surveillens vektor dan (6) penguatan sistem pengelolaan logistik Malaria.

Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan sertifikat sebagai daerah Eliminasi Malaria sejak tanggal 12 November 2017. Sistem informasi Elektronik Malaria (SISMAL) dapat menginformasikan penderita malaria yang sedang sakit/dirawat diluar Lampung Timur dan telah terjalin konektivitas sistem informasi di Provinsi Lampung maupun luar Provinsi Lampung. Jika ada penderita Malaria yang sedang dirawat diluar

Kabupaten Lampung Timur, maka Fasilitas Kesehatan/Dinas Kesehatan setempat akan menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Lampung Timur dan selanjutnya akan dilakukan Penyelidikan Epidemiologi sesuai alamat untuk memastikan sumber penularan, vektor malaria dan pemetaan daerah reseptif Malaria. Perkembangan kasus Malaria positif di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 sd 2023 sebagai berikut :

Grafik 2.2.29
Trend Malaria Positif Terkonfirmasi Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2017-2023



Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Perkembangan Malaria positif di Kabupaten Lampung Timur meningkat tajam setelah 0 kasus pada tahun 2021 menjadi 8 kasus pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 12 kasus. Namun berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan bahwa semua kasus positif Malaria di Kabupaten Lampung Timur yang ditemukan merupakan kasus Import (terinfeksi diluar wilayah Lampung Timur). Oleh karena itu, harus diwaspadai dengan meningkatkan upaya *skrining* dengan menjangring sebanyak mungkin *suspect* dan melakukan penyelidikan epidemiologi pada semua kasus terkonfirmasi positif. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat di Kabupaten Lampung Timur terbebas dari penyakit malaria dan mempertahankan status sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil mengeliminasi malaria sebagaimana dinyatakan melalui sertifikat eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017. Pada tahun 2023, seluruh penderita kasus positif malaria di Kabupaten Lampung Timur telah mendapat pengobatan sesuai standar, sehingga tidak ada kasus meninggal (*CFR*: 0,00%).

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang mencapai ending AIDS, Tuberkulosis (TBC) dan Malaria (ATM) pada Tahun 2030, Kabupaten Lampung Timur memiliki komitmen yang kuat dalam pencegahan dan pengendalian ATM tersebut. Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur telah memulai upaya koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari

keterlibatan perangkat daerah terkait, Pemerintah Desa, maupun dari lembaga lainnya antara lain BAZNAS, dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC) dan Malaria di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun upaya koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan pada tahun 2023 dan tahun 2024 antara lain pemetaan anggaran yang dapat digunakan dalam pencegahan dan pengendalian ATM pada beberapa Perangkat Daerah terkait, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ATM, melakukan sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian ATM yang dilakukan melalui kolaborasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dengan Dinas Kesehatan, menetapkan 25 desa percontohan dalam pencegahan dan pengendalian ATM dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk memastikan adanya pemanfaatan dana desa dalam kegiatan pencegahan pengendalian ATM di desa tersebut serta berkoordinasi dengan BAZNAS (Badan Amil dan Zakat Nasional) Lampung Timur dan CSR terkait dengan program bantuan untuk intervensi pencegahan dan pengendalian ATM di Kabupaten Lampung Timur. Berikut nama-nama Desa yang menjadi lokus ATM di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023.

Tabel 2.2.9
Desa Lokus AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM)
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA
1	Pasir Sakti	Pasir Sakti	1 Pasir Sakti
			2 Sumur Kucing
			3 Purworejo
			4 Kedung ringan
			5 Mulyosari
2	Mataram Baru	Mataram Baru	1 Mataram Baru
			2 Mandala Sari
			3 Tulung Pasik
			4 Rajabasa Baru
			5 Kebun Damar
3	Bandar Sribhawono	Sribhawono	1 Bandar Agung
			2 Sri menanti
			3 Sribhawono
			4 Sadar Sriwijaya
			5 Sri pendowo
4	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	1 Gunung Pasir Jaya
			2 Pugung Raharjo
			3 Bojong
			4 Banjar Agung

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA
			5 Mengandung Sari
5	Way Bungur	Tambah Subur	1 Toto Mulyo
			2 Taman Negeri
			3 Tegal Ombo
			4 Tanjung Qencono
			5 Tanjung Tirta

Sumber : Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

6) Penyakit Tidak Menular

Dilihat dari beban penyakit (*diseases burden*) yang diukur dengan *Disability Adjusted Life Years* (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3% pada tahun 1990 menjadi 23,6% pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8% pada tahun 1990 menjadi 69,9% pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9% pada tahun 1990 menjadi 6,5% pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas (Kementerian Kesehatan, 2020).

Hasil Survey Kesehatan Indonesia tahun 2023 melaporkan bahwa di Provinsi Lampung prevalensi kanker berdasarkan diagnosa Dokter sebesar 1,2%, prevalensi Diabetes Mellitus penduduk >15 tahun berdasarkan berdasarkan diagnosa Dokter 1,6%, penyakit jantung berdasarkan Diagnosa Dokter 0,58%, dan prevalensi Hipertensi berdasarkan Diagnosa Dokter 7,4%. Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continuum of care*.

5. SASARAN STRATEGIS 4

Sasaran strategis 4 yaitu **“Meningkatnya kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan”** yaitu di atas merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur”**. Untuk mencapai sasaran strategis di atas, Dinas Kesehatan menetapkan 2 indikator kinerja di Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat capaian kinerja sasaran strategis keempat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.10
Perbandingan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Tahun 2022	2023			Akhir RPJMD	
		Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Target (%)	target	Realisasi Terhadap Target (%)
Indeks Keluarga Sehat	0,21	0,38	0,23	60.53	0.52	44.23
Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	59.5	40	42	154.35	55	112.25

Indikator kinerja di atas, yakni indeks keluarga sehat dan persentase desa siaga aktif dengan strata purnama mandiri di nilai dengan semakin tinggi nilai realisasi maka indikator dianggap semakin berhasil. Pembahasan indicator kinerja di atas, sebagai berikut:

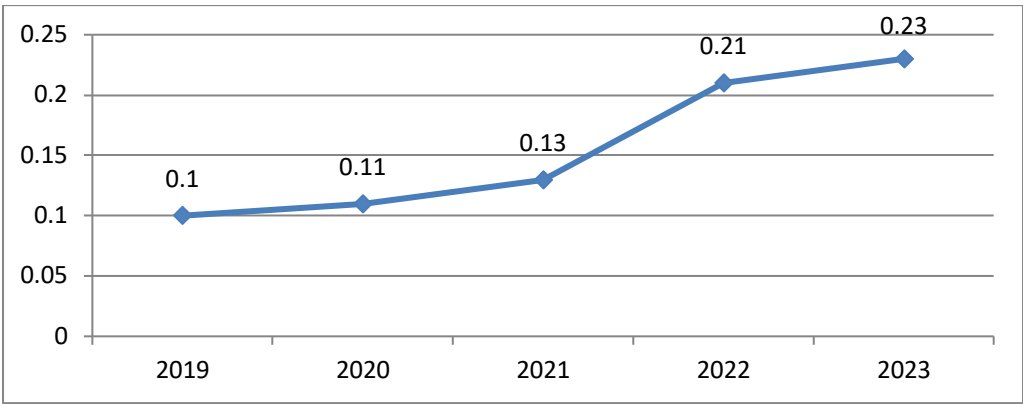
1) Indeks Keluarga Sehat

Pendataan keluarga dalam rangka Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) telah dilakukan sejak tahun 2016 terutama di 9 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, pendataan keluarga sehat mulai dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Indikator keluarga sehat terdiri dari 12 indikator, yakni: 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3)Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6)Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8)Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9)Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pendataan dapat dientri pada aplikasi Keluarga Sehat. Hasil pendataan keluarga yang telah dientri pada aplikasi Keluarga Sehat dapat dilihat pada status pendataan yang dapat menampilkan jumlah keluarga yang telah terdata dan Indeks Keluarga Sehat (IKS). Kabupaten Lampung Timur menargetkan capaian IKS sebesar 0,38% pada tahun 2023, namun capaian indikator IKS baru sebesar 0,23% yakni 60.53% dari target Kabupaten atau 44.23%.

Namun demikian, capaian kinerja IKS mempunyai trend yang meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.2.30
Perkembangan Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019-2023



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator IKS di Kabupaten Lampung Timur, diantaranya:

1. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan progra PISPK dan pemanfaatan anggaran integrasi tidak optimal.
2. Cakupan entry data di Puskesmas masih rendah sehingga mempengaruhi capaian
3. Definisi Operasional berbeda antara indikator PISPK dengan Program
4. Belum tersusunnya intervensi lanjut secara terpadu dan terintegrasi
5. Capaian indicator keluarga sehat masih rendah, terutama untuk indicator anggota keluarga tidak ada yang merokok (40.8%), penderita hipertensi yang berobat teratur (43.3%) dan penderita TB paru yang berobat sesuai standar (45%).
6. Koordinasi antara pengelola program yang terkait dengan indicator PIS-PK belum optimal.
7. Tim Binwil dan Lintas program belum memanfaatkan hasil analisis PIS-PK
8. Pergantian dan mutasi petugas pengelola PISPK.

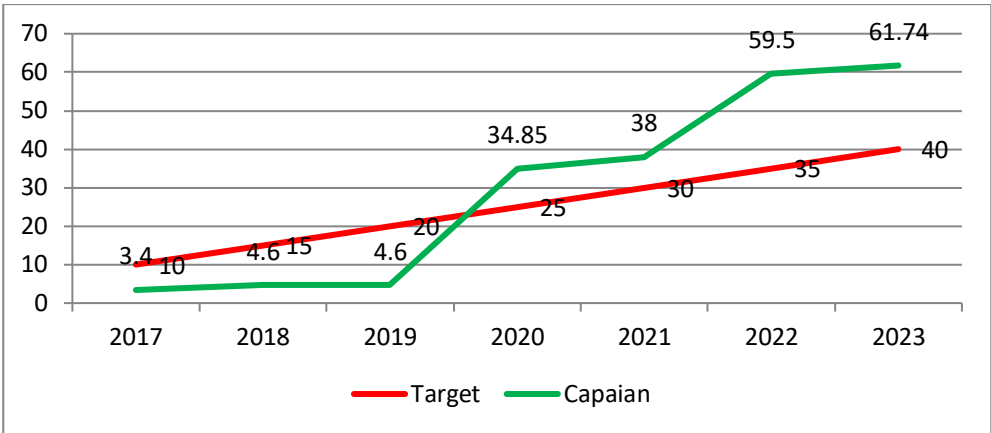
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala capaian indikator IKS yang masih rendah adalah:

1. Menyediakan kesempatan bagi Pengelola PISPK baru yang akan belajar/konsultasi tentang teknis program dan belajar mengoperasikan Aplikasi Keluarga Sehat
2. Optimalisasi Tim Bina Wilayah Kabupaten
3. Kepala Puskesmas melakukan monitoring kepada Pelaksana PISPK (Penanggung Jawab dan pengampu 12 indikator PISPK, serta melakukan verifikasi ke Desa sesuai ketentuan
4. Kepala Puskesmas bersama Tim Binwil menyusun rencana integrasi keuangan untuk mendukung kekosongan anggaran
5. Melakukan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas secara berkala

2) Pesentase Desa Siaga Aktif dengan Strata Purnama Mandiri

Indikator kinerja persentase desa siaga aktif strata purnama mandiri di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 mencapai 61.74% dari target Kabupaten 40% atau 163 dari 264 desa. Indikator kinerja persentase desa siaga aktif strata purnama mandiri pada tahun 2023 yaitu mencapai 154% bila dibandingkan dengan target 2023 atau 112.25% bila dibanding target akhir RPJMD. Perkembangan capaian desa siaga purnama mandiri sebagai berikut :

Grafik 2.2.31
Capaian Desa Siaga Mandiri dibandingkan Target Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2017-2023



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Strata desa siaga aktif purnama mandiri mengalami perkembangan cukup signifikan sejak tahun 2020 dan berada di atas target Kabupaten. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya aktif tim Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dan Puskesmas melakukan pembinaan dan pendampingan ke desa serta meningkatkan advokasi dan kerjasama dengan lintas terkait.

Berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan pencapaian indikator persentase desa siaga strata purnama mandiri antara lain:

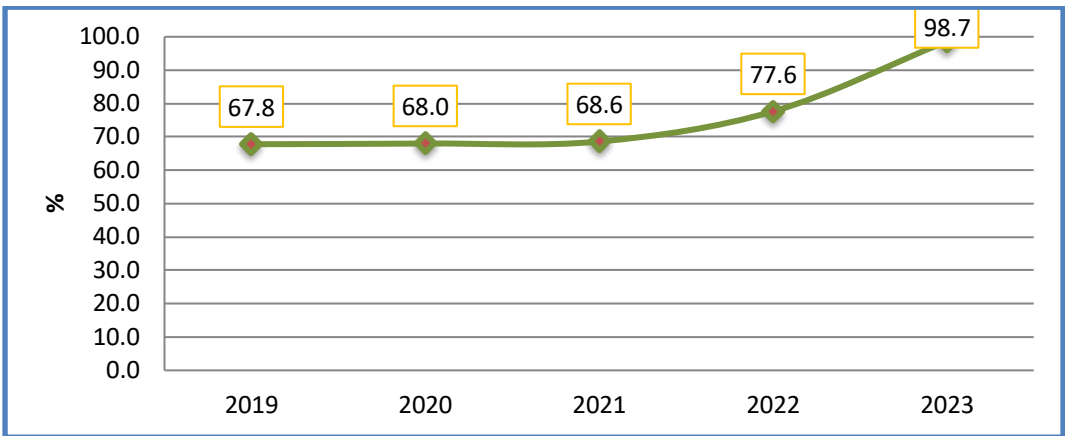
1. Masih banyak forum desa siaga yang belum berjalan semestinya,
2. Rendahnya capaian PHBS
3. Dukungan lintas sektor dan swasta belum optimal
4. Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan masih kurang.

3) Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2022 mencapai 77,6 % persen, dan pada akhir Desember tahun 2023 jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan berjumlah 1.089.288 peserta atau 98,7 %. Capaian

tersebut diapresiasi oleh BPJS Kesehatan sehingga Kabupaten Lampung Timur meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Berikut perkembangan kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir :

Grafik 2.2.32
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 sd 2023



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Sebagian besar peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 merupakan peserta PBI yaitu mencapai 839.327 jiwa atau 73,8%, sedangkan peserta non PBI hanya 22,2%. Masalah yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan jaminan kesehatan penduduk diantaranya adalah kesadaran masyarakat sehat untuk ikut menjadi peserta BPJS masih sangat rendah mengingat peserta mandiri yang mendaftar sebagian besar adalah mereka yang sedang dalam perawatan/sakit, rendahnya kesadaran masyarakat membayar iuran secara tertib dan tepat waktu, ketidak akuratan data dan tidak maksimalnya updating data peserta PBI baik Pusat maupun Daerah. Untuk itu sebagai upaya untuk mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam program jaminan kesehatan, perlu dilakukan edukasi serta mendorong masyarakat yang mampu untuk mandiri dalam pembiayaan jaminan kesehatan.

D. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perkembangan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.11
Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2019 sd 2023

No.	Tenaga Kesehatan	Tahun					Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Pddk (Tahun 2023)	Target Rasio per 100.000 pddk
		2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Tenaga Medis							
	a. Dokter Spesialis	48	37	43	50	57	5	-
	b. Dokter Umum	111	144	124	134	139	12,2	100
	c. Dokter Gigi	11	10	12	11	15	1,3	20
2.	Tenaga Kebidanan/Keperawatan							
	a. Bidan	718	801	762	905	846	74,4	200
	b. Perawat	552	639	594	633	595	52,3	240
3.	Tenaga Kefarmasian (apoteker, tenaga teknis kefarmasian)	67	82	75	84	89	7,8	100
4.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	50	69	59	66	64	5,6	-
5.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	43	49	54	54	55	4,8	21
6.	Tenaga Gizi	44	44	43	50	51	4,4	35
7.	Tenaga Analis	59	59	76	71	73	6,4	35,4

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.2.10 di atas menunjukkan bahwa rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang belum sesuai standar ketenagaan minimal dan analisis beban kerja. Kabupaten Lampung Timur masih banyak membutuhkan SDM kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan tenaga farmasi, tenaga gizi, analis kesehatan, sanitarian, epidemiologi kesehatan, pranata laboratorium kesehatan, perekam medis dan administrator kesehatan untuk Puskesmas. Tenaga kesehatan strategis jumlahnya belum sesuai kebutuhan masyarakat serta distribusi ketenagaan/pegawai belum merata pada wilayah wilayah Puskesmas sehingga terjadi kesenjangan, demikian juga dengan kompetensi dan kualitas SDM Kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi.

Sedangkan kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas mengamanatkan bahwa Puskesmas harus memenuhi standar ketenagaan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. Jenis ketenagaan dimaksud meliputi Dokter dan/ atau Dokter Layanan Primer, Dokter gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Promosi Kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, apoteker dan/ atau tenaga teknis kefarmasian dan ATML. Pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 12 Puskesmas (35,29%) yang telah memenuhi standar 9 jenis tenaga. Walaupun belum memenuhi target 100% standar minimal pemenuhan tenaga di Puskesmas, namun persentase tersebut meningkat bila dibanding tahun 2022 (23,53%) dan tahun 2021 (14,7%). Berikut jumlah dan sebaran tenaga kesehatan per Puskesmas di Kabupaten Lampung

Timur pada tahun 2023 yaitu :

Tabel 2.2.12.
Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan jenis tenaga kesehatan menurut Puskesmas
di Kabupaten Lampung tahun 2023

No.	Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan									
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Farmasi	Kemas	Kesling	Gizi	Teklabmed	Jumlah
1	MARGOTOTO	4	-	10	24	2	1	2	2	3	48
2	BATANGHARI	1	1	14	30	3	2	1	1	3	56
3	BUMI EMAS	2	-	10	17	2	1	2	1	1	36
4	SEKAMPUNG	3	-	15	23	2	-	1	2	2	48
5	TRI MULYO	3	-	8	26	2	1	1	1	1	43
6	SUKARAJA TIGA	2	-	15	19	1	1	1	1	2	42
7	TANJUNG HARAPAN	2	-	15	17	1	2	2	1	2	42
8	PUGUNG RAHARJO	5	1	13	30	2	3	2	2	1	59
9	SIDOREJO	2	-	10	22	3	2	1	1	1	42
10	JABUNG	2	1	15	25	2	3	1	1	1	51
11	ADIREJO	2	-	4	19	1	1	1	1	1	30
12	PASIR SAKTI	4	-	13	23	2	3	1	2	1	49
13	SUMBER REJO	3	1	16	25	2	2	1	2	1	53
14	PENIANGAN	2	-	12	18	2	2	1	1	2	40
15	LABUHAN MARINGGAI	3	1	15	27	3	2	1	1	2	55
16	KARYA TANI	3	-	6	17	2	1	2	-	1	32
17	MATARAM BARU	2	-	8	18	2	2	1	1	1	35
18	SRIBAWONO	3	1	14	24	2	4	1	2	2	53
19	WANA	2	-	11	17	2	3	-	1	1	37
20	WAY MILI	3	-	11	21	2	2	2	1	1	43
21	WAY JEPARA	4	1	23	30	2	1	3	2	2	68
22	BRAJA CAKA	2	-	11	13	2	2	2	1	1	34
23	BRAJA HARJOSARI	3	-	12	27	1	1	1	2	2	49
24	RAJABASA LAMA	2	-	2	18	2	1	-	1	1	27
25	SUKADANA	4	-	7	19	2	-	1	1	1	35
26	PAKUAN AJI	2	-	10	21	2	1	-	1	-	37
27	DONOMULYO	2	-	10	11	2	-	-	1	1	27
28	SUKARAJA NUBAN	3	-	11	29	2	3	1	2	1	52
29	PEKALONGAN	3	1	10	25	3	1	1	1	1	46
30	GANTI WARNO	2	1	5	5	1	1	1	1	1	18
31	RAMAN UTARA	2	1	5	14	1	1	1	-	1	26
32	REJO KATON	3	-	8	13	1	1	2	1	1	30
33	PURBOLINGGO	3	1	15	28	3	2	1	2	1	56
34	TAMBAH SUBUR	3	1	13	18	1	3	2	1	2	44
	KABUPATEN	91	12	377	713	65	56	41	42	46	1.443

Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

E. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Poliklinik. Adapun jumlah sarana pelayanan kesehatan dan UKBM dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut

Tabel 2.2.13
Perkembangan Jumlah Sarana Kesehatan dan UKBM Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2019 sd 2023

No.	Sarana Kesehatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	RS Umum	3	3	3	3	3
2.	RS Khusus	2	2	2	2	2
3.	Puskesmas Rawat Inap	15	15	15	15	15
4.	Puskesmas Non Rawat Inap	19	19	19	19	19/2 puskesmas baru
5.	Puskesmas Pembantu	87	87	87	88	88
6.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1	1	1	1	1
7.	Poliklinik	19	20	20	24	26
8.	Posyandu	1.270	1.270	1.304	1.313	1.316
9.	Pos Kesehatan Desa	269	268	268	267	267

Sumber: Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung tetap yaitu sebanyak 5 Rumah Sakit terdiri dari 1 RSUD, 2 Rumah Sakit Umum Swasta dan 2 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Pada tahun 2023, jumlah Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur berjumlah 36 Puskesmas, terdiri dari 15 Puskesmas Rawat Inap, 19 Puskesmas Non Rawat Inap dan 2 Puskesmas baru dalam proses registrasi ke Kementerian Kesehatan yaitu Puskesmas Mekar Karya di Kecamatan Waway Karya dan Puskesmas Tulung Balak di Kecamatan Batanghari Nuban. Berdasarkan kewilayahan, jenis Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 31 Puskesmas Pedesaan, 3 Puskesmas terpencil. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur telah terakreditasi. Adapun kondisi bangunan puskesmas baik 28 puskesmas, Rusak Ringan 3 puskesmas, Rusak Sedang 3 Puskesmas dan Rusak Berat 2 Puskesmas.

Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 adalah 3 Puskesmas per 100.000 atau 1: 284.359 penduduk, sedangkan rasio Puskesmas terhadap Kecamatan adalah 1: 1,4 Puskesmas yang berarti bahwa seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur terdapat Puskesmas minimal satu Puskesmas bahkan ada yang dua Puskesmas.

Selain Puskesmas, sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Lampung Timur terdapat 88 Puskesmas Pembantu dari 264 desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur dan 1.308 Posyandu aktif. Puskesmas Pembantu atau Pustu adalah jaringan dari pelayanan Puskesmas, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas tersebut. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu

melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Peran Puskesmas Pembantu:

- Meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Puskesmas.
- Mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM.
- Mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu, Imunisasi, KIA, penyuluhan kesehatan, surveilans, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
- Mendukung pelayanan rujukan.
- Mendukung pelayanan promotif dan preventif.

Untuk melancarkan pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu merupakan bagian utama dalam jaringan pelayanan puskesmas, dalam jaringan pelayanan Puskesmas di setiap wilayah Desa dan kelurahan.

Dengan berbagai hambatan, letak geografis dan sarana transportasi seharusnya pustu menjadi pilihan masyarakat untuk dimanfaatkan karena merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan yang bisa di jangkau oleh masyarakat. Integrasi pelayanan Kesehatan primer pada Pustu dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh sasaran siklus hidup dan memperkuat peran pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di desa/kelurahan. Adapun sebaran kondisi puskesmas dan pustu di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.14
Kondisi Bangunan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

NO.	PUSKESMAS	KONDISI BANGUNAN PUSKESMAS				JUMLAH DAN KONDISI PUSTU					JUMLAH POSKESDES
		B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB	TOTAL	
1	MARGOTOTO	1	0	0	0	2	0	0	0	2	7
2	BATANGHARI	1	0	0	0	3	0	0	0	3	9
3	BUMI EMAS	1	0	0	0	1	0	0	1	2	8
4	SEKAMPUNG	1	0	0	0	3	0	0	0	3	8
5	TRI MULYO	1	0	0	0	0	0	0	2	2	9
6	SUKARAJA TIGA	0	0	0	1	1	0	0	1	2	7
7	TANJUNG HARAPAN	1	0	0	0	1	0	1	0	2	6
8	PUGUNG RAHARJO	1	0	0	0	0	0	2	1	3	8
9	SIDOREJO	0	1	0	0	1	0	1	0	2	7
10	JABUNG	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8
11	ADIREJO	1	0	0	0	1	0	0	1	2	7
12	PASIR SAKTI	1	0	0	0	2	0	2	0	4	8
13	SUMBER REJO	1	0	0	0	2	0	1	0	3	11
14	PENIANGAN	1	0	0	0	2	0	0	0	2	8
15	LABUHAN MARINGGAI	1	0	0	0	3	0	0	1	4	7
16	KARYA TANI	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4
17	MATARAM BARU	1	0	0	0	2	0	0	0	2	7
18	SRIBAWONO	0	1	0	0	2	0	0	2	4	7

NO.	PUSKESMAS	KONDISI BANGUNAN PUSKESMAS				JUMLAH DAN KONDISI PUSTU					JUMLAH POSKESDES
		B	RR	RS	RB	B	RR	RS	RB	TOTAL	
19	WANA	0	0	1	0	1	0	2	0	3	6
20	WAY MILI	1	0	0	0	2	0	0	0	2	5
21	WAY JEPARA	1	0	0	0	2	0	1	0	3	10
22	BRAJA CAKA	1	0	0	0	0	0	2	0	2	6
23	BRAJA HARJOSARI	0	0	1	0	3	0	0	1	4	7
24	RAJABASA LAMA	1	0	0	0	1	0	2	0	3	11
25	SUKADANA	1	0	0	0	3	0	0	0	3	13
26	PAKUAN AJI	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7
27	DONOMULYO	1	0	0	0	2	0	1	0	3	7
28	SUKARAJA NUBAN	1	0	0	0	1	0	1	1	3	13
29	PEKALONGAN	0	1	0	0	2	1	0	0	3	7
30	GANTI WARNO	0	0	0	1	0	0	2	0	2	5
31	RAMAN UTARA	1	0	0	0	1	0	1	0	2	6
32	REJO KATON	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5
33	PURBOLINGGO	1	0	0	0	4	0	0	1	5	12
34	TAMBAH SUBUR	1	0	0	0	3	0	0	1	4	8
	KABUPATEN	26	3	3	2	53	1	19	15	88	264

Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian kondisi puskesmas pembantu masih dalam kondisi rusak berat dan sedang, dengan rincian kondisi baik 53 unit, Rusak Ringan 1 Unit, Rusak Sedang 19 unit dan Rusak Berat 15 Unit.

Selain sarana gedung, pelayanan di puskesmas juga harus didukung oleh sarana penunjang yaitu Puskesmas Keliling/ambulance untuk rujukan. Puskesmas keliling adalah kegiatan puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan promotif dan preventif, sedangkan Ambulans digunakan untuk menangani dan/atau mengangkut pasien dengan kondisi gawat darurat atau berpotensi mengancam nyawa dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan. Untuk layanan tersebut diatas diperlukan sarana prasarana kendaraan puskesmas keliling dan ambulance yang standar dan kondisi baik. Berikut jumlah dan kondisi kendaraan pusling dan ambulans di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 :

Tabel 2.2.15
Jumlah dan kondisi Kendaraan Ambulans dan Puskesmas Keliling di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

NO.	Puskesmas	JUMLAH DAN KONDISI AMBULANCE/PUSLING											
		AMBULANCE				KENDARAAN RODA 2				PUSLING RODA 4			
		B	RR	RB	TOTAL	B	RR	RB	TOTAL	B	RR	RB	TOTAL
1	MARGOTOTO	1	0	0	1	4	2	0	6	0	0	1	1
2	BATANGHARI	1	0	0	1	1	4	0	5	1	1	0	2
3	BUMI EMAS	1	0	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0

NO.	Puskesmas	JUMLAH DAN KONDISI AMBULANCE/PUSLING											
		AMBULANCE				KENDARAAN RODA 2				PUSLING RODA 4			
		B	RR	RB	TOTAL	B	RR	RB	TOTAL	B	RR	RB	TOTAL
4	SEKAMPUNG	0	0	1	1	6	2	0	8	1	0	0	1
5	TRI MULYO	0	0	0	0	6	0	0	6	1	0	0	1
6	SUKARAJA TIGA	0	0	0	0	1	4	2	7	1	0	0	1
7	TANJUNG HARAPAN	0	0	0	0	4	2	0	6	1	0	0	1
8	PUGUNG RAHARJO	1	0	0	1	2	6	1	9	1	0	0	1
9	SIDOREJO	1	0	1	2	2	1	0	3	0	0	1	1
10	JABUNG	2	0	0	2	2	4	0	6	2	0	0	2
11	ADIREJO	0	0	0	0	6	0	0	6	1	0	0	1
12	PASIR SAKTI	1	0	0	1	2	4	0	6	1	0	0	1
13	SUMBER REJO	2	0	0	2	6	1	1	8	0	0	0	0
14	PENIANGAN	1	0	0	1	1	6	0	7	0	0	0	0
15	LABUHAN MARINGGAI	1	0	0	1	5	0	3	8	1	0	0	1
16	KARYA TANI	1	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0	0
17	MATARAM BARU	0	0	0	0	3	4	1	8	1	0	0	1
18	SRIBAWONO	0	1	0	1	3	2	7	12	1	0	0	1
19	WANA	1	0	0	1	1	8	0	9	1	0	0	1
20	WAY MILI	2	0	0	2	5	0	1	6	1	0	0	1
21	WAY JEPARA	1	0	0	1	2	3	1	6	1	0	0	1
22	BRAJA CAKA	0	0	0	0	1	3	0	4	0	1	0	1
23	BRAJA HARJOSARI	0	2	0	2	2	8	1	11	0	0	0	0
24	RAJABASA LAMA	0	0	0	0	5	1	1	7	1	0	0	1
25	SUKADANA	1	0	0	1	5	0	5	10	1	0	1	2
26	PAKUAN AJI	0	0	0	0	2	1	0	3	0	1	0	1
27	DONOMULYO	0	0	0	0	0	7	0	7	0	1	0	1
28	SUKARAJA NUBAN	0	0	0	0	4	2	0	6	1	0	0	1
29	PEKALONGAN	2	0	0	2	3	2	1	6	0	0	1	1
30	GANTI WARNO	0	0	0	0	1	7	1	9	1	0	0	1
31	RAMAN UTARA	1	0	0	1	7	0	0	7	1	0	0	1
32	REJO KATON	1	0	0	1	4	0	0	4	0	0	0	0
33	PURBOLINGGO	0	0	0	0	1	4	4	9	1	0	1	2
34	TAMBAH SUBUR	1	0	0	1	1	6	1	8	0	0	0	0
	KABUPATEN	23	3	2	28	100	96	32	228	22	4	5	31

Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Jumlah Ambulance di puskesmas sebanyak 28 Unit, dengan kondisi baik 23 unit, rusak ringan 3 unit dan rusak berat 2 unit. Berdasarkan data di atas terdapat 12 puskesmas yang belum memiliki ambulance. Sedangkan jumlah pusling roda 4 sebanyak 31 Unit, terdiri dari kondisi baik 22 unit, rusak ringan 4 unit dan rusak berat 5 unit. Terdapat 7 Puskesmas yang tidak memiliki pusling, namun digantikan dengan kendaraan ambulance. Untuk meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan, maka perlu pemenuhan sarana pusling/ambulance sesuai standar.

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) yang dibarengi dengan peningkatan tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan kepada Masyarakat. Adapun nilai persentase kelengkapan data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) berdasarkan ASPAK puskesmas dan RSUD Sukadana di Kabupaten Lampung Timur per 1 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.16
Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Puskesmas dan Rumah Sakit
di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

No	Nama Puskesmas/ RS		Kelengkapan			Kumulasi (50S+10P+40A)
			Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	18070200017	MATARAM BARU	100	53.7	97.11	94.22
2	18070200010	ADIREJO	82.22	50	77.55	77.13
3	18070200006	TANJUNG HARAPAN	100	61.11	66.85	82.85
4	18070200001	MARGOTOTO	96.49	50	65.01	79.25
5	18070200007	SUKARAJA TIGA	100	57.41	62.18	80.61
6	18070200014	PENIANGAN	100	51.85	59.68	79.06
7	18070200008	PUGUNG RAHARJO	100	50	61.4	79.56
8	18070200025	SUKADANA	100	64.81	59.35	80.22
9	18070200015	LABUHAN MARINGGAI	75.44	51.85	54.02	64.51
10	18070200023	BRAJA HARJOSARI	91.23	50	56.74	73.31
11	18070200032	PURBOLINGGO	96.49	55.56	53.14	75.06
12	18070200004	SEKAMPUNG	98.25	51.85	50.27	74.42
13	18070200019	WANA	100	50	51.95	75.78
14	18070200012	PASIR SAKTI	100	53.7	51.34	75.91
15	18070200018	SRIBAWONO	92.98	74.07	47.91	73.06
16	18070200030	REJO KATON	94.74	55.56	37.03	67.74
17	18070200033	TAMBAH SUBUR	100	55.56	47.46	74.54
18	18070200013	SUMBER REJO	100	55.56	45.93	73.93
19	18070200027	SUKARAJA NUBAN	100	46.3	44.85	72.57
20	18070200020	WAY MILI	100	70.37	44.32	74.76
21	18070200011	JABUNG	100	51.85	38.12	70.43
22	18070200002	BATANGHARI	100	53.7	52.63	76.42
23	18070200009	SIDOREJO	96.49	53.7	38.3	68.94
24	18070200021	WAY JEPARA	100	48.15	38.39	70.17
25	18070200003	BUMI EMAS	100	50	34.47	68.79
26	18070200016	KARYA TANI	91.11	35.19	33.45	62.46
27	18070200005	TRI MULYO	100	46.3	34.24	68.33
28	18070200024	RAJABASA LAMA	100	50	31.18	67.47
29	18070200026	DONOMULYO	100	53.7	30.29	67.49
30	18070200029	PEKALONGAN	100	53.7	30.04	67.39
31	18070200022	BRAJA CAKA	100	50	28.7	66.48
32	18070200031	RAMAN UTARA	100	53.7	25.31	65.5
33	18070200028	GANTI WARNO	95.56	46.3	24.2	62.09
34	18070200034	PAKUAN AJI	93.33	42.59	23.7	60.4
35		RSUD Sukadana	69.97	55.81	54.6	62.53

Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan tabel 2.2.15 di atas menunjukkan bahwa kelengkapan prasarana dan alat kesehatan di puskesmas sesuai standar sebagian besar masih rendah, artinya masih banyak kelengkapan prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang harus dipenuhi. Demikian juga dengan kelengkapan sarana dan alat kesehatan di 88 puskesmas pembantu hampir seluruh

puskesmas pembantu belum memiliki kelengkapan baik sarana maupun alat kesehatan serta belum terkalibrasi. Berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, bahwa pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu, akan diterapkan integrasi layanan primer (ILP) pada Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan. Untuk mendukung layanan terintegrasi tersebut diperlukan kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan baik di puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya sesuai standar secara bertahap.

F. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

Di Kabupaten Lampung Timur terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana adalah Rumah Sakit tipe C milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Sukadana dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 521/Menkes/SK/XIV/2005 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Dan resmi menjadi RSUD PPK-BLUD Penuh tanggal 09 Mei 2012 Berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor B.351/28/SK/2012. Serta terakreditasi untuk ketiga kali dengan predikat Paripurna berdasarkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : 024/SERT-AKR/LAM-KPRS/Set/X/2022 pada tanggal 19 Oktober 2022.

Peran RSUD Sukadana sangat strategis dalam upaya Pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Timur. Peran tersebut utamanya dalam pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Berdasarkan angka kunjungan pada Tahun 2023, Rawat Jalan yang tercatat yaitu 37.145 dan kunjungan Rawat Inap tercatat yaitu 5.765. Angka kunjungan tersebut terdapat peningkatan pemanfaatan RSUD Sukadana oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun jenis layanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana yaitu, Poliklinik Anak, Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Bedah, Poliklinik Syaraf, Poliklinik Mata, Poliklinik THT, Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah, Poliklinik Gigi dan Mulut, Poliklinik Paru, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Rehabilitasi Medik, Pelayanan Psikologi, Radiologi, Hemodialisa dan Laboratorium.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit mengamanatkan bahwa rumah sakit tipe C harus memberikan Pelayanan paling sedikit meliputi pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang nonklinik dan pelayanan rawat inap. Untuk sumber daya manusia terdiri atas tenaga medis,

tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, tenaga nonkesehatan sedangkan untuk peralatan paling sedikit terdiri peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah.

Fokus kementrian kesehatan dalam transformasi layanan rujukan menitikberatkan kepada pengembangan layanan dalam menangani 9 penyakit prioritas. Transformasi layanan rujukan dilakukan melalui program jejaring rujukan dan pengelompokkan rumah sakit menjadi 3 kategori, yaitu Rumah Sakit Madya, Rumah Sakit Utama, dan Rumah Sakit Paripurna. Masing-masing kategori memiliki kapasitas yang berbeda. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 telah mengamanahkan RSUD Sukadana sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung Dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Dan Kesehatan Ibu Dan Anak (KJSU-KIA), serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1495/2023 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa .

G. Analisa Kinerja Dinas Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK).

Berdasarkan kajian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur belum dapat mencapai target indikator yang telah di tetapkan. Jika dilihat dari capaian SDGs Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target yang telah di tetapkan antara lain.

Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 KH, jika dilihat dari capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023, Angka Kematian Bayi tahun 2023 ditargetkan 5,4 per 1000 Kelahiran Hidup dengan capaian sebesar 6.19 per 1000 Kelahiran Hidup.

Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya, Penemuan Kasus TB (semua tipe yang di laporkan) per 100.000 penduduk di targetkan 231 per 100.000 penduduk sementara hasil capaian penemuan kasus TB tahun 2023 sebesar 98,29 per 100.000 penduduk.

Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan

vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang, Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan dengan target 100% , dengan capaian cakupan universal health coverage tahun 2023 sebesar 98,7 %, dengan capaian tersebut diapresiasi oleh BPJS Kesehatan sehingga Kabupaten Lampung Timur meraih predikat *Universal Health Coverage* (UHC. Sedangkan realisasi capaian SPM pelayanan dasar kesehatan tahun 2023 di Kabupaten Lampung Timur, dari 12 indikator layanan belum ada yang mencapai nilai nasional dan nilai daerah.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (realisasi dan proyeksi) sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.17 TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur															
Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79	65	76	77	78	-	-	77	78		
				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%	90%	100%	100%	100%	45%	100%	100%	100%		
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	45%	100%	100%	100%	
01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Sukadana	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	34 Puskesmas dan 1 RS	

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%	100%	100%	100%	100%	83%	84,60%	100%	100%	
				Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100	95	96	97	98	87,38	83,52	97	98	
				Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100	93	95	98	100	86,11	93,22	98	100	
				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100	97,5	98	99	100	90,04	92,11	99	100	
				Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88	77	79	83	85	79,89	80,73	83	85	
				Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69	65	66	67	68	95,83	96,32	67	68	
				Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50	20	30	40	45	82,54	41,27	40	45	
				Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80	73	75	77	79	77,96	82,50	77	79	
				Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25	15	17	20	22	66,77	30,37	20	22	

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75	55	60	65	70	79,76	75,30	65	70	
				Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90	82	84	86	88	75,14	95,10	86	88	
				Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100	97,5	98	98,5	99	70,96	81,72	98,5	99	
				Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66	62	63	64	65	70,08	70,04	64	65	
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96	92	93	94	95	86,11	93,22	94	95	
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89	85	86	87	88	84,20	74,40	87	88	
				Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94	90	91	92	93	70,96	31,34	92	93	
90,91				Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100	100	100	100	100	25,23	90,91	100	100	

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	90%	75%	100%	100%	
02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	62%	90,37	100%	100%	

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59%	42%	46%	50%	55%	14,7%	32,35 %	50%	55%	
03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100%	100%	100%	100%	100%	62%	71,56 %	100%	100%	
03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	33%	92%	100%	100%	
03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	72,66%	75%	75%	
04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	98	90	90	90	95	51,3%	37,8 %	90	95	

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100	55	60	80	90	100%	100%	80	90	
				Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	60	30	40	50	55	-	-	50	55	
04	2.01		Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	70%	50%	55%	60%	65%	40%	45,3%	60%	65%	

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	81%	92,48%	100%	100%	
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%	35%	40%	45%	50%	59,5%	61,74%	45%	50%	
05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	55%	35%	40%	45%	50%	100%	100%	45%	50%	
05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100%	100%	100%	100%	100%	30,77%	100%	100%	100%	

Kode			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Hasil)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85%	65%	70%	75%	80%	100%	100%	75%	80%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian program pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan tahun 2023, Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya melakukan pemetaan atas isu-isu penting yang menjadi fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal, efektif dan efisien.

A. Hal kritis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2023 yaitu sebesar 6,19 per 1.000 Kelahiran Hidup (target 5,4 per 1.000 Kelahiran Hidup)
2. Masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Timur yaitu sebesar 14,2%.
3. Masih rendahnya penemuan dan pengobatan kasus TB Paru yaitu sebesar 30,7 % dari target 90 %.
4. Masih rendahnya insiden HIV yaitu 0,02 per 1.000 penduduk dari target 0,19 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV.
5. Meningkatnya Insiden Rate Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 30,8 per 100.000 penduduk tahun 2022 menjadi 31,82 per 100.000 penduduk pada tahun 2023 (target < 10 per 100.000 penduduk)
6. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada tahun 2023 (capaian 0,228 dari target 0,38)
7. Masih belum tercapainya target 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Capaian 12 indikator SPM < 100 %) dari target 100 %.

B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan fungsi Dinas Kesehatan

1. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan baik jumlah maupun distribusi/pemerataannya dan masih rendahnya persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%) baru 11 puskesmas atau mencapai 32,35 %, dikarenakan ketersediaan tenaga Dokter Gigi yang masih sangat kurang dari 34 puskesmas baru 11 puskesmas memiliki Dokter Gigi.
2. Berpindahnya petugas yang sudah terlatih/berganti pengampu program, yang berdampak pada keberlanjutan program tidak maksimal/perlu pelatihan lagi

bagi petugas yang baru.

3. Belum terbangun sistem informasi dan pelaporan yang terintegrasi sehingga berakibat belum tercovernya data layanan kesehatan dari sarana pelayanan kesehatan swasta hal ini berdampak pada rendahnya cakupan layanan SPM bidang kesehatan dan beberapa program lainnya.
4. Dukungan lintas sector (konvergensi lintas sector) dalam penanganan stunting belum maksimal.

C. Dampaknya terhadap capaian SPM dan SDGs

Terkait adanya masalah dan hambatan yang ada, mengakibatkan capaian indikator SPM dan SDGs di Kabupaten Lampung Timur belum optimal.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Indikator SPM dan SDGs menjadi prioritas yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui kebijakan terkait anggaran serta komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun peluang yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur antara lain;

1. Program Public Safety Centre (PSC) 119 “Layanan ***rujukan untuk kasus – kasus kegawatdaruratan dalam rangka*** menurunkan angka kecacatan dan kematian pada kejadian Gawat Darurat, khususnya kegawatdaruratan dalam persalinan.
2. Program pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tenaga kontrak daerah (dokter kontrak) dan Tenaga BLUD.
3. Sebanyak 34 Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur telah terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI;
4. Sebanyak 34 Puskesmas telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sejak tahun 2020;
5. Sebanyak 34 Puskesmas di Kabupaten Lampung Timur telah memiliki USG 2 Dimensi untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu hamil;
6. Adanya PMK 212 Tahun 2022 yang mengatur tentang DAU Kesehatan;
7. Jaminan JKN PBI Daerah (diluar Kuota PBI Pusat) yang bersumber dari pajak rokok dan DAU Kesehatan;
8. Di Kabupaten Lampung Timur terdapat tiga FKRTL Tipe C yaitu RS milik

Pemerintah RSUD Sukadana, RS Aka Medika dan RS Umum Permata Hati serta 2 (dua) RS Ibu dan Anak yaitu RSIA Mawar dan Ibunda.

9. Tersedianya layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang sedang dalam proses akreditasi.
 10. Adanya 2 (dua) puskesmas baru dimana 1 puskesmas sudah teregistrasi dan 1 puskesmas lagi sedang proses registrasi ke Kementerian Kesehatan.
 11. Sudah terselenggaranya Lounching Penerapan Integrasi Layanaan Primer (ILP) di Puskesmas Sukadana dan Puskesmas Wana sebagai pilot project Integrasi Layanaan Primer (ILP) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan telah ditetapkan 34 puskesmas dan 89 pustu di Kabupaten Lampung Timur sebagai lokus pelaksanaan intergrasi layanan primer Tahun 2025.
 12. Tercapainya Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023.
 13. Ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
 14. Ditetapkannya RSUD Sukadana sebagai Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung Dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, Dan Kesehatan Ibu Dan Anak (KJSU-KIA) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1277/2024.
 15. Ditetapkannya Rumah Sakit Sukadana sebagai Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1495/2023.
 16. Kabupaten Lampung Timur menjadi Lokus Stunting dan ATM (AIDS, TB dan Malaria).
- E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025
1. Peningkatan Cakupan Layanan Kesehatan khususnya Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang mencakup 12 indikator layanan.
 2. Penguatan layanan Puskesmas PONED dan PONEK di RSUD Sukadana

melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan dan Peningkatan mutu dan kompetensi SDM Kesehatan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Pemenuhan obat esensial dan alat kesehatan sesuai standar melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan kegiatan Promotif dan preventif melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Penguatan Pelayanan BLUD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil telaahan kebutuhan-kebutuhan pada saat proses penyusunan RKPD dilaksanakan. Telaahan kebutuhan dimaksud berupa indikator kinerja yang diharapkan, program dan kegiatan yang akan diusulkan serta kebutuhan pagu dana indikatif yang diperlukan.

Telaahan kebutuhan dilakukan berdasarkan adanya masukan dan saran dari hasil Review Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah oleh Bappeda, Hasil Musrenbang dan juga kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Berikut ini tabel review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2.18
T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KESEHATAN	Lampung Timur			151.393.259.018	DINAS KESEHATAN	Lampung Timur			151.393.259.018	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				151.393.259.018	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				151.393.259.018	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				151.393.259.018	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				151.393.259.018	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	96.973.139.859	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	96.973.139.859	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100 %	156.003.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100 %	156.003.001	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100 %	95.604.818.018	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100 %	95.604.818.018	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1509 Orang/bulan		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
								Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	149.450.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	149.450.000	
								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	34 Laporan		
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100 %	18.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100 %	18.500.000	
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100%	220.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100%	220.000.000	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		
								Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100 %	638.498.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100 %	638.498.840	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	185.870.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	185.870.000	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%	52.352.200.067	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%	52.352.200.067	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%				Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%				Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	100%				Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	100%				Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	100%				Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	100%				Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	100%				Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	100%				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	100%				Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%				Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	100%				Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	95%				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	88%				Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	93%				Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%				Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	13.157.946.660	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	13.157.946.660	
								Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		
								Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit		
								Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		
								Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit		
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	34 Unit		
								Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		
								Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	285553 Keluarga		
								Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	39.006.554.622	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	39.006.554.622	
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16677 Orang		
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15230 Orang		
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15238 Orang		
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54183 Orang		
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	164456 orang		
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	684075 Orang		
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140501 Orang		
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275969 Orang		
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15968 Orang		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1841 Orang		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15918 Orang		
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20003 Orang		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	35 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	11 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	62 Dokumen		
								Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3400 Orang		
								Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	28 Dokumen		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	204 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen		
								Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	3400 Orang		
								Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Paket		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	35 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Dokumen		
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50 Dokumen		
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1210 Orang		
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	286 Orang		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1589 Orang		
								Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen		
								Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	23 Dokumen		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	118.578.285	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	118.578.285	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen		
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	69.120.500	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	69.120.500	
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit		
3,	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100%	1.621.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100%	1.621.000.000	
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	55%				Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	55%		
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100 %	32.000.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100 %	32.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25 Dokumen		
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100 %	1.489.000.000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100 %	1.489.000.000	
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen		
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	36 Orang		
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75 %	100.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75 %	100.000.000	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120 Orang		
4,	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	95%	55.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	95%	55.000.000	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	90%				Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	90%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	55%				Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	55%		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100 %	15.000.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100 %	15.000.000	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15 Dokumen		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	65 %	25.000.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	65 %	25.000.000	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen		
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100 %	15.000.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100 %	15.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	15 Unit		
5,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	50%	391.919.092	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	50%	391.919.092	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	50%	150.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	50%	150.000.000	
								Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	43 Dokumen		
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100 %	93.869.692	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100 %	93.869.692	
								Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	35 Dokumen		
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	35 keluarga		
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	80 %	148.049.400	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	80 %	148.049.400	
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34 Dokumen		
	RSUD Suka dana				48.162.244.654	RSUD Suka dana				48.162.244.654	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				48.162.244.654	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				48.162.244.654	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				48.162.244.654	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				48.162.244.654	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	48.162.244.654	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	48.162.244.654	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Sukadana	1 Rumah Sakit	48.162.244.654	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Sukadana	1 Rumah Sakit	48.162.244.654	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS SEKAMPUNG				1.940.772.000	PUSKESMAS SEKAMPUNG				1.940.772.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.940.772.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.940.772.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.940.772.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.940.772.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.940.772.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.940.772.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.940.772.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.940.772.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN				1.130.000.000	PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN				1.130.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.130.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.130.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.130.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.130.000.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.130.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.130.000.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.130.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.130.000.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS KARYA TANI				1.014.709.597	PUSKESMAS KARYA TANI				1.014.709.597	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.014.709.597	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.014.709.597	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.014.709.597	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.014.709.597	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.014.709.597	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.014.709.597	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.014.709.597	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.014.709.597	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS MARGOTOTO				1.392.634.000	PUSKESMAS MARGOTOTO				1.392.634.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.392.634.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.392.634.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.392.634.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.392.634.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.392.634.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.392.634.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.392.634.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.392.634.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PUSKESMAS ADIREJO				1.260.382.387	PUSKESMAS ADIREJO				1.260.382.387	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.260.382.387	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.260.382.387	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.260.382.387	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.260.382.387	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.260.382.387	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.260.382.387	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.260.382.387	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.260.382.387	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS WANA				1.522.724.000	PUSKESMAS WANA				1.522.724.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.522.724.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.522.724.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.522.724.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.522.724.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.522.724.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.522.724.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.522.724.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.522.724.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI				3.953.500.000	PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI				3.953.500.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.953.500.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.953.500.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.953.500.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.953.500.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	3.953.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	3.953.500.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	3.953.500.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	3.953.500.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS TRIMULYO				1.140.200.000	PUSKESMAS TRIMULYO				1.140.200.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.140.200.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.140.200.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.140.200.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.140.200.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.140.200.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.140.200.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.140.200.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.140.200.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS PAKUAN AJI				749.848.861	PUSKESMAS PAKUAN AJI				749.848.861	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				749.848.861	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				749.848.861	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				749.848.861	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				749.848.861	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	749.848.861	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	749.848.861	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	749.848.861	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	749.848.861	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PUSKESMAS SUKARAJA TIGA				1.016.650.000	PUSKESMAS SUKARAJA TIGA				1.016.650.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.016.650.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.016.650.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.016.650.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.016.650.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.016.650.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.016.650.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.016.650.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.016.650.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS PASIR SAKTI				2.422.835.000	PUSKESMAS PASIR SAKTI				2.422.835.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.422.835.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.422.835.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.422.835.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.422.835.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.422.835.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.422.835.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.422.835.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.422.835.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS DONOMULYO				977.655.000	PUSKESMAS DONOMULYO				977.655.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				977.655.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				977.655.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				977.655.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				977.655.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	977.655.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	977.655.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	977.655.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	977.655.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS SIDOREJO				1.400.473.000	PUSKESMAS SIDOREJO				1.400.473.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.400.473.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.400.473.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.400.473.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.400.473.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.400.473.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.400.473.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.400.473.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.400.473.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS BRAJA HARJOSARI				1.534.715.000	PUSKESMAS BRAJA HARJOSARI				1.534.715.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.534.715.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.534.715.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.534.715.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.534.715.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.534.715.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.534.715.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.534.715.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.534.715.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PUSKESMAS SUMBER REJO				2.485.920.000	PUSKESMAS SUMBER REJO				2.485.920.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.485.920.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.485.920.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.485.920.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.485.920.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.485.920.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.485.920.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.485.920.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.485.920.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS MATARAM BARU				1.951.564.000	PUSKESMAS MATARAM BARU				1.951.564.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.951.564.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.951.564.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.951.564.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.951.564.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.951.564.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.951.564.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.951.564.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.951.564.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS RAMAN UTARA				1.344.538.000	PUSKESMAS RAMAN UTARA				1.344.538.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.344.538.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.344.538.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.344.538.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.344.538.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.344.538.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.344.538.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.344.538.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.344.538.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS PUGUNG RAHARJO				1.747.405.201	PUSKESMAS PUGUNG RAHARJO				1.747.405.201	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.747.405.201	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.747.405.201	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.747.405.201	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.747.405.201	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.747.405.201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.747.405.201	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.747.405.201	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.747.405.201	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS WAY JEPARA				2.610.590.000	PUSKESMAS WAY JEPARA				2.610.590.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.610.590.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.610.590.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.610.590.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.610.590.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.610.590.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.610.590.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.610.590.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.610.590.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS SRIBHAWONO				2.412.116.000	PUSKESMAS SRIBHAWONO				2.412.116.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.412.116.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.412.116.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.412.116.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.412.116.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.412.116.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.412.116.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.412.116.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.412.116.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS BATANGHARI				1.623.157.000	PUSKESMAS BATANGHARI				1.623.157.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.623.157.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.623.157.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.623.157.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.623.157.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.623.157.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.623.157.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.623.157.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.623.157.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN				1.790.605.000	PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN				1.790.605.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.790.605.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.790.605.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.790.605.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.790.605.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.790.605.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.790.605.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.790.605.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.790.605.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS PEKALONGAN				1.805.422.000	PUSKESMAS PEKALONGAN				1.805.422.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.805.422.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.805.422.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.805.422.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.805.422.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.805.422.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.805.422.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.805.422.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.805.422.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS PENIANGAN				1.324.398.000	PUSKESMAS PENIANGAN				1.324.398.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.324.398.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.324.398.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.324.398.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.324.398.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.324.398.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.324.398.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.324.398.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.324.398.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS RAJA BASA LAMA				1.380.000.000	PUSKESMAS RAJA BASA LAMA				1.380.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.380.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.380.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.380.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.380.000.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.380.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.380.000.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.380.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.380.000.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS TAMBAH SUBUR				1.570.400.000	PUSKESMAS TAMBAH SUBUR				1.570.400.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.570.400.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.570.400.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.570.400.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.570.400.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.570.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.570.400.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.570.400.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.570.400.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS REJO KATON				681.143.740	PUSKESMAS REJO KATON				681.143.740	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				681.143.740	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				681.143.740	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				681.143.740	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				681.143.740	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	681.143.740	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	681.143.740	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	681.143.740	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	681.143.740	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PUSKESMAS GANTIWARNO				904.450.000	PUSKESMAS GANTIWARNO				904.450.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				904.450.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				904.450.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				904.450.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				904.450.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	904.450.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	904.450.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	904.450.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	904.450.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS BRAJA CAKA				603.264.701	PUSKESMAS BRAJA CAKA				603.264.701	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				603.264.701	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				603.264.701	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				603.264.701	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				603.264.701	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	603.264.701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	603.264.701	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	603.264.701	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	603.264.701	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS SUKADANA				2.880.488.000	PUSKESMAS SUKADANA				2.880.488.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.880.488.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.880.488.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.880.488.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.880.488.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.880.488.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.880.488.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.880.488.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.880.488.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS BUMI EMAS				1.002.209.000	PUSKESMAS BUMI EMAS				1.002.209.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.002.209.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.002.209.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.002.209.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.002.209.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.002.209.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.002.209.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.002.209.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.002.209.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS PURBOLINGGO				2.585.661.483	PUSKESMAS PURBOLINGGO				2.585.661.483	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.585.661.483	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.585.661.483	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.585.661.483	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.585.661.483	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.585.661.483	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.585.661.483	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.585.661.483	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.585.661.483	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PUSKESMAS JABUNG				1.754.044.000	PUSKESMAS JABUNG				1.754.044.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.754.044.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.754.044.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.754.044.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.754.044.000	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.754.044.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.754.044.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100		
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.754.044.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.754.044.000	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	PUSKESMAS WAY MILI				2.496.433.497	PUSKESMAS WAY MILI				2.496.433.497	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.496.433.497	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.496.433.497	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.496.433.497	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.496.433.497	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.496.433.497	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.496.433.497	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%				Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.496.433.497	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.496.433.497	
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		
	JUMLAH				255.966.412.139	JUMLAH				255.966.412.139	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan (melalui musrenbang dan yang masuk melalui UPTD Puskesmas) hingga tingkat kabupaten (melalui Forum gabungan SKPD dan rapat lintas program pada Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil musrenbang, secara umum usulan program/kegiatan yang diusulkan masyarakat di bidang Kesehatan adalah penyediaan serta perbaikan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar melalui pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung puskesmas, pembangunan/rehabilitasi puskesmas pembantu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik peralatan kesehatan, pusling maupun sarana penunjang lainnya dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagian besar usulan adalah rehabilitasi puskesmas pembantu yang memang sebagian besar kondisinya sudah memprihatinkan, namun karena keterbatasan anggaran dari APBD dan tidak ada menu pada sumber dana DAK, sehingga sampai dengan saat ini usulan rehabilitasi puskesmas belum banyak yang terealisasi.

Disamping usulan fisik tersebut di atas, masyarakat juga banyak menyampaikan usulan pembangunan poskesdes dan posyandu beserta peralatannya, sesuai juknis penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan UKBM (poskesdes dan posyandu) beserta pemenuhan peralatannya, maka untuk usulan tersebut dapat dianggarkan melalui Dana Desa.

Secara umum usulan program dan kegiatan dari masyarakat selaras dengan upaya standarisasi sarana pelayanan kesehatan baik sarana gedung maupun peralatannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat khususnya dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat dan proses akreditasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun usulan program/kegiatan/sub kegiatan masyarakat berdasarkan hasil desk dengan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 untuk usulan program/kegiatan tahun 2025 dapat disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 2.2.19
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
 Provinsi/Kabupaten/Kota Lampung Timur
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Kecamatan	Program	Kegiatan	Rincian kegiatan		Lokasi
1	Sukadana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembuatan pagar Puskesmas Pakuan Aji	Desa Pakuan Aji
				2	Rehabilitasi Poskesdes	Putra Aji , Ds.03 Rt. 13
				3	Pembangunan Poskesdes	Putra Aji I, Dusun IV
2	Way Jepara	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Desa Sri Rejosari
				2	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Desa Labuhan Ratu
3	Bandar Sribhawono	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Poskesdes	Desa Sri Menanti
				2	Rehabilitasi Poskesdes	Desa Sri Pendowo
4	Raman Utara	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Poskesdes	Kota Raman
				2	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Desa Raman Aji
				3	Pembangunan Poskesdes	Desa Ratna Daya
5	Labuhan Ratu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Puskesmas Rajabasa Lama	Desa Rajabasa Lama

No.	Kecamatan	Program	Kegiatan	Rincian kegiatan		Lokasi
6	Melinting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan puskesmas rawat inap	Desa Wana
				2	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Desa Sido Makmur
				3	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Desa Tanjung Aji
				4	Pembangunan gedung obat puskesmas wana	Desa Wana
7	Way Bungur	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Poskesdes	Desa Taman Negeri
				2	Rehabilitasi Poskesdes	Desa Tambah Subur
8	Gunung Pelindung	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Desa Negeri Agung
				2	Meubelair Pustu	Desa Negeri Agung
				3	Pembangunan gedung Poskesdes	Desa Pempen
				4	Rehabilitasi Poskesdes	Desa Pelindung Jaya
				5	Rehabilitasi gedung puskesmas rawat inap	Desa Way Mili
				6	Rehabilitasi Pustu	Desa Nibung
				7	Pembangunan Poskesdes	Desa Nibung
9	Pekalongan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan Pustu	Desa Sidodadi

No.	Kecamatan	Program	Kegiatan	Rincian kegiatan		Lokasi
10	Way Way Karya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Pustu	Desa Sidorahayu
				2	Pengadaan Pusling Roda 4	Desa Mekar Karya
11	Sekampung Udik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan gedung pustu	Desa Brajawijaya
				2	Rehap gedung Pustu	Desa Sindang Anom
				3	Penyediaan Kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling)	Desa Sidorejo
12	Batanghari Nuban	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan pagar puskesmas Tulung Balak	Desa Tulung Balak
				2	Rehabilitasi berat puskesmas pembantu	Desa Sukacari
13	Purbolinggo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Rehap gedung Pustu	Desa Tambah Luhur
				2	Rehap gedung Pustu	Desa Taman Asri
14	Labuhan Maringgai	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Renovasi pembangunan rawat inap PKM labuhan maringgai	Desa Labuhan Maringgai
				2	Rehap pustu	Karang Anyar
				3	Renovasi pustu menjadi puskesmas induk	Desa Sri Gading

Sumber : Hasil Musrenbang Kecamatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rancangan Awal Perangkat Daerah sebagai dokumen wajib yang harus disusun mengacu pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan. Adapun Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi mencakup:

1. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana; Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
2. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
3. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

- B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda mencakup:
1. Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
 2. Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
 3. Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
 4. Peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung bukti (evidence based policy) termasuk fortifikasi pangan;
 5. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
 6. Penguatan sistem surveilans gizi;
 7. Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
 8. Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.
- C. Peningkatan pengendalian penyakit, peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup:
1. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveilans real time, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
 2. Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
 3. Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
 4. Pengendalian resistensi antimikroba;
 5. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat
- D. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mencakup :
1. Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;

2. Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;
3. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petanitembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
4. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;
5. Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

E. Penguatan Sistem Kesehatan

1. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, difokuskan pada:
 - a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
 - b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
 - c) Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
 - d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
 - e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
 - f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 - g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online;
 - i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying dan sailing health care) dan gugus pulau;
 - j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus;

- k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3).
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan difokuskan pada;
- a) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan);
 - b) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - c) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - e) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - f) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - g) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;
 - h) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola difasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat Kesehatan, difokuskan pada;
- a) Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
 - b) Penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik;
 - c) Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;
 - d) Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences;
 - e) Pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.
4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan, difokuskan pada;
- a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
 - c) Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan

daerah termasuk penerapan sistem single entry;

- d) Penguatan data rutin;
- e) Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk bigdata, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
- f) Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
- g) Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
- h) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah
- i) Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

5. Penguatan Pelaksanan JKN

Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (supply side) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan active purchasing termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan mekanisme cost- sharing, penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

dengandidukung inovasi teknologi.

5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC;
 - b) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi;
 - c) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - d) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian;
 - e) Penyediaan ambulans desa untuk mencegah tunda terlambat;
 - f) Peningkatan penyediaan darah setiap saat dibutuhkan;
 - g) Perbaikan pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di fasyankes dan masyarakat melalui pengembangan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati);
 - h) Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS;
 - i) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (Universal Child Immunization) sampai level desa;
 - j) Peningkatan cakupan ASI eksklusif;
 - k) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
 - l) Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat desa;
 - m) Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, dan anak balita;
 - n) Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga;
 - o) Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting;
 - p) Penguatan sistem surveilans gizi;

- q) Pendampingan ibu hamil untuk menjamin asupan gizi yang berkualitas;
 - r) Pendampingan baduta untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan stimulasi perkembangan yang adekuat;
 - s) Promosi pembudayaan hidup sehat, melalui edukasi literasi kesehatan;
 - t) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus;
 - u) Mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang (isi piringku);
 - v) Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, booklet, media sosial, dan sebagainya;
 - w) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat;
 - x) Melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka publik, aktivitas fisik (olah raga), stop smoking, penurunan polusi udara, dan peningkatan lingkungan sehat;
 - y) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan /Health in All Policy (HiAP).
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan Dilaksanakan melalui strategi:
- a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKRTL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik masih terkendala (DTPK), di mana untuk wilayah perkotaan lebih didorong peran swasta;
 - b) Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasyankes
 - c) Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan;
 - d) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan);
 - e) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau;
 - f) Penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan clinical pathway;
 - g) Penguatan kemampuan RS Khusus;
 - h) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui

- peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh stakeholder, dan penguatan konsep wilayah kerja;
- i) Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem;
 - j) Perbaikan pengelolaan limbah medis fasyankes & pengendalian B3
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan melalui strategi:
- a) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPMBidang Kesehatan;
 - b) Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis;
 - c) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
 - d) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - e) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis;
 - f) Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat;
 - g) Peningkatan advokasi dan komunikasi;
 - h) Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit zoonosis, keamanan pangan, manajemen biorisiko;
 - i) Penguatan sistem laboratorium nasional, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat untuk penguatan surveilans;
 - j) Penguatan reporting dan real time surveillance untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul (new emerging diseases);
 - k) Membangun sistem kewaspadaan dini;
 - l) Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat;
 - m) Peningkatan kemampuan daerah termasuk SDM.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan dilakukan melalui strategi:
- a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas;

- b) Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan;
 - c) Penguatan regulasi sistem pengawasan pre dan post market alat kesehatan, melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi termasuk pengawasan barang impor Border dan Post Border, dan penegakan hukum;
 - d) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, melalui penciptaan iklim ramah investasi, optimalisasi hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi Academic-Business-Government-Community-Innovator (A-B-G-C-I), hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia dan industri alat kesehatan teknologi tinggi;
 - e) Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan roadmap vaksin halal;
 - f) Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan mengutamakan pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat kesehatan dalam negeri melalui promosi, advokasi, dan pengawasan implementasi regulasi;
 - g) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan alat kesehatan tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal melalui Gerakan Bugardengan Jamu dan pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).
5. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar dilakukan melalui strategi:
- a) Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
 - b) Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;
 - c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit);
 - d) Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
 - e) Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlahnakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
 - f) Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan Meningkatkan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui strategi:
- a) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBN,

- hususnyaterkait Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b) Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;
 - c) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal 10% dari APBD;
 - d) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta.
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui strategi:
- a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM Bidang Kesehatan;
 - c) Integrasi, interoperabilitas, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry;
 - d) Penguatan manajemen kesehatan di kabupaten/kota dalam kerangka otonomi pembangunan kesehatan;
 - e) Mendorong sinergisme perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - f) Mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi;
 - g) Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah;
 - h) Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja;
 - i) Meningkatkan jumlah unit yang masuk dalam kategori WBK dan WBBM.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui strategi:
- a) Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN Bidang Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
 - b) Memperkuat jejaring penelitian kesehatan dan jejaring laboratorium guna memperkuat sistem penelitian kesehatan nasional ;
 - c) Meningkatkan riset untuk penguatan data rutin baik di fasilitas kesehatan dan masyarakat;
 - d) Meningkatkan diseminasi dan advokasi hasil penelitian untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan dan program kesehatan;

- e) Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan yang real time;
- f) Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data hasil penelitian dan data rutin;
- g) Mengembangkan poros kebijakan guna peningkatan pemanfaatan hasil penelitian, dan pengkajian untuk perumusan dan perbaikan kebijakan kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Visi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yaitu ***Rakyat Lampung Timur Berjaya***". Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Timur Berjaya", telah disusun 9 (sembilan) misi, dimana Dinas Kesehatan berkontribusi kedalam Misi yang ketiga yaitu "Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, selaras dengan arah kebijakan dan program Kementerian Kesehatan serta Provinsi Lampung serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Timur, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada rencana strategis Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 menetapkan hal- hal sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Kesehatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Timur Sehat) yang diukur dengan :

- Meningkatnya Angka Harapan Hidup (tahun) menjadi 70,77 tahun.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak;

- Angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) diharapkan akan turun menjadi 5,2 per 1000 Kelahiran Hidup.
- Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 87,55 per 100.000 Kelahiran Hidup.

2) Meningkatnya status gizi masyarakat;

- Prevalensi stunting diharapkan akan turun menjadi 13,2 %.
- Prevalensi wasting diharapkan akan turun menjadi 5,3 %.

3) Menurunnya Angka Kesakitan;

- Treatment Coverage pada pasien TB (SPM) (TPB) 90 %

- Insidensi HIV 0,19 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV
 - Insiden Rate kasus DBD < 10 per 100.000 penduduk.
- 4) Meningkatnya kemandirian dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- Indeks Keluarga Sehat 0,46.
 - Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri 66,74 %.

Selain Indikator Sasaran Strategis tersebut di atas, Dinas Kesehatan juga mendukung upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Kabupaten Lampung Timur yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang terdiri dari 12 indikator pelayanan dengan target pelayanan untuk masing-masing indikator sebesar 100 % yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Disamping itu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur juga berkontribusi dalam pencapaian indikator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) pada :

1. *Goals 3* yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
2. *Goals 6* yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

3.3. Program dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada kinerja Dinas Kesehatan dan jaringan di bawahnya serta sumber daya kesehatan yang ada, tetapi juga sangat bergantung pada peran aktif lintas sektor terkait dan peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta. Dalam

pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kesehatan, Dinas Kesehatan pada tahun 2025 memiliki 4 sasaran strategis yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 sebagai upaya pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan, baik itu melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat kecamatan melalui pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur. Untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan di tingkat puskesmas dibutuhkan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu hal yang masih menjadi kendala hingga saat ini adalah jumlah tenaga kesehatan yang masih kurang serta distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan antara puskesmas yang satu dengan puskesmas yang lain.

Program prioritas untuk mendukung pelayanan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung pada tahun 2025 terdiri dari 4 program prioritas dengan 13 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan serta 1 program penunjang dengan 8 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Rincian program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

A. PROGRAM PRIORITAS :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan layanan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dan peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan. Adapun indikator kinerja program ini adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin, persentase pelayanan kesehatan ibu hamil, Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan, Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Persentase Pelayanan Kesehatan Balita, Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia, Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV), Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan, Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan, Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB), dan Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani.

Terdiri dari 4 Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten.

Terdiri dari 10 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pembangunan Puskesmas
2. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3. Pengembangan Puskesmas
4. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
5. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya
6. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
7. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
8. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
10. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten.

Terdiri dari 36 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 16. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 18. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 21. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 24. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah (Dinas Kesehatan)
 25. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
 26. Operasional Pelayanan Puskesmas
 27. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 28. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI & Pemberian Obat Massal)
 29. Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon wabah
 30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis
 31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
 32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
 33. Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
 34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
 35. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
 36. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Indikator Kinerja Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Kinerja Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan melalui upaya pemenuhan SDM Kesehatan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas, pemerataan tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan. Adapun indikator kinerja program ini adalah Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%) dan persentase puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan.

Terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktek.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar
3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan pada Tempat pengelolaan Makanan, pelayanan kefarmasian dan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat

Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Adapun indikator kinerja program ini adalah Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%), Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan dan Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan.

Terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Indikator kinerja Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di Produksi oleh Industri Rumah Tangga.

Indikator Kinerja : Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor PIRT.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Indikator Kinerja : Persentase IRTTP berizin yang pengelolaannyasuai standar.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta aktif lintas sektor dan stake holder terkait melalui advokasi, pemberdayaan, kemitraan, promotive dan preventif dan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Terdiri dari 3 Kegiatan yaitu :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Kinerja : Persentase penyediaan paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja : Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

B. PROGRAM PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur beserta UPTD. Adapun indikator kinerja program ini adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah, Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%) dan Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%). Program tersebut dirinci menjadi 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan
- Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan
- Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan
- Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan
- Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan bahan logistik kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan
- Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan
- Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Peningkatan Pelayanan BLUD
- Indikator Kinerja : Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas
- Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Adapun rencana anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut : (TERLAMPIR).

Tabel 3.3.1TC-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten
Lampung Timur
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						151.393.259.018				191.256.326.746	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						151.393.259.018				191.256.326.746	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						151.393.259.018				191.256.326.746	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	96.973.139.859			79	127.102.347.498	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100%	100 %	100 %	100 %	156.003.001			100%	156.003.001	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	32.000.001	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	32.000.001	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	27.265.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	27.265.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.412.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	9.412.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.266.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	13.266.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	7.247.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	7.247.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	16.813.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	16.813.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan</i>	100 %	100%	100%	100 %	95.604.818.018			100 %	125.211.159.657	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1559 Orang	1.260 orang/bulan	1459 Orang/bulan	1509 Orang/bulan	94.775.938.712	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1509 Orang/bula n	123.958.390.251	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	401.820.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	737.460.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	340.149.406	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12 Dokumen	360.049.406	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	60 Dokumen	12 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85.260.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.909.900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Dokumen	20.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 laporan	35.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan</i>	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>						Semua Kel/Desa				
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan</i>	100%	100%	100%	100 %	149.450.000			100%	259.450.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.000 3	Dinas Kesehatan											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	15 Laporan	1 laporan	6 Laporan	2 Laporan	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		130.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	170 Laporan	18 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	20.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	64.450.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		94.450.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
									Semua Kel/Desa				
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan</i>	100%	100%	100%	100 %	18.500.000			100%	19.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	60 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	18.500.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		19.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan</i>	100%	100%	100%	100%	220.000.000			100%	400.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	14 Dokumen	1 paket	4 paket	1 Paket	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	20 Paket	1 paket	6 Paket	1 Paket	20.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	14 Paket	1 paket	4 paket	1 Paket	10.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan</i>	39 paket	1 paket	12 Paket	3 Paket	20.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	40 Paket	2 paket	12 paket	2 Paket	35.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	432 dokumen	12 dokumen	384 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	50 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	283 Laporan	45 Laporan	64 Laporan	46 Laporan	75.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan</i>	100 %	100%	100 %	100 %	638.498.840			100 %	643.734.840	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	251.998.840	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		251.998.840	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	386.500.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		391.736.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan</i>	100%	100%	100 %	100 %	185.870.000			100%	413.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	25 Unit	3 Unit	8 Unit	3 Unit	88.770.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		Dinas Operasional atau Lapangan											
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	37 Unit	4 Unit	21 Unit	4 Unit	47.100.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		113.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	161 Unit	25 Unit	61 Unit	25 Unit	25.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	8 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	25.000.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Sukadana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 unit	150.000.000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100	84,60	100	100	52.352.200.067			100	60.424.979.248	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100	83,52	97	98				100		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100	93,22	98	100				100		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100	92,11	99	100				100		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88	80,73	83	85				88		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69	96,32	67	68				69		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50	41,27	40	45				50		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80	82,50	77	79				80		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25	30,37	20	22				25		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75	75,30	65	70				75		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90	95,10	86	88				90		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100	81,72	98,5	99				100		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66	70,04	64	65				66		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96	93,22	94	95				96		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89	74,40	87	88				89		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94	31,34	92	93				94		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100	90,91	100	100				100		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	13.157.946.660			100%	14.548.562.773	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.000 2	Pembangunan Puskesmas											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>	2 Unit	0	0	1 Unit	4.450.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.950.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.000 3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>	10 Unit	2 unit	2 Unit	1 Unit	69.979.907	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		956.977.897	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.000 6	Pengembangan Puskesmas											
			<i>Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>	32 Unit	6 Unit	8 Unit	2 Unit	3.677.207.716	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.144.464.244	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.000 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar</i>	4 Unit	1 Unit	0	1 Unit	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.001 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	50 Unit	18 Unit	40 Unit	4 Unit	1.857.730.200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.650.951.610	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.001 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>	245 Unit	0 unit	230 Unit	3 Unit	950.381.500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.045.419.650	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.002 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>	200 Unit	10 Unit	91 Unit	34 Unit	240.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		224.400.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.002 3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan											
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>	15 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket	1.642.078.137	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.263.723.252	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.002 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas</i>	285553 keluarga	0	0	285553 Keluarga	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.002 6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan											
			<i>Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan</i>	183 Paket	4 Paket	167 paket	4 Paket	170.569.200	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		187.626.120	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten</i>	100 %	75%	100%	100 %	39.006.554.622			100 %	45.676.416.475	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.000 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		14702 Orang	16677 Orang	16677 Orang	262.995.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		514.800.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.000 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		14827 Orang	15230 Orang	15230 Orang	200.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.000 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		14638 Orang	15238 Orang	15238 Orang	849.960.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		934.956.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.000 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita											
			<i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		49632 Orang	54183 Orang	54183 Orang	106.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		116.875.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.000 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		155630 Orang	164456 Orang	164456 orang	341.250.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		341.250.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.000 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif											
			<i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		281347 Orang	684075 Orang	684075 Orang	912.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.119.800.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.000 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		125124 Orang	131552 Orang	140501 Orang	930.324.283	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.072.390.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi											
			<i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		82949 Orang	275969 Orang	275969 Orang	246.360.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		275.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus											
			<i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>		10092 Orang	15968 Orang	15968 Orang	215.873.705	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		327.825.520	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>		1787 Orang	1841 Orang	1841 Orang	256.165.509	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		291.500.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>		13660 Orang	15918 Orang	15918 Orang	686.391.740	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		275.000.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.02.2.02.001 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>		14677 Orang	20003 Orang	20003 Orang	364.229.900	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		239.800.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.001 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	69524 Dokumen	467 Dokumen	68987 Dokumen	35 Dokumen	473.770.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		983.950.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.001 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	830 Dokumen	726 Dokumen	34 Dokumen	35 Dokumen	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.001 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	7604 Dokumen	3355 Dokumen	4179 Dokumen	35 Dokumen	162.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		319.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.001 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>		121 Dokumen	27 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80.405.380	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.02.2.02.001 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	85 Dokumen	24 Dokumen	28 Dokumen	11 Dokumen	65.734.301	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		74.492.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	5417 Dokumen	1922 Dokumen	3309 Dokumen	62 Dokumen	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)											
			<i>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>	61351 Orang	1.351	15000 Orang	3400 Orang	18.530.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA											
			<i>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan</i>	200 Orang	20 Orang	45 Orang	25 Orang	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		302.500.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan</i>	122 Dokumen	26 Dokumen	12 Dokumen	28 Dokumen	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>	24809 dokumen	5798 Dokumen	18399 Dokumen	204 Dokumen	409.407.770	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		679.800.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	50 Dokumen	20 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	29.779.134.623	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32.829.624.436	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah											
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah</i>	60130 Orang	130 Orang	15000 Orang	3400 Orang	37.260.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		220.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.002 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional											
			<i>Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan</i>	873 paket	521 paket	52 paket	100 paket	32.240.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.464.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.02.2.02.003 3	Operasional Pelayanan Puskesmas											
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	4254 Dokumen	865 Dokumen	3284 Dokumen	35 Dokumen	1.337.716.603	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.372.152.863	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.003 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	142 Dokumen	23 Dokumen	59 Dokumen	20 Dokumen	598.311.188	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.255.761.276	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.003 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)											
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>	3365 Laporan	187 Laporan	3106 Laporan	24 Laporan	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		-	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.003 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	407 Dokumen	222 Dokumen	35 Dokumen	50 Dokumen	74.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		94.600.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.004 0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	17688 Orang	1048 Orang	13010 Orang	1210 Orang	75.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.004 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)											
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	1154 Orang	10 Orang	286 Orang	286 Orang	75.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.004 2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria											
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>	6531 Orang	175 Orang	1589 Orang	1589 Orang	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		55.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.004 3	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok											
			<i>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok</i>	2 Tatanan	2 Tatanan	2 Tatanan	2 Tatanan	25.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.004 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi											
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>	4842 Dokumen	0	1614 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.004 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota</i>	58 Dokumen	0	12 Dokumen	23 Dokumen	106.650.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		101.970.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.004 6	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak											
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>	25824 Dokumen	0	8608 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		27.500.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas</i>	100 %	100%	100%	100 %	118.578.285			100 %	125.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03.000 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	70 Dokumen	3 dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	118.578.285	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		125.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	69.120.500			100 %	75.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.000 3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan											
			<i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>	60 Unit	39 Unit	40 Unit	39 Unit	69.120.500	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		75.000.000	Dinas Kesehatan
3,	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100%	90,37	100%	100%	1.621.000.000			100%	2.984.000.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		DAYA MANUSIA KESEHATAN											
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59%	32,35	50%	55%				59%		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100 %	71,56	100 %	100 %	32.000.000			100 %	35.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01.000 2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	125 Dokumen	9 dokumen	27 Dokumen	25 Dokumen	32.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		35.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100 %	92%	100 %	100 %	1.489.000.000			100 %	1.803.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.000 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	0	0	2 Dokumen	100.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		235.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.000 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar											
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	145 Orang	34 Orang	39 Orang	36 Orang	1.374.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.548.000.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.03.2.02.000 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	30 Dokumen	0	10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan</i>	75 %	72,66%	75 %	75 %	100.000.000			75 %	1.146.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03.000 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i>	869 Orang	287 Orang	342 Orang	120 Orang	100.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-		1.146.000.000	Dinas Kesehatan
4,	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	98%	37,8%	90%	95%	55.000.000			98%	70.000.000	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%	80%	90%				100%		
			Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	60%	0	50%	55%				60%		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	<i>Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000			100 %	20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.01.000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	120 Dokumen	30 dokumen	30 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	<i>Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT</i>	70 %	45,3%	60 %	65 %	25.000.000			70 %	30.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03.000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	934 Dokumen	134 Dokumen	200 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar</i>	100 %	92,48%	100 %	100 %	15.000.000			100 %	20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06.000 1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan											
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>	753 Unit	63 Unit	90 Unit	15 Unit	15.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20.000.000	Dinas Kesehatan
5,	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	55%	61,74%	45%	50%	391.919.092			55%	675.000.000	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas</i>	55%	100%	45%	50%	150.000.000			55%	290.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.01.000 1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	1900 Dokumen	1703 Dokumen	68 Dokumen	43 Dokumen	150.000.000	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		290.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat</i>	100%	100%	100%	100 %	93.869.692			100%	160.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02.000 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	125 Dokumen	53 Dokumen	1 Dokumen	35 Dokumen	43.869.692	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		85.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02.000 2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat											
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat</i>	70 keluarga	0	0	35 keluarga	50.000.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif</i>	85%	100%	75 %	80 %	148.049.400			85%	225.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03.000 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		Daya Masyarakat (UKBM)											
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	3277 Dokumen	114 Dokumen	3061 Dokumen	34 Dokumen	148.049,400	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		225.000.000	Dinas Kesehatan
	1	RSUD Sukadana						48.162.244.654				45.000.000.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.162.244.654				45.000.000.000	
	1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						48.162.244.654				45.000.000.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	48.162.244.654			79	45.000.000.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Sukadana</i>	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	1 Rumah Sakit	48.162.244.654			1 Rumah Sakit	45.000.000.000	RSUD Sukadana
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	48.162.244.654	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN DARI BLUD		45.000.000.000	RSUD Sukadana

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
									Semua Kel/Desa				
		PUSKESMAS SEKAMPUNG						1.940.772.000				1.940.772.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.940.772.000				1.940.772.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.940.772.000				1.940.772.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.940.772.000			79	1.940.772.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.940.772.000			1 Puskesmas	1.940.772.000	PUSKESMAS SEKAMPUNG
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.940.772.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	1 Unit Kerja	1.940.772.000	PUSKESMAS SEKAMPUNG
		PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN						1.130.000.000				1.130.000.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.130.000.000				1.130.000.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.130.000.000				1.130.000.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.130.000.000			79	1.130.000.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.130.000.000			1 Puskesmas	1.130.000.000	PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.130.000.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Tanjung Harapan	PENDAPATA N DARI BLUD		1.130.000.000	PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN
		PUSKESMAS KARYA TANI						1.014.709.597				1.014.709.597	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.014.709.597				1.014.709.597	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.014.709.597				1.014.709.597	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.014.709.597			79	1.014.709.597	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.014.709.597			1 Puskesmas	1.014.709.597	PUSKESMAS KARYA TANI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.014.709.597	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Karya Tani	PENDAPATAN DARI BLUD		1.014.709.597	PUSKESMAS KARYA TANI
		PUSKESMAS MARGOTOTO						1.392.634.000				1.392.634.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.392.634.000				1.392.634.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.392.634.000				1.392.634.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.392.634.000			79	1.392.634.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.392.634.000			1 Puskesmas	1.392.634.000	PUSKESMAS MARGOTOTO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.392.634.000	Kab. Lampung Timur, Metro Kibang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		1.392.634.000	PUSKESMAS MARGOTOTO
		PUSKESMAS ADIREJO						1.260.382.387				1.260.382.387	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.260.382.387				1.260.382.387	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.260.382.387				1.260.382.387	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.260.382.387			79	1.260.382.387	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.260.382.387			1 Puskesmas	1.260.382.387	PUSKESMAS ADIREJO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.260.382.387	Kab. Lampung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Timur, Jabung, Adirejo	PENDAPATAN DARI BLUD		1.260.382.387	PUSKESMAS ADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		PUSKESMAS WANA						1.522.724.000				1.522.724.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.522.724.000				1.522.724.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.522.724.000				1.522.724.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.522.724.000			79	1.522.724.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.522.724.000			1 Puskesmas	1.522.724.000	PUSKESMAS WANA
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.522.724.000	Kab. Lampung Timur, Melinting, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.522.724.000	PUSKESMAS WANA
		PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI						3.953.500.000				3.953.500.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.953.500.000				3.953.500.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.953.500.000				3.953.500.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	3.953.500.000			79	3.953.500.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	3.953.500.000			1 Puskesmas	3.953.500.000	PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.953.500.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Maringgai, Labuhan Maringgai	PENDAPATA N DARI BLUD		3.953.500.000	PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI
		PUSKESMAS TRIMULYO						1.140.200.000				1.140.200.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.140.200.000				1.140.200.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.140.200.000				1.140.200.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.140.200.000			79	1.140.200.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.140.200.000			1 Puskesmas	1.140.200.000	PUSKESMAS TRIMULYO
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.140.200.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung, Semua Kel/Desa	-		1.140.200.000	PUSKESMAS TRIMULYO
		PUSKESMAS PAKUAN AJI						749.848.861				749.848.861	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						749.848.861				749.848.861	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						749.848.861				749.848.861	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	749.848.861			79	749.848.861	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	749.848.861			1 Puskesmas	749.848.861	PUSKESMAS PAKUAN AJI
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	749.848.861	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Pakuan Aji	PENDAPATAN DARI BLUD		749.848.861	PUSKESMAS PAKUAN AJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
									Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa				
		PUSKESMAS SUKARAJA TIGA						1.016.650.000				1.016.650.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.016.650.000				1.016.650.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.016.650.000				1.016.650.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.016.650.000			79	1.016.650.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.016.650.000			1 Puskesmas	1.016.650.000	PUSKESMAS SUKARAJA TIGA
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.016.650.000	Kab. Lampung Timur, Marga Tiga, Sukaraja Tiga	PENDAPATA N DARI BLUD		1.016.650.000	PUSKESMAS SUKARAJA TIGA
		PUSKESMAS PASIR SAKTI						2.422.835.000				2.422.835.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN						2.422.835.000				2.422.835.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.422.835.000				2.422.835.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	2.422.835.000			79	2.422.835.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.422.835.000			1 Puskes mas	2.422.835.000	PUSKESMAS PASIR SAKTI
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.422.835.000	Kab. Lampung Timur, Pasir Sakti, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		2.422.835.000	PUSKESMAS PASIR SAKTI
		PUSKESMAS DONOMULYO						977.655.000				977.655.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						977.655.000				977.655.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						977.655.000				977.655.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	977.655.000			79	977.655.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	977.655.000			1 Puskesmas	977.655.000	PUSKESMAS DONOMULYO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	977.655.000	Kab. Lampung Timur, Bumi Agung, Semua Kel/Desa	-		977.655.000	PUSKESMAS DONOMULYO
		PUSKESMAS SIDOREJO						1.400.473.000				1.400.473.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.400.473.000				1.400.473.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.400.473.000				1.400.473.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.400.473.000			79	1.400.473.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas</i>	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.400.473.000			1 Puskesmas	1.400.473.000	PUSKESMAS SIDOREJO
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.473.000	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Sidorejo	PENDAPATA N DARI BLUD		1.400.473.000	PUSKESMAS SIDOREJO
		PUSKESMAS BRAJA HARJOSARI						1.534.715.000				1.534.715.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.534.715.000				1.534.715.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.534.715.000				1.534.715.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.534.715.000			79	1.534.715.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas</i>	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.534.715.000			1 Puskesmas	1.534.715.000	PUSKESMAS BRAJA HARJOSARI
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.534.715.000	Kab. Lampung Timur, Braja Selebah, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.534.715.000	PUSKESMAS BRAJA HARJOSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		PUSKESMAS SUMBER REJO						2.485.920.000				2.485.920.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.485.920.000				2.485.920.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.485.920.000				2.485.920.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	2.485.920.000			79	2.485.920.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.485.920.000			1 Puskesmas	2.485.920.000	PUSKESMAS SUMBER REJO
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.485.920.000	Kab. Lampung Timur, Waway Karya, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		2.485.920.000	PUSKESMAS SUMBER REJO
		PUSKESMAS MATARAM BARU						1.951.564.000				1.392.634.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.951.564.000				1.392.634.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.951.564.000				1.392.634.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.951.564.000			79	1.392.634.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.951.564.000			1 Puskesmas	1.392.634.000	PUSKESMAS MATARAM BARU
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.951.564.000	Kab. Lampung Timur, Mataram Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.392.634.000	PUSKESMAS MATARAM BARU
		PUSKESMAS RAMAN UTARA						1.344.538.000				1.344.538.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.344.538.000				1.344.538.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.344.538.000				1.344.538.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.344.538.000			79	1.344.538.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.344.538.000			1 Puskesmas	1.344.538.000	PUSKESMAS RAMAN UTARA
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.344.538.000	Kab. Lampung Timur, Raman Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		1.344.538.000	PUSKESMAS RAMAN UTARA
		PUSKESMAS PUGUNG RAHARJO						1.747.405.201				1.747.405.201	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.747.405.201				1.747.405.201	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.747.405.201				1.747.405.201	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.747.405.201			79	1.747.405.201	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.747.405.201			1 Puskesmas	1.747.405.201	PUSKESMAS PUGUNG RAHARJO
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.747.405.201	Kab. Lampung Timur, Sekampung Udik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		1.747.405.201	PUSKESMAS PUGUNG RAHARJO
		PUSKESMAS WAY JEPARA						2.610.590.000				2.610.590.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.610.590.000				2.610.590.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.610.590.000				2.610.590.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	2.610.590.000			79	2.610.590.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas</i>	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.610.590.000			1 Puskesmas	2.610.590.000	PUSKESMAS WAY JEPARA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.610.590.000	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		2.610.590.000	PUSKESMAS WAY JEPARA
		PUSKESMAS SRIBHAWONO						2.412.116.000				2.412.116.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN						2.412.116.000				2.412.116.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.412.116.000				2.412.116.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	2.412.116.000			79	2.412.116.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.412.116.000			1 Puskes mas	2.412.116.000	PUSKESMAS SRIBHAWONO
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.412.116.000	Kab. Lampung Timur, Bandar Sribhawono, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		2.412.116.000	PUSKESMAS SRIBHAWONO
		PUSKESMAS BATANGHARI						1.623.157.000				1.623.157.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.623.157.000				1.623.157.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.623.157.000				1.623.157.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.623.157.000			79	1.623.157.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		DAERAH KABUPATEN/KOTA											
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.623.157.000			1 Puskesmas	1.623.157.000	PUSKESMAS BATANGHARI
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.623.157.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		1.623.157.000	PUSKESMAS BATANGHARI
		PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN						1.790.605.000				1.790.605.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.790.605.000				1.790.605.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.790.605.000				1.790.605.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.790.605.000			79	1.790.605.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas</i>	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.790.605.000			1 Puskesmas	1.790.605.000	PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.790.605.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari Nuban, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.790.605.000	PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN
		PUSKESMAS PEKALONGAN						1.805.422.000				1.805.422.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.805.422.000				1.805.422.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.805.422.000				1.805.422.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.805.422.000			79	1.805.422.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas</i>	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.805.422.000			1 Puskesmas	1.805.422.000	PUSKESMAS PEKALONGAN
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.805.422.000	Kab. Lampung Timur, Pekalongan,	PENDAPATA N DARI BLUD		1.805.422.000	PUSKESMAS PEKALONGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
									Semua Kel/Desa				
		PUSKESMAS PENIANGAN						1.324.398.000				1.324.398.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.324.398.000				1.324.398.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.324.398.000				1.324.398.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.324.398.000			79	1.324.398.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.324.398.000			1 Puskesmas	1.324.398.000	PUSKESMAS PENIANGAN
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.324.398.000	Kab. Lampung Timur, Marga Sekampung, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.324.398.000	PUSKESMAS PENIANGAN
		PUSKESMAS RAJA BASA LAMA						1.380.000.000				1.380.000.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.380.000.000				1.380.000.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.380.000.000				1.380.000.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.380.000.000			79	1.380.000.000	
			Persentase pemuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.380.000.000			1 Puskesmas	1.380.000.000	PUSKESMAS RAJA BASA LAMA
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.380.000.000	Kab. Lampung Timur, Labuhan Ratu, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.380.000.000	PUSKESMAS RAJA BASA LAMA
		PUSKESMAS TAMBAH SUBUR						1.570.400.000				1.570.400.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.570.400.000				1.570.400.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.570.400.000				1.570.400.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.570.400.000			79	1.570.400.000	
			Persentase pemuhan kebutuhan	100	100	100	100				100		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			administrasi perkantoran (%)										
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.570.400.000			1 Puskesmas	1.570.400.000	PUSKESMAS TAMBAH SUBUR
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.570.400.000	Kab. Lampung Timur, Way Bungur, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.570.400.000	PUSKESMAS TAMBAH SUBUR
		PUSKESMAS REJO KATON						681.143.740				681.143.740	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.143.740				681.143.740	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						681.143.740				681.143.740	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	681.143.740			79	681.143.740	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	681.143.740			1 Puskesmas	681.143.740	PUSKESMAS REJO KATON
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	681.143.740	Kab. Lampung	PENDAPATA N DARI BLUD		681.143.740	PUSKESMAS REJO KATON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			<i>dan Penunjang Pelayanan</i>						Timur, Raman Utara, Rejo Katon				
		PUSKESMAS GANTIWARNO						904.450.000				904.450.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						904.450.000				904.450.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						904.450.000				904.450.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	904.450.000			79	904.450.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	904.450.000			1 Puskesmas	904.450.000	PUSKESMAS GANTIWARNO
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	904.450.000	Kab. Lampung Timur, Ganti Wamo	PENDAPATA N DARI BLUD		904.450.000	PUSKESMAS GANTIWARNO
		PUSKESMAS BRAJA CAKA						603.264.701				603.264.701	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						603.264.701				603.264.701	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN						603.264.701				603.264.701	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		BIDANG KESEHATAN											
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	603.264.701			79	603.264.701	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	603.264.701			1 Puskesmas	603.264.701	PUSKESMAS BRAJA CAKA
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	603.264.701	Kab. Lampung Timur, Way Jepara, Semua Kel/Desa	-		603.264.701	PUSKESMAS BRAJA CAKA
		PUSKESMAS SUKADANA						2.880.488.000				2.880.488.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.880.488.000				2.880.488.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.880.488.000				2.880.488.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	2.880.488.000			79	2.880.488.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.880.488.000			1 Puskesmas	2.880.488.000	PUSKESMAS SUKADANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.880.488.000	Kab. Lampung Timur, Sukadana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		2.880.488.000	PUSKESMAS SUKADANA
		PUSKESMAS BUMI EMAS						1.002.209.000				1.002.209.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.002.209.000				1.002.209.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.002.209.000				1.002.209.000	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.002.209.000			79	1.002.209.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.002.209.000			1 Puskesmas	1.002.209.000	PUSKESMAS BUMI EMAS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.002.209.000	Kab. Lampung Timur, Batanghari, Bumi Mas	PENDAPATAN DARI BLUD		1.002.209.000	PUSKESMAS BUMI EMAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
		PUSKESMAS PURBOLINGGO						2.585.661.483				2.585.661.483	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.585.661.483				2.585.661.483	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.585.661.483				2.585.661.483	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	2.585.661.483			79	2.585.661.483	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.585.661.483			1 Puskesmas	2.585.661.483	PUSKESMAS PURBOLINGGO
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.585.661.483	Kab. Lampung Timur, Purbolinggo , Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		2.585.661.483	PUSKESMAS PURBOLINGGO
		PUSKESMAS JABUNG						1.754.044.000				1.754.044.000	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.754.044.000				1.754.044.000	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.754.044.000				1.754.044.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	1.754.044.000			79	1.754.044.000	
			Persentase pemuenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.754.044.000			1 Puskesmas	1.754.044.000	PUSKESMAS JABUNG
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.754.044.000	Kab. Lampung Timur, Jabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATA N DARI BLUD		1.754.044.000	PUSKESMAS JABUNG
		PUSKESMAS WAY MILI						2.496.433.497				2.496.433.497	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.496.433.497				2.496.433.497	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.496.433.497				2.496.433.497	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	79		77	78	2.496.433.497			79	2.496.433.497	
			Persentase pemuenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	100				100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100	100	100	100				100		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas</i>	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	2.496.433.497			1 Puskesmas	2.496.433.497	PUSKESMAS WAY MILI
	1.02.01.2.10.000 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.496.433.497	-	-		2.496.433.497	PUSKESMAS WAY MILI
	J U M L A H							255.966.412.139				292.108.305.213	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Rencana Kerja dan kerangka pendanaan perangkat daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur diarahkan untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, upaya mencapai SPM bidang kesehatan serta agenda kerja Bupati Lampung Timur dengan memperhatikan isu- isu global, nasional dan kebijakan Nasional sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Timur TA 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		DINAS KESEHATAN			151.393.259.018	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			151.393.259.018	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			151.393.259.018	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	96.973.139.859	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD pada Dinas Kesehatan	100 %	156.003.001	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	32.000.001	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	27.265.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.412.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.266.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.247.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	16.813.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100 %	95.604.818.018	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1509 Orang/bulan	94.775.938.712	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	401.820.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	340.149.406	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.909.900	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	10.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penatausahaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	149.450.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	50.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	34 Laporan	20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	64.450.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100 %	18.500.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	18.500.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100%	220.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	20.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	75.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa layanan penunjang pada Dinas Kesehatan	100 %	638.498.840	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251.998.840	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	386.500.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan Aset pada Dinas Kesehatan	100 %	185.870.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	88.770.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	47.100.000	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.000.000	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100%	52.352.200.067,00	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	100%		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	95%		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	88%		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	93%		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100%		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100 %	13.157.946.660,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	4.450.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	69.979.907,00	Dinas Kesehatan
						Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.677.207.716,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	1.857.730.200,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	950.381.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	34 Unit	240.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1.642.078.137,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	285553 Keluarga	50.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	4 Paket	170.569.200,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100 %	39.006.554.622,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16677 Orang	262.995.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15230 Orang	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15238 Orang	849.960.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54183 Orang	106.250.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	164456 orang	341.250.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	684075 Orang	912.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140501 Orang	930.324.283,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275969 Orang	246.360.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15968 Orang	215.873.705,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1841 Orang	256.165.509,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15918 Orang	686.391.740,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20003 Orang	364.229.900,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35 Dokumen	473.770.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	35 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	35 Dokumen	162.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	11 Dokumen	65.734.301,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	62 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3400 Orang	18.530.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	28 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	204 Dokumen	409.407.770,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	29.779.134.623,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	3400 Orang	37.260.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100 Paket	32.240.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	35 Dokumen	1.337.716.603,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Dokumen	598.311.188,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50 Dokumen	74.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1210 Orang	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	286 Orang	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1589 Orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	23 Dokumen	106.650.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100 %	118.578.285,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	118.578.285,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100 %	69.120.500,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39 Unit	69.120.500,00	Dinas Kesehatan
3,	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100%	1.621.000.000,00	
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	55%		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100 %	32.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	25 Dokumen	32.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100 %	1.489.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	36 Orang	1.374.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75 %	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120 Orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
4,	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	95%	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	90%		
			Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	55%		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100 %	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	65 %	25.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100 %	15.000.000	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	15 Unit	15.000.000	Dinas Kesehatan
5,	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata purnama mandiri	50%	391.919.092,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	50%	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	43 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100 %	93.869.692,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	35 Dokumen	43.869.692,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	35 keluarga	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	80 %	148.049.400,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34 Dokumen	148.049.400,00	Dinas Kesehatan
		RSUD Sukadana			48.162.244.654	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.162.244.654	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			48.162.244.654	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	48.162.244.654	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Sukadana	1 Rumah Sakit	48.162.244.654	RSUD Sukadana
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	48.162.244.654	RSUD Sukadana
		PUSKESMAS SEKAMPUNG			1.940.772.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.940.772.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.940.772.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.940.772.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.940.772.000,00	Puskesmas Sekampung
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.940.772.000,00	Puskesmas Sekampung
		PUSKESMAS TANJUNG HARAPAN			1.130.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.130.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.130.000.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.130.000.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.130.000.000,00	Puskesmas Tanjung Harapan
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.130.000.000,00	Puskesmas Tanjung Harapan
		PUSKESMAS KARYA TANI			1.014.709.597,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.014.709.597,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.014.709.597,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.014.709.597,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.014.709.597,00	Puskesmas Karya Tani
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.014.709.597,00	Puskesmas Karya Tani
		PUSKESMAS MARGOTOTO			1.392.634.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.392.634.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.392.634.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.392.634.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.392.634.000,00	Puskesmas Margototo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.392.634.000,00	Puskesmas Margototo
		PUSKESMAS ADIREJO			1.260.382.387,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.260.382.387,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.260.382.387,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.260.382.387,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.260.382.387,00	Puskesmas Adirejo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.260.382.387,00	Puskesmas Adirejo
		PUSKESMAS WANA			1.522.724.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.522.724.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.522.724.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.522.724.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.522.724.000,00	Puskesmas Wana
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.522.724.000,00	Puskesmas Wana
		PUSKESMAS LABUHAN MARINGGAI			3.953.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.953.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.953.500.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	3.953.500.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	3.953.500.000,00	Puskesmas Labuhan Maringgai
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.953.500.000,00	Puskesmas Labuhan Maringgai

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS TRIMULYO			1.140.200.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.140.200.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.140.200.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.140.200.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.140.200.000,00	Puskesmas Trimulyo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.140.200.000,00	Puskesmas Trimulyo
		PUSKESMAS PAKUAN AJI			749.848.861,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			749.848.861,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			749.848.861,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	749.848.861,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	749.848.861,00	Puskesmas Pakuan AJi
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	749.848.861,00	Puskesmas Pakuan AJi
		PUSKESMAS SUKARAJA TIGA			1.016.650.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.016.650.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.016.650.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.016.650.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.016.650.000,00	Puskesmas Sukaraja Tiga
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.016.650.000,00	Puskesmas Sukaraja Tiga
		PUSKESMAS PASIR SAKTI			2.422.835.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.422.835.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.422.835.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.422.835.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.422.835.000,00	Puskesmas Pasir Sakti
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.422.835.000,00	Puskesmas Pasir Sakti
		PUSKESMAS DONOMULYO			977.655.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			977.655.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			977.655.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	977.655.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	977.655.000,00	Puskesmas Donomulyo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	977.655.000,00	Puskesmas Donomulyo
		PUSKESMAS SIDOREJO			1.400.473.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.400.473.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.400.473.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.400.473.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.400.473.000,00	Puskesmas Sidorejo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.400.473.000,00	Puskesmas Sidorejo
		PUSKESMAS BRAJA HARJOSARI			1.534.715.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.534.715.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.534.715.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.534.715.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.534.715.000,00	Puskesmas Braja Harjosari
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.534.715.000,00	Puskesmas Braja Harjosari
		PUSKESMAS SUMBER REJO			2.485.920.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.485.920.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.485.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.485.920.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.485.920.000,00	Puskesmas Sumber Rejo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.485.920.000,00	Puskesmas Sumber Rejo
		PUSKESMAS MATARAM BARU			1.951.564.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.951.564.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.951.564.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.951.564.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.951.564.000,00	Puskesmas Mataram Baru
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.951.564.000,00	Puskesmas Mataram Baru
		PUSKESMAS RAMAN UTARA			1.344.538.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.344.538.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.344.538.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.344.538.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.344.538.000,00	Puskesmas Raman Utara
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.344.538.000,00	Puskesmas Raman Utara
		PUSKESMAS PUGUNG RAHARJO			1.747.405.201,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.747.405.201,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.747.405.201,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.747.405.201,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.747.405.201,00	Puskesmas Pugung Raharjo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.747.405.201,00	Puskesmas Pugung Raharjo
		PUSKESMAS WAY JEPARA			2.610.590.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.610.590.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.610.590.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.610.590.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.610.590.000,00	Puskesmas Way Jepara
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.610.590.000,00	Puskesmas Way Jepara
		PUSKESMAS SRIBHAWONO			2.412.116.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.412.116.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.412.116.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.412.116.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.412.116.000,00	Puskesmas Sribhawono
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.412.116.000,00	Puskesmas Sribhawono
		PUSKESMAS BATANGHARI			1.623.157.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.623.157.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.623.157.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.623.157.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.623.157.000,00	Puskesmas Batanghari
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.623.157.000,00	Puskesmas Batanghari
		PUSKESMAS SUKARAJA NUBAN			1.790.605.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.790.605.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.790.605.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.790.605.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.790.605.000,00	Puskesmas Sukaraja Nuban

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.790.605.000,00	Puskesmas Sukaraja Nuban
		PUSKESMAS PEKALONGAN			1.805.422.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.805.422.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.805.422.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.805.422.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.805.422.000,00	Puskesmas Pekalongan
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.805.422.000,00	Puskesmas Pekalongan
		PUSKESMAS PENIANGAN			1.324.398.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.324.398.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.324.398.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.324.398.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.324.398.000,00	Puskesmas Peniangan
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.324.398.000,00	Puskesmas Peniangan
		PUSKESMAS RAJA BASA LAMA			1.380.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.380.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.380.000.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.380.000.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.380.000.000,00	Puskesmas Raja Basa Lama
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.380.000.000,00	Puskesmas Raja Basa Lama
		PUSKESMAS TAMBAH SUBUR			1.570.400.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.570.400.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.570.400.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.570.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.570.400.000,00	Puskesmas Tambah Subur
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.570.400.000,00	Puskesmas Tambah Subur
		PUSKESMAS REJO KATON			681.143.740,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			681.143.740,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			681.143.740,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	681.143.740,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	681.143.740,00	Puskesmas Rejo Katon
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	681.143.740,00	Puskesmas Rejo Katon
		PUSKESMAS GANTIWARNO			904.450.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			904.450.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			904.450.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	904.450.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	904.450.000,00	Puskesmas Gantiwarno
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	904.450.000,00	Puskesmas Gantiwarno
		PUSKESMAS BRAJA CAKA			603.264.701,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			603.264.701,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			603.264.701,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	603.264.701,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	603.264.701,00	Puskesmas Braja Caka
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	603.264.701,00	Puskesmas Braja Caka
		PUSKESMAS SUKADANA			2.880.488.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.880.488.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.880.488.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.880.488.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.880.488.000,00	Puskesmas Sukadana
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.880.488.000,00	Puskesmas Sukadana
		PUSKESMAS BUMI EMAS			1.002.209.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.002.209.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.002.209.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.002.209.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.002.209.000,00	Puskesmas Bumi Emas
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.002.209.000,00	Puskesmas Bumi Emas
		PUSKESMAS PURBOLINGGO			2.585.661.483,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.585.661.483,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.585.661.483,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.585.661.483,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.585.661.483,00	Puskesmas Purbolinggo
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.585.661.483,00	Puskesmas Purbolinggo
		PUSKESMAS JABUNG			1.754.044.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.754.044.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.754.044.000,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	1.754.044.000,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	1.754.044.000,00	Puskesmas Jabung
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.754.044.000,00	Puskesmas Jabung

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		PUSKESMAS WAY MILI			2.496.433.497,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.496.433.497,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.496.433.497,00	
1,	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	78	2.496.433.497,00	
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	100%		
			Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja (%)	100%		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	1 Puskesmas	2.496.433.497,00	Puskesmas Way Mili
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.496.433.497,00	Puskesmas Way Mili
	J U M L A H				255.966.412.139,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Kesehatan dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025. Tujuan disusunnya renja Dinas Kesehatan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025.

Optimalisasi dalam pelaksanaan rencana kerja merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Dinas Kesehatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sukadana, September 2024


PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN
HAIRUL AZMAN, S.Kep., M.Kes
Pembina
NIP. 19661114 198711 1 001

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15		
1.02.01.2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	79,592,000		6,000,000	1	Dokumen	13,266,000					1	12,790,000	1	12,790,000	2	18,790,000	40	24			
			Dokumen perencanaan (DPA Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur tahun Anggaran 2022				1							-		-										
1.02.01.2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	55,494,000		5,513,800	2	Laporan	7,247,000			2	7,205,900		-	2	7,205,900	4	12,719,700	40	23			
			Laporan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur (LKPJ dan LPPD) Tahun 2021				2							-		-										
1.02.01.2.01.0007	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	114,306,000		3,998,700	2	Laporan	10,513,000			1	2,149,900		8,310,000	1	-	2	10,459,900	3	14,458,600	60	13	
			Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan				1							-		-										
1.02.01.2.02	Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan	100	%	652,632,978,923	100	95,344,934,241	100	%	105,988,355,560		26,572,894,879	58	28,779,813,837		27,868,565,130	42	15,801,021,740	100	99,022,295,586	100	194,367,229,827	100	30	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	60	blan	646,029,319,117		94,587,904,841	1,679	orang/bulan	105,025,326,154		26,429,796,779	1,679	28,599,072,837		27,673,705,130	1,454	15,439,461,340	3,133	98,142,036,086	3,133	192,729,940,927	5,222	30	
			Gaji dan tunjangan ASN pada Dinas Kesehatan, RSUD Sukadana dan Puskesmas				12							-												
1.02.01.2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Dokumen	4,143,480,000		441,166,500	12	Dokumen	614,160,000		78,010,000	6	119,920,000		155,200,000	6	218,084,800	12	571,214,800	22	1,012,381,300	37	24	
			Jasa pengelola administrasi perkantoran (honor PA, KPA, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima, Tim tehnis PPK, Operator SIRUP) pada Dinas Kesehatan				10							-		-										
1.02.01.2.02.0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	bulan	1,879,251,806		272,154,700	12	Dokumen	288,869,406		50,400,000	6	58,818,000		39,660,000	6	134,259,600	12	283,137,600	22	555,292,300	37	30	
			Jasa pengelolaan administrasi keuangan (PPK, bendahara, staf pengelola keuangan dan Operator SIMDA) pada Dinas Kesehatan				10							-		-										
1.02.01.2.02.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	Dokumen	108,316,000	-	-	-	dokumen	-			-		-		-	-	-	-	-	-	-		

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Dserah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
1.02.01.2.05	Terlaksananya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada Dinas Kesehatan	100	%	672,980,000	100	24,863,800	100	%	84,980,000		2,000,000	50	1,980,000		2,000,000	50	69,280,000	100	75,260,000	100	100,123,800	100	15	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	Dokumen	80,480,000		12,000,000	12	Dokumen	25,000,000		2,000,000	6	1,980,000		2,000,000	6	11,900,000	12	17,880,000	24	29,880,000	400	37	
			Jasa Operator SIGAP pada Dinas Kesehatan				12										-									
1.02.01.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,020	Dokumen	592,500,000		12,863,800	170	Dokumen	59,980,000						-	950	57,380,000	950	57,380,000	1,140	70,243,800	112	12	
			Penilaian PAK petugas fungsional kesehatan				190										-									
																	-									
1.02.01.2.06	Terlaksananya administrasi umum pada Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum pada Dinas Kesehatan	100	%	2,407,468,000	100	219,823,053	100	%	1,029,356,054		40,301,354	50	37,809,800		244,949,614	50	363,807,462	100	686,868,230	100	906,691,283	100	38	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	190,000,000		14,009,400	12	Paket	20,000,000		3,355,000	6	6,489,000		6,254,000	6	3,260,000	12	19,358,000	24	33,367,400	400	18	
			Suku cadang komponen listrik /penerangan bangunan kantor				12										-									
1.02.01.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	380,000,000		41,573,500	5	Paket	247,489,354		4,750,000	1	9,342,600		148,131,900	4	28,369,000	5	190,593,500	10	232,167,000	167	61	
			Peralatan kerja kantor				5										-									
1.02.01.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	66,808,000		5,601,600	12	Paket	10,000,000			6	2,198,500		2,274,800	6	5,520,700	12	9,994,000	24	15,595,600	400	23	
			Peralatan kebersihan pada kantor Dinas Kesehatan				12										-									
1.02.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	169,074,400		12,093,400	12	Paket	29,549,500		1,000,000	6	1,999,800		6,177,800	6	11,974,800	12	21,152,400	24	33,245,800	400	20	
			Logistik kantor (BBM Genset, Isi Tabung LPG, bahan pembersih dan bahan minuman) pada Kantor Dinas Kesehatan				12										-									
1.02.01.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	324,516,000		34,019,000	12	Paket	50,000,000			6	10,279,900		9,999,900	6	26,515,200	12	46,795,000	24	80,814,000	200	25	
			Barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan				12										-									
1.02.01.2.06.0006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	Dokumen	207,360,000		19,900,000	12	Dokumen	25,000,000		7,590,000	6	7,500,000		4,900,000	6	4,800,000	12	24,790,000	24	44,690,000	400	22	
			Bahan bacaan koran harian dan mingguan				12										-									
1.02.01.2.06.0008	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	Laporan	160,000,000		4,950,000	12	Laporan	9,000,000			2	-		-		2,260,000	2	2,260,000	5	7,210,000	7	5	
			Makan minum untuk tamu kedinasan				3										-									

[illegible]

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)			Unit PD Penanggung Jawab			
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		I		II		III		IV			K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.	
				5			6			7			8		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	12 = 8+9+10+11		13 = 12+6			14 = (13/5)x100		
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15				
1.02.01.2.09.0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	550,000,000	-	-	1	unit	75,000,000			-	10,999,900	1	63,454,000	1	74,453,900	1	74,453,900	17	14								
1.02.01.2.10	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas	35	Unit Kerja	76,400,000,000	34	105,364,445,001	34	puskesmas	88,115,618,299	-	34	14,219,715,087	28,991,906,145	-	42,224,569,903	34	85,436,191,134	34	190,800,636,135	97	250	Dinas Kesehatan							
			Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit				1		1	RS			1				1														
1.02.01.2.10.01	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35	Unit Kerja	76,400,000,000		105,364,445,001	35	Unit Kerja	88,115,618,299		35	14,219,715,087	28,991,906,145		42,224,569,903	35	85,436,191,134	35	190,800,636,135	100	250								
			Operasional pelayanan dan penunjang pelayanan puskesmas BLUD di Puskesmas				12								-																
1.02.02.2	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin (%)	100		517,422,979,133	83	84,220,739,313	100	%	99,445,390,612	215,247,380	-	9,801,856,545	23,078,732,612	85	39,179,315,164	85	72,275,151,701	85	155,757,325,314	85	30	Dinas Kesehatan							
			Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%) (SPM)	100			87		95	%			33		-	51		84		84		84									
			Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan (%) (SPM)(TPB)	100			86		93	%			34		-	59		93		93		93									
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%) (SPM) (TPB)	100			90		98	%			36		-	56		92		92		92									
			Pelayanan Kesehatan Balita (%) (SPM) (TPB)	88			80		77	%			34		-	47		81		81		92									
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%) (SPM)	69			96		65	%			35		-	61		96		96		140									
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%) (SPM)	50			83		20	%			15		-	26		41		41		83									
			Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%) (SPM)	80			78		73	%			28		-	55		83		83		103									
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%) (SPM) (TPB)	25			67		15	%			13		-	17		30		30		121									
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (%) (SPM)	75			80		55	%			29		-	46		75		75		100									
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (%) (SPM) (TPB)	90			75		82	%			44		-	51		95		95		106									
			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%) (SPM) (TPB)	100			71		98	%			39		-	43		82		82		82									

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
												I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (%) (SPM) (TPB)	66			70		62	%				28				42		70		70		106		
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan (%) (TPB)	96			86		92	%				34				59		93		93		97		
			Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan (%) (TPB)	89			84		85	%				29				46		74		74		84		
			Persentase temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) (SPM) (TPB)	94			71		90	%								31		31		31		33		
			Persentase pelayanan Kesehatan NAPZA yang ditangani (%) (TPB)	100			25		100	%								91		91		91		91		
1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP di tingkat kabupaten	100	%	153,468,930,004	100	28,344,039,641	100	%	12,672,018,597		12,000,000	62	72,183,800		4,090,667,210	38	7,138,889,154	100	11,313,740,164	100	39,657,779,805	100	26	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01.0002	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5	Unit	22,151,170,642		190,570,642			-				-		-	-	-	-	1	190,570,642	20	1		
			Jumlah bangunan puskesmas yang dibayarkan retensinya				1								-		-									
1.02.02.2.01.0003	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7	Unit	1,662,400,000		313,215,438	2	Unit	599,888,130				3,462,400		127,880,030	2	434,114,013	2	565,456,443	3	878,671,881	43	53	
			Jumlah gedung pustu yang dibangun				1								-		-									
1.02.02.2.01.0004	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5	Unit	1,997,819,574		18,039,574							-		-	-	-	-	1	18,039,574	20	1		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibayarkan retensinya				1								-		-									
1.02.02.2.01.0005	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	5	Unit	17,558,500,000		3,277,297,951	1	Unit	166,088,000				-		-	1	162,632,524	1	162,632,524	2	3,439,930,475	40	20	
			Jumlah gedung/bangunan Pediatric ICU (PICU) Rumah Sakit yang dibangun				1								-		-									
1.02.02.2.01.0006	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	Unit	13,683,246,501		5,569,755,117	6	Unit	4,011,929,561				2,781,000		1,471,542,678	6	2,295,693,246	6	3,770,016,924	10	9,339,772,041	100	68	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K		Rp.	K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15	
1.02.02.2.01.0016	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	156	Unit	600,000,000	-	-							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.2.01.0017	Tersedianya Obat dan Vaksin	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	13	Paket	19,445,993,526		2,650,491,560	1	paket	2,731,263,638		6,000,000	-	49,264,400		929,878,268	1	1,529,832,382	1	2,514,975,050	2	5,165,466,610	15	27			
			Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya				1							-		-			-									
			Operasional pengambilan obat dan vaksin ke propinsi				29							-		-			-									
1.02.02.2.01.0020	Tersedianya Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	9	Paket	13,943,537,940		966,816,614	3	paket	925,836,415			-		-	2	255,689,000	2	255,689,000	4	1,222,505,614	44	9				
			Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya				2							-		-			-									
1.02.02.2.01.0021	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	58	Unit	550,256,000		94,045,250	10	Unit	118,000,000		6,000,000		6,000,000		34,098,100	10	53,101,900	10	99,200,000	36	193,245,250	62	35			
			Jumlah monitoring pengelolaan sarana prasarana dan ASPAK di puskesmas				26							-		-			-									
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan				7							-		-			-									
1.02.02.2.01.0021	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	24	Paket	1,059,508,000		194,754,000	4	Paket	170,569,200			1	10,676,000		10,676,000	3	149,217,200	4	170,569,200	9	365,323,200	38	34			
			Operasional distribusi obat ke 34 puskesmas				5							-		-			-									
1.02.02.2.02	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Lampung Timur	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKM, UKM Rujukan, UKP dan UKP Rujukan, Tingkat Daerah Kabupaten	100	%	358,079,442,359	90	55,758,811,372	100	%	86,625,882,530	203,247,380	9	9,714,172,745		18,897,745,402	66	32,024,597,510	75	60,839,763,037	75	115,860,008,709	75	32	Dinas Kesehatan			
1.02.02.2.02.0001	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18,422	orang	4,539,860,400	16,027	887,722,350	17,602	orang	2,868,929,794		37,600,000	6,278	590,047,548		1,067,481,933	8,424	797,147,373	14,702	2,492,276,854	14,702	3,379,999,204	80	74			
1.02.02.2.02.0002	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17,584	orang	6,906,238,800	15,076	122,242,200	15,906	orang	1,117,059,200			6,228	143,041,800		323,702,800	8,599	277,352,400	14,827	744,097,000	14,827	866,339,200	84	13			
1.02.02.2.02.0003	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	16,747	orang	1,164,312,800	15,013	150,974,300	15,892	orang	657,038,700			6,174	56,593,000		48,920,000	8,464	265,051,200	14,638	370,564,200	14,638	521,538,500	87	45			

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV									
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
1.02.02.2.02.0004	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	65,834	orang	5,903,358,800	52,138	962,773,200	61,476	orang	1,379,839,214		10,818,000	22,961	228,704,351		308,520,500	26,671	542,927,950	49,632	1,090,970,801	49,632	2,053,744,001	75	35	
			Jumlah timbangan bayi untuk Posyandu (Pokir)				5												-							
1.02.02.2.02.0005	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	155,494	orang	7,474,586,600	171,265	1,244,670,900	161,580	orang	1,808,723,423			57,264	280,269,300		447,306,000	98,366	930,728,700	155,630	1,658,304,000	155,630	2,902,974,900	100	39	
1.02.02.2.02.0006	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	675,836	orang	11,024,357,600	560,371	2,088,147,200	681,706	orang	6,024,400,151		2,000,000	102,176	403,872,900		536,610,200	179,171	4,709,669,519	281,347	5,652,152,619	281,347	7,740,299,819	42	70	
1.02.02.2.02.0007	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	131,552	orang	4,703,198,200	107,162	704,251,300	151,668	orang	1,815,727,740			41,908	214,846,100		715,310,500	83,216	788,831,480	125,124	1,718,988,080	125,124	2,423,239,380	95	52	
1.02.02.2.02.0008	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah kasus Hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	267,245	orang	1,427,180,000	180,437	274,436,000	273,143	orang	269,930,000			35,284	3,150,000		3,150,000	47,665	257,854,900	82,949	264,154,900	82,949	538,590,900	31	38	
			Hibah bansos pada Yayasan Jantung Indonesia				1										-			-						
			Jumlah Posbindu Kit untuk Posbindu di desa (Pokir) (tersebar 12 desa di Kec. Purbolinggo)				12										-			-						
1.02.02.2.02.0009	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah kasus Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	68,628	orang	243,840,000	10,418	24,275,000	13,403	orang	1,134,670,400		37,378,400	3,876	3,150,000		26,480,000	6,216	970,604,400	10,092	1,037,612,800	10,092	1,061,887,800	15	435	
1.02.02.2.02.0010	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1,804	orang	891,591,000	1,043	123,210,500	1,879	orang	793,033,109			798	132,000,000		118,575,000	989	161,962,600	1,787	412,537,600	1,787	535,748,100	99	60	
1.02.02.2.02.0011	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	21,226	orang	7,231,119,600	9,170	1,279,822,600	17,679	orang	918,404,200			4,984	108,175,000		152,509,600	8,676	553,958,800	13,660	814,643,400	13,660	2,094,466,000	64	29	
1.02.02.2.02.0012	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV/AIDS mendapatkan screening HIV/AIDS	24,466	orang	4,138,520,400	15,793	687,247,685	20,954	orang	1,086,211,500		2,000,000	6,044	89,563,900		176,856,600	8,633	506,232,700	14,677	774,653,200	14,677	1,461,900,885	60	35	
1.02.02.2.02.0015	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6	dokumen	11,730,000,000	-	-							-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.2.02.0016	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	6	dokumen	5,036,000,000	-	-	1	Dokumen	9,600,000				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.2.02.0015	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	142	dokumen	7,874,262,200		1,203,667,900	612	Dokumen	2,037,650,100		2,000,000		27,290,000		258,254,160	467	460,269,442	467	747,813,602	468	1,951,481,502	330	25	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15	
			Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan dalam program penurunan stunting			1							-		-			-							
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan program pelayanan gizi masyarakat			34							-		-										
1.02.02.2.02.0016	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142	dokumen	2,347,493,600	355,888,600	799	Dokumen	705,314,770			141,913,000	122,531,700	726	294,403,600	726	558,848,300	760	914,736,900	535	39			
			Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan olah raga			34							-		-										
1.02.02.2.02.0017	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142	dokumen	8,149,962,200	1,155,350,600	3,636	Dokumen	2,276,868,031			2,000,000	226,261,000	918,443,800	3,355	744,214,800	3,355	1,890,919,600	3,389	3,046,270,200	2,387	37		
			Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan lingkungan			34							-		-										
1.02.02.2.02.0018	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	142	dokumen	6,868,847,550	-	146	Dokumen	27,550,000			3,250,000	5,250,000	121	14,400,000	121	22,900,000	121	22,900,000	85	0			
1.02.02.2.02.0019	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	6	dokumen	405,040,000	18,819,900	26	Dokumen	67,520,000			3,595,000	20,753,800	24	15,450,000	24	39,798,800	32	58,618,700	533	14			
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional			8							-		-										
1.02.02.2.02.0020	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	142	dokumen	24,555,466,250	2,714,923,550	2,915	Dokumen	740,677,100			8,390,000	19	132,849,000	133,875,000	1,903	201,374,000	1,922	476,488,000	1,934	3,191,411,550	1,362	13	
			Operasional pengelolaan surveillance kesehatan di tingkat kabupaten dan puskesmas			12							-		-										
1.02.02.2.02.0021	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					3,400	orang	190,444,448			63,400	461	66,857,800	46,200,000	890	62,850,000	1,351	175,971,200	1,351	175,971,200	-	-	
1.02.02.2.02.0022	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	141	orang	3,496,978,200	457,489,800	22	orang	51,007,400			15	2,000,000	39,707,000	5	1,800,000	20	43,507,000	54	500,996,800	38	14		
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA			34							-		-										
1.02.02.2.02.0023	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	6	dokumen	2,071,000,000	128,650,000	27	Dokumen	203,765,119			61,300,000	3	69,980,800	21,216,100	23	7,200,000	26	159,696,900	38	288,346,900	633	14	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
											I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15		
			Operasional Pelayanan Kesehatan pada situasi khusus (pelayanan kesehatan pada hari-hari besar, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pelayanan Kesehatan pada saat pemberangkatan/pemulangan haji) dan operasional PSC 119 di wilayah Kabupaten Lampung Timur				12							-													
1.02.02.2.02.0025	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142	dokumen	28,937,708,750		4,811,798,000	8,932	Dokumen	3,407,922,248		2,000,000	14	566,557,000		566,419,600	5,784	957,999,500	5,798	2,092,976,100	5,998	6,904,774,100	4,224	24		
			Jumlah fokus/titik kasus positif DBD yang mendapatkan pelayanan penyemprotan/fogging DBD				200							-			-			-							
			Jumlah monitoring/bimtek terpadu POPM Kecacingan ke puskesmas				34							-			-			-							
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (intervensi lanjutan PIS_PK)				34							-			-										
1.02.02.2.02.0026	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	dokumen	109,588,146,320		26,463,245,909	21	Dokumen	46,893,577,808		2,000,000	3	5,284,160,874		11,398,413,200	17	13,194,463,074	20	29,879,037,148	20	56,342,283,057	333	51		
			Jumlah masyarakat miskin di luar quota PBI pusat yang mendapatkan jaminan kesehatan dari Pemerintah Daerah				32,441							-			-			-							
			Jumlah peserta BPJS mandiri kelas 3 yang mendapatkan bantuan iur dari Pemda				46,438							-			-			-							
			Hutang Pelayanan Kesehatan Gratis untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan di RSUD Sukadana Tahun 2020				1							-			-			-							
			Premi PBI Daerah (hutang tahun 2021)				1							-			-			-							
1.02.02.2.02.0027	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						3,400	orang	37,260,000			28,130,000			-	130		-	130	28,130,000	130	28,130,000	-	-	
1.02.02.2.02.0028	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	600	Paket	301,985,600		43,810,000	1,272	paket	211,570,000		8,060,000	106	24,670,000		16,370,000	415	38,295,000	521	87,395,000	555	131,205,000	93	43		

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15	
			Operasional pengambilan dan pengiriman sampel kasus yang berpotensi KLB/Covid-19				34								-			-								
1.02.02.2.02.0034	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	16	unit	548,037,400	-	-						-			-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.02.2.02.0036	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Honor Tenaga BLUD Rumah Sakit Umum Sukadana	6	dokumen	16,474,772,380	12	5,055,850,000	1	Dokumen	15,228,000			-			-	-	-	-	12	5,055,850,000	200	31		
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN di RSUD Sukadana				4							-			-	-	-							
1.02.02.2.02.0033	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	142	dokumen	52,844,621,614		2,953,449,270	965	Dokumen	7,226,127,130		2,000,000	204	557,927,900		809,817,241	661	4,166,912,732	865	5,536,657,873	871	8,490,107,143	613	16	
			Dukungan manajemen pengelolaan BOK Puskesmas				6							-			-	-	-							
			Insentif UKM untuk petugas UKM Puskesmas				6							-			-	-	-							
			Operasional manajemen puskesmas (BOK Puskesmas)				34							-			-	-	-							
			Operasional puskesmas baru (2 puskesmas baru)				10							-			-	-	-							
1.02.02.2.02.0034	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6	dokumen	7,672,381,195		961,927,308	34	Dokumen	1,117,600,400		15,648,380	7	62,450,272		216,165,068	16	398,647,240	23	692,910,960	82	1,654,838,268	1,367	22	
			Jumlah parameter yang diperiksa dalam 1 tahun				59							-			-	-	-							
			Hibah operasional PMI Cabang Lampung Timur				1							-			-	-	-							
1.02.02.2.02.0035	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34	unit	4,367,588,300	-	-	-	Unit	-		14		-		-	-	14	-	14		-	41	-	
1.02.02.2.02.0036	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	142	laporan	1,792,589,000		264,421,000	382	laporan	47,800,000			2,525,000		7,250,000	187	17,050,000	187	26,825,000	221	291,246,000	156	16		
			Operasional pelacakan/penyelidikan epidemiologi kasus KIPI				34							-			-	-	-							
1.02.02.2.02.0037	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan kewaspadaan Dini dan Respon wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	142	laporan	2,868,397,600		480,672,800	442	Dokumen	145,863,000		9,989,200	65	12,490,000		30,198,400	157	57,738,800	222	110,416,400	246	591,089,200	173	21	
			Penyelidikan epidemiologi pada kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah				24							-			-	-	-							

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		I		II		III		IV		K	Rp.		K		Rp.		
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K			Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15		
1.02.02.2.01.0022	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	265,355	keluarga	4,500,000,000	167,000	139,073,500	2,895	keluarga	511,250,545			2,895	105,405,000		181,220,000	192,109	213,325,000	195,004	499,950,000	195,004	639,023,500	73	14			
1.02.02.2.02.0040	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkanyelayanan kesehatan sesuai standar						1,754	orang	327,350,000				67,725,000		93,629,100	1,048	111,670,900	1,048	273,025,000	1,048	273,025,000	-	-			
1.02.02.2.02.0041	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkanyelayanan kesehatan sesuai standar						51	orang	8,850,000				2,775,000		3,000,000	10	3,075,000	10	8,850,000	10	8,850,000	-	-			
1.02.02.2.02.0042	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria						1,589	Orang	171,880,000				-		-	175	148,384,900	175	148,384,900	175	148,384,900	-	-			
1.02.02.2.02.0043	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukn aktifitas merokok						2	tatanan	319,239,000			1	71,946,200		83,608,100	1	152,751,500	2	308,305,800	2	308,305,800	-	-			
1.02.02.2.03	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase pemenuhan layanan sistem informasi kesehatan terintegrasi di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas	100	%	1,028,681,070	100	59,436,700	100	%	81,938,285		-	50	12,500,000		52,320,000	50	10,000,000	100	74,820,000	100	134,256,700	100	13	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.03.0001	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6	Dokumen	213,724,500		20,906,200	1	Dokumen	30,000,000				29,065,000	1	-	1	29,065,000	2	49,971,200	33	23					
			Jumlah Buku Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten				1										-		-									
1.02.02.2.03.0002	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6	Dokumen	814,956,570		38,530,500	2	Dokumen	51,938,285		1	12,500,000		23,255,000	1	10,000,000	2	45,755,000	36	84,285,500	600	10				
			Jumlah puskesmas yang melakukan implementasi Sistem Informasi Puskesmas sesuai PMK No 31 Tahun 2019				34										-											
1.02.02.2.04	Meningkatnya perizinan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung timur	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten yang berizin	100	%	4,845,925,700	100	58,451,600	100	%	65,551,200		-	13	3,000,000		38,000,000	87	5,828,500	100	46,828,500	100	105,280,100	100	2	Dinas Kesehatan		
1.02.02.2.04.0003	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	39	Unit	4,845,925,700		58,451,600	39	Unit	65,551,200		5	3,000,000		38,000,000	34	5,828,500	39	46,828,500	39	105,280,100	100	2				
			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan pasca akreditasi dan penguatan mutu managemen Puskesmas				34										-			-								
			Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan persiapan akreditasi				5										-											
																	-											

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
													I		II		III		IV								
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K		Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5			6		7				8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15
1.02.03	Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga kesehatan sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan tenaga kesehatan terfasilitasi (%)	100	%	33,542,046,200	62	2,018,086,100	100	%	3,722,902,000		2,000,000	61,71	777,780,500		1,313,059,500	29	896,815,800	90	2,989,655,800	90	5,007,741,900	90	15	Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59	%		15		46	%				15				17		32		32		55			
1.02.03.2.01	Meningkatnya perizinan tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek	100	%	192,000,000	62	5,449,800	100	%	32,000,000				-		-	71.56	6,999,800	72	6,999,800	72	12,449,600	72	6	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01.0002	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	Dokumen	192,000,000		5,449,800	36	Dokumen	32,000,000						-	9	6,999,800	9	6,999,800	16	12,449,600	267	6		
			Jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta yang mendapatkan pembinaan, pengawasan dan visitasi perizinan				7																				
1.02.03.2.02	Tersedianya profil kesehatan dan rencana kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Timur	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten	100	%	31,972,052,000	33	1,821,934,800	100	%	1,673,500,000		2,000,000		559,480,000		240,924,000	92.00	618,106,000	92	1,420,510,000	92	3,242,444,800	92	10	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.02.0001	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen	390,000,000	-	-	-		-							-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.03.2.02.0002	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	968	orang	31,582,052,000		1,821,934,800	37	Orang	1,673,500,000		2,000,000	-	559,480,000		240,924,000	34	618,106,000	34	1,420,510,000	46	3,242,444,800	5	10		
			Jumlah tenaga dokter kontrak di puskesmas (36 dokter)				12													-							
			Jumlah tenaga kontrak di puskesmas (25 tenaga kesehatan kontrak)				12																				
1.02.03.2.03	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase petugas kesehatan yang terlatih dan kompeten dalam pelaksanaan program kesehatan	75	%	1,377,994,200	75	190,701,500	75	%	2,017,402,000		-	9	218,300,500		1,072,135,500	64	271,710,000	73	1,562,146,000	73	1,752,847,500	97	127	Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.03.0001	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	520	orang	1,377,994,200		190,701,500	395	Orang	2,017,402,000			34	218,300,500		1,072,135,500	253	271,710,000	287	1,562,146,000	357	1,752,847,500	69	127		

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV										
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15		
			Jumlah petugas pengelola PSC 119 yang mendapatkan peningkatan kompetensi tentang Sistem Rujukan Fasilitas Kesehatan				70												-								
			Jumlah petugas puskesmas yang mendapatkan bimbingan teknis tentang program PIN MR				34																				
																			-								
1.02.04	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian, Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan makanan minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat (%)	98	%	1,599,540,000	51	168,105,400	90	%	463,146,000			-		15,630,000		71,230,500	38	344,997,300	38	431,857,800	38	599,963,200	39	38	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100	%		100		60	%								100		100		100		100			
			Persentase Sarana Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	60	%		-		40	%								-		-		-		-			
1.02.04.2.01	Meningkatnya perizinan sarana kefarmasian di wilayah Kabupaten Lampung Timur	Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Kefarmasian yang berizin	100	%	126,000,000	100	-	100	%	63,730,000			-		-		-	100	63,730,000	100	63,730,000	100	63,730,000	100	51	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	dokumen	126,000,000	-	-	30	dokumen	63,730,000							-	30	63,730,000	30	63,730,000	30	63,730,000	500	51	
1.02.04.2.03	Meningkatnya perizinan produk makanan minuman pada Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memiliki sertifikat dan Nomor_PIRT	70	%	834,236,000	40	81,769,900	55	%	240,450,000			-	40	7,245,000		64,330,500	5	154,772,000	45	226,347,500	45	308,117,400	65	37	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.03.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	6	Dokumen	834,236,000		81,769,900	150	Dokumen	240,450,000					7,245,000		64,330,500	134	154,772,000	134	226,347,500	239	308,117,400	3,983	37	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV										
				K		Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12÷6		14 = (13/5)x100		15		
			Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pemilik IRTP; Pemeriksaan Sarana Produksi pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				105																				
1.02.04.2.06	Meningkatnya monitoring dan pemeriksaan pos market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP berizin yang pengelolaannya sesuai standar	100	%	639,304,000	81	86,335,500	100	%	158,966,000			-	81	8,385,000		6,900,000	12	126,495,300	92	141,780,300	92	228,115,800	92	36	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.06.0001	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1,140	Unit	639,304,000		86,335,500	88	Unit	158,966,000					8,385,000		6,900,000	63	126,495,300	63	141,780,300	103	228,115,800	9	36	
			Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan post market dalam pengelolaan industri pangan rumah tangga				40													-							
			Jumlah sampel produk pangan IRTP yang memenuhi ketentuan				26																				
1.02.05	Meningkatnya kemandirian dan budaya hidup sehat masyarakat.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif dengan strata pumama mandiri	55	%	24,600,783,850	60	4,720,767,692	40	%	5,553,060,169			-	37	382,644,591		1,652,343,300	25	2,399,217,871	62	4,434,205,762	62	9,154,973,454	112	37	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01	Meningkatnya upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	55	%	18,582,007,550	100	3,995,155,792	40	%	5,054,971,399			-	9	214,241,300		1,521,133,300	91	2,258,371,971	100	3,993,746,571	100	7,988,902,363	182	43	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01.0001	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6	Dokumen	18,582,007,550		3,995,155,792	35	dokumen	5,054,971,399					214,241,300		1,521,133,300	1,703	2,258,371,971	1,703	3,993,746,571	1,727	7,988,902,363	28,783	43	
			Advokasi/sosialisasi PIN MR di tingkat kecamatan				24													-		24					
			n Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) di tatanan mendukung kluster fisik dan deteksi dini penyakit di tingkat Kabupaten dan kecamatan				24													-		150					
			Jumlah kader yang mendapatkan bimtek tentang kemandian pangan dalam rangka menuju Desa Pangan Aman				150													-		200					

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sd Renja PD Tahun Lalu (n-1) TA 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) TA 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV									
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = (13/5)x100		15	
			Jumlah masyarakat yang menerima KIE tentang keamanan obat dan makanan				200												-		24					
			Orientasi kader dan kampanye pencegahan stunting				24												-		1					
			Peran SAKA Tingkat Nasional				1																			
1.02.05.2.02	Meningkatnya penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase paket pengadaan media promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	100	%	665,000,000	31	500,000	100	%	124,696,400	-	-	17,060,000		19,320,000	100	83,568,500	100	119,948,500	131	120,448,500	131	18	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.02.0001	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6	Dokumen	665,000,000		500,000	2	dokumen	124,696,400			17,060,000		19,320,000	53	83,568,500	53	119,948,500	57	120,448,500	950	18		
			Cetak Spanduk PHBS				4																			
1.02.05.2.03	Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu aktif	85	%	5,353,776,300	100	725,111,900	70	%	373,392,370	-	14	151,343,291		111,890,000	86	57,277,400	100	320,510,691	100	1,045,622,591	118	20	Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.03.0001	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	142	Dokumen	5,353,776,300		725,111,900	14	dokumen	373,392,370		4	151,343,291		111,890,000	110	57,277,400	114	320,510,691	378	1,045,622,591	266	20		
			Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan UKBM				264																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											305,602,772,440		26,967,879,295		54,247,609,233		83,505,672,699		101,636,532,959		266,357,694,185		558,461,906,048			

Keterangan
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah, capaian kinerja 0, karena belum ada survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Dinas Kesehatan Pada Tahun 2023



AZMAN, S.Kep., M.Kes
Pembina
NIP. 19661114 198711 1 001